

# BAMSOET: SOSIALISASIKAN EMPAT PILAR MPR MELALUI MEDIA SOSIAL

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



# MAJELIS

## EMPAT PILAR MPR

PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

EDISI NO.11/TH.XIII/NOVEMBER 2019



## *Pelantikan* PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019-2024 BERLANGSUNG AMAN DAN DAMAI

**18** Nasional  
Safari Pimpinan MPR  
Menjelang Pelantikan Presiden

**39** Selangan  
Suara Si Bung Menggelegar  
Memompa Semangat Para Pejuang

**68** Sosialisasi  
Pelantikan Jokowi - Ma'ruf Amin  
Diliput Ribuan Media

ISSN 0854-6371



9 770854 637158



# EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



**EMPAT PILAR MPR**  
 PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**  
 MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



## **EMPAT PILAR MPR RI**

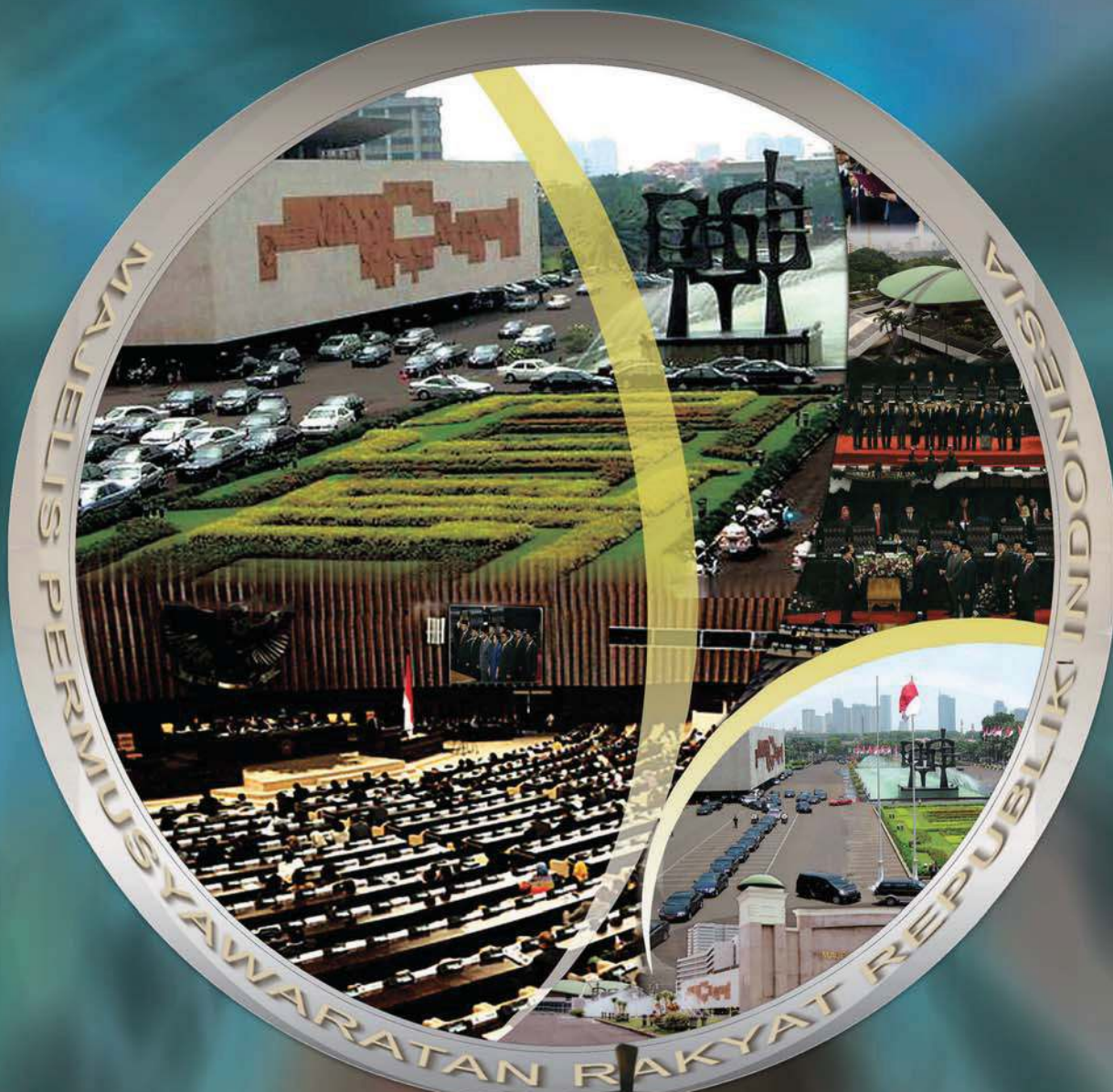
*Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
NKRI Sebagai Bentuk Negara  
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara*



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**  
MPR RUMAH KERANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT



**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA



**INDONESIA**  
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

# Daftar Isi

EDISI NO.11/TH.XIII/NOVEMBER 2019



## 06 BERITA UTAMA

### Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden

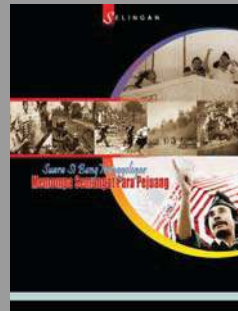
MPR melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan menggelar Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 - 2024. Dalam sidang paripurna ini, Ir. H. Joko Widodo mengucapkan sumpah Presiden dan K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah Wakil Presiden di depan Pimpinan dan anggota MPR.



**36 Nasional**  
Rapat Perdana Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024



**56 Sosialisasi**  
Terapkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari



**39 SELINGAN**  
Bung Tomo



**76 Profil**  
Hilary Brigitta Lasut

Pengantar Redaksi .....	04
Opini .....	06
Kolom .....	13
Safari Pimpinan MPR .....	18
Aspirasi Masyarakat .....	47
Diskusi Majelis .....	48
Wawancara .....	66
Gema Pancasila .....	68
Varia MPR .....	70
Figur .....	72
Ragam .....	74
Catatan Tepi .....	80
Bicara Buku .....	82



COVER

Edisi No.11/TH.XIII/November 2019  
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Humas MPR RI



**Budi Muliawan**  
Koordinator Reportase

## Pengantar Redaksi

### Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019 - 2024

**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Paripurna MPR dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 – 2024. Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden itu berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2019. Dengan menggelar Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini maka MPR telah menjalankan amanah konstitusi, yaitu Pasal 3 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/ atau Wakil Presiden”.

Berikutnya, agenda tunggal dalam Sidang Paripurna MPR itu adalah pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Pengucapan sumpah merupakan ketentuan dan amanah dari Pasal 9 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, yang menyebutkan: “Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Adapun sumpah itu sebagai berikut: “Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Dalam Pemilihan Umum Presiden 2019, pasangan Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin meraih 85.607.362 atau 55,50% suara sah nasional. Dengan kata lain, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin berhasil meraih simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia sehingga terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.

Maka dalam Sidang Paripurna MPR ini Ir. H.

Joko Widodo mengucapkan sumpah Presiden dan K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah Wakil Presiden di hadapan pimpinan dan anggota MPR serta disaksikan tamu undangan. Dengan pengucapan sumpah dan penandatanganan Berita Acara Pelantikan maka Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin telah sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019 – 2024.

Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung lancar, aman, tertib, dan khidmat. Tampak hadir para tokoh nasional seperti Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Juga hadir tamu kehormatan negara sahabat, seperti Sultan Brunei Darussalam Sri Baginda Hasanah Bolkiah, Perdana Menteri Malaysia Dr. Mahathir bin Mohammad, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Republik Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok Wang Qishan.

Dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini, Indonesia memulai lembaran baru dalam kehidupan pemerintahan dan kenegaraan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin. Keduanya telah memperoleh kepercayaan dari rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk melaksanakan amanah rakyat, bangsa, dan negara dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terhitung sejak 20 Oktober 2019 sampai dengan 20 Oktober 2024. Kini Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin bukan lagi pemimpin satu golongan tertentu saja, tetapi telah menjadi milik dan pemimpin seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. □



#### **PENASEHAT**

Pimpinan MPR-RI

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Ma'ruf Cahyono

#### **PEMIMPIN REDAKSI**

Siti Fauziah

#### **DEWAN REDAKSI**

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

#### **REDAKTUR PELAKSANA**

Muhamad Jaya

#### **KOORDINATOR REPORTASE**

Budi Muliawan

#### **REDAKTUR FOTO**

Supriyanto, Sucipto,

Rades Rahardian

#### **REPORTER**

Ana Suzana, Mery S. Magdalena,

Yenita Revi, Sugeng Cahyono

#### **FOTOGRAFER**

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

#### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **DISTRIBUSI**

Elen Magdalena

#### **KOORDINATOR DISTRIBUSI**

Cucu Riwayatati

#### **STAF DISTRIBUSI**

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana, Kiki Tri Murjono,

Armansyah, Dhita Fitarsari

Junaid

#### **SEKRETARIS REDAKSI**

Djarot Widiarto

#### **TIM AHLI**

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

#### **ALAMAT REDAKSI**

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id



### Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

**EMPAT PILAR MPR RI**

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO



## Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

# Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin

## Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024

MPR melaksanakan tugas konstitusionalnya dengan menggelar Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 - 2024. Di depan Sidang Paripurna MPR ini, Ir. H. Joko Widodo mengucapkan sumpah Presiden dan K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah Wakil Presiden.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



**D**ENYUT aktivitas di Kompleks Parlemen sudah terasa sejak pagi Ahad, 20 Oktober 2019. Hari itu menjadi hari bersejarah. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019 pada pukul 14.30 WIB hingga selesai di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam sidang paripurna ini, Ir. H. Joko Widodo mengucapkan sumpah Presiden dan K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah Wakil Presiden di depan Pimpinan dan

anggota MPR.

Tapi, ada yang berbeda dalam pelaksanaan Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kali ini dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 2014. Pengamanan kali ini terasa super ketat. Penjagaan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, sudah disiapkan sejak Sabtu (19/10/2019). Sekitar 31 ribu personel TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Sejumlah ruas jalan di sekitar kompleks parlemen sudah ditutup atau steril dari kendaraan yang melintas. Ruas di Jalan Gatot Subroto, Jalan Tentara Pelajar, dan Jalan Gerbang Pemuda ditutup satu jalur. Jalan dari stasiun kereta api Palmerah menuju arah pintu masuk kompleks Parlemen juga dialihkan. Pejalan kaki yang biasa melewati pintu di dekat Pos Polisi Stasiun Palmerah juga diarahkan masuk melalui pintu masuk kendaraan motor.

Aparatur keamanan dari TNI dan Polri berjaga di akses masuk kompleks parlemen. Tampak aparaturnya TNI dan Polri berjaga mulai dari jembatan penyeberangan orang (JPO) di Stasiun Palmerah. Personel Sabhara, Brimob, dan Paskhas juga telah menyebar di





trottoar jalan sekitar kompleks parlemen. Aparatur keamanan telah menyekat kendaraan yang hendak melintas, mulai dari depan Hotel Mulia. Aparatur keamanan dibantu pengamanan internal kompleks MPR/DPR/DPD mewajibkan semua orang yang hendak masuk untuk menunjukkan identitas dan memperlihatkan wajah secara jelas. Bagi pengemudi mobil diwajibkan untuk membuka kaca mobil dan bagian bagasi. Sementara bagi pengemudi motor diwajibkan membuka helm dan jaket. Setiap orang yang masuk melalui pintu masuk kendaraan motor diperiksa oleh petugas. Tas atau barang bawaan mereka tak lepas dari pemeriksaan petugas.

Di kompleks MPR/DPR/DPD Senayan terdapat 5 kendaraan taktis Barracuda sudah disiagakan. Sebanyak enam kendaraan

panser jenis Anoa milik TNI dan tiga helikopter (dua helikopter TNI AU H-3205 dan satu helikopter presiden H-3204) juga *standby* di area Gedung Nusantara. Tampak sejumlah personel Brimob dan Paspampres berjaga di dekat kendaraan tempur tersebut. Kendaraan water canon dan Barracuda juga sudah parkir di Pintu Utama Gedung MPR/DPR/DPD yang menghadap ke Jalan Gator Subroto.

Pengamanan super ketat ini merupakan imbas dari aksi-aksi demo mahasiswa dan pelajar STM sebelumnya yang berakhir ricuh, bahkan jatuh korban jiwa. Belum lagi terjadi penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto di Banten. Kepolisian akhirnya melarang aksi demo mahasiswa bertepatan dengan hari pelantikan presiden dan wakil presiden. Pengamanan super ketat di

Kompleks Parlemen merupakan antisipasi terhadap berbagai kemungkinan terjadinya gangguan keamanan.

Di tengah pengamanan yang super ketat, Kompleks Parlemen (MPR/DPR/DPD) Senayan, Jakarta, bersolek menghadapi hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih masa jabatan 2019 – 2024. Segala pernak pernik dekorasi dan bunga tertata apik di seputar Gedung Nusantara, tempat Sidang Paripurna MPR untuk pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung. Karpet merah terpasang di depan Gedung Kura-Kura nama lain Gedung Nusantara dari pinggir jalan hingga masuk ke gedung. Sebuah gapura berwarna merah dengan tema rumah adat Papua, rumah honai, pun berdiri di depan pintu masuk gedung yang atapnya berwarna hijau itu. Di gapura itu



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

terpampang tulisan: “Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019 – 2024.”

Di lobi Gedung Nusantara terdapat layar yang bertuliskan: “Selamat dan Sukses”. Foto Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin terpajang di sana. Lift yang digunakan tamu VVIP menuju Ruang Sidang Paripurna di lantai tiga gedung turut dipercantik dengan tema rumah adat Padang, Rumah Gadang. Di antara tangga berjalan (escalator) yang digunakan anggota MPR dan tamu undangan lainnya menuju Ruang Sidang Paripurna di lantai 3 juga didekorasi bunga-bunga dengan gambar Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin sedang tersenyum lebar. Setiap orang yang menaiki tangga berjalan bakal memandangi dekorasi bunga warna merah, putih, dan merah muda itu.

Di dalam Ruang Sidang Paripurna, bunga-bunga juga menghiasi setiap sudut, baik di sisi atas dan bawah podium. Gambar peta Indonesia dari bunga warna merah dan putih terpampang di depan menghiasi Burung Garuda tepat di belakang tempat duduk pimpinan sidang paripurna. Kain warna merah dan putih menghiasi balkon kiri, kanan, dan tengah Ruang Sidang Paripurna.

Sejak pukul 12.30 WIB, anggota MPR dan tamu undangan pelantikan presiden dan wakil presiden mulai berdatangan. Mereka datang dalam waktu yang berbeda-beda. Tampak hadir di antaranya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Yenny Wahid (putri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, politisi Golkar Akbar

Tandjung, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Gubernur NTT Victor Laiskodat, Basuki Tjahaja Purnama, dan tokoh nasional lainnya.

Sekitar pukul 12.40 WIB, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tiba di Kompleks MPR/DPR/DPD. Prabowo yang mengenakan jas berwarna hitam dan dasi berwarna merah dipadu peci hitam datang bersama Sandiaga Uno yang juga mengenakan jas hitam dengan dasi merah dan peci hitam. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno adalah calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019.

Wakil Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, Habiburrahman turut menyambut kehadiran Prabowo dan Sandiaga di Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD.

Prabowo langsung naik ke lantai 3 (ruang Pimpinan DPR) untuk menunggu sebelum menuju ke Ruang Sidang Paripurna di Gedung Nusantara.

Presiden Kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 13.24 WIB. Ia mengenakan kebaya warna putih dengan syal berwarna merah. Megawati hanya melamparkan senyum dan lambaian tangan kepada jurnalis yang sudah menunggu di pintu masuk Gedung Kura-Kura. Megawati didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Utut Adianto.

Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tiba di kompleks parlemen, Senayan,





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Jakarta, sekitar pukul 13.50 WIB. Dia tampak mengenakan jas dan peci serta dasi warna biru. Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menyambut kedatangan SBY. SBY langsung masuk ke Gedung Nusantara menuju Ruang Sidang Paripurna di Lantai 3.

Presiden Joko Widodo sendiri tiba di Gedung Nusantara pada pukul 14.40 WIB. Turun dari mobil Indonesia 1, Joko Widodo disambut Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono dan Pangdam jaya Mayjen Eko Margiyono, dan seluruh Pimpinan MPR. Presiden berjalan menuju gedung didampingi Iriana Joko Widodo yang mengenakan kebaya. Jokowi terlihat mengenakan jas hitam yang membalut kemeja putihnya dengan dasi merah. Tampak ikut mendampingi anak-anak

Jokowi, yaitu Gibran Rakabuing, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarep. Suami Kahiyang, Bobby Nasution serta anaknya, Sedah Mirah, ikut bersama-sama.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Wakil Presiden terpilih K.H. Ma'ruf Amin sudah lebih dulu tiba di lokasi. Jusuf Kalla berangkat dari rumah dinas di Jl. Diponegoro, Jakarta Pusat. Dia mengenakan kemeja putih dengan jas warna hitam. Sedangkan Mufidah Jusuf Kalla mengenakan batik warna biru. Sementara penampilan K.H. Ma'ruf Amin sedikit berbeda. Ia tak mengenakan sarung seperti biasanya, tapi memakai celana panjang warna hitam. Turut mendampingi istri Ma'ruf Amin, Wuri Estu Handayani. Anak-anak Ma'ruf Amin juga

tampak mendampingi di antaranya Syauqi Ma'ruf Amin, Siti Ma'rifah, Siti Azizah, dan anak-anak Ma'ruf Amin lainnya.

### Pengucapan Sumpah

Sidang Paripurna MPR dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden molor satu jam dari jadwal. Semula sidang dijadwalkan dimulai pukul 14.30 WIB, namun baru dimulai sekitar pukul 15.30 WIB. Beberapa saat sebelum sidang paripurna dimulai, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri masuk ke Ruang Sidang Paripurna didampingi putrinya yang juga Ketua DPR Puan Maharani. Mengikuti di belakangnya Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz. Di belakang Megawati juga ada Presiden Ke-6





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Ke-11 Boediono.

Presiden Joko Widodo baru tiba di Ruang Sidang Paripurna sekitar pukul 15.28 WIB. Jokowi berjalan beriringan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Di belakangnya tampak

Wakil Presiden terpilih K.H. Ma'ruf Amin. Seluruh Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang ikut mendampingi Presiden dan Wakil Presiden menuju tempat duduk di depan. Sesaat setelah mereka berada di tempat yang ditentukan, Sidang Paripurna MPR pun

dimulai.

Diawali dengan menyanyikan Lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Setelah itu, Bamsot membuka sidang paripurna.

### Pidato Bambang Soesatyo:

## "Jokowi-Ma'ruf Amin Pemimpin Seluruh Rakyat Indonesia"

Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanah rakyat, bangsa, dan negara.

IR. H. JOKO WIDODO dan K.H. Ma'ruf Amin selesai mengucapkan sumpah presiden dan wakil presiden serta menandatangani Berita Acara Pelantikan dalam Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 – 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. Ketua MPR Bambang Soesatyo yang memimpin sidang mengucapkan selamat sekaligus mengingatkan bahwa Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin bukan lagi milik satu golongan saja, melainkan menjadi milik dan pemimpin seluruh rakyat Indonesia yang multi etnis, beragam agama dan kepercayaan, serta kemajemukan lainnya.

"Ir. H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin telah berhasil meraih simpati dari sebagian besar rakyat Indonesia sehingga terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019. Dengan demikian telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia



sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan amanah rakyat, bangsa, dan negara," kata Bamsot dalam pidatonya usai prosesi pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan bangsa Indonesia sudah menunjukkan kesolidannya melalui keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Ini bukti bahwa Bangsa Indonesia telah melangkah maju melaksanakan

“Berdasarkan catatan Sekretariat Jenderal telah hadir 689 dari 711 anggota MPR. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden kami buka dan terbuka untuk umum,” kata Bamsuet. Ikut mendampingi para Wakil Ketua Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB), Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Mengawali sidang, Bamsuet menyapa tamu undangan yang menghadiri sidang

paripurna MPR ini. “Kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Ibu Megawati dan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ibu Bangsa dan Bapak Bangsa di acara pelantikan hari ini. Sungguh kami terharu karena kehadiran ibu dan bapak berdua telah membuat Indonesia pada hari ini semakin indah,” ujar Bamsuet disambut tepuk tangan anggota MPR dan undangan yang hadir.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. “Izinkan kami sampaikan apresiasi dan penghargaan atas ketulusan Pak Prabowo

dan Sandiaga Uno yang menerima hasil Pemilu dengan jiwa besar. Ada saatnya kita bertempur, ada saatnya bersatu kembali. Kata Pak Prabowo bersatu itu indah, bersatu itu keren,” ucap Bamsuet.

Tak hanya itu, mantan Ketua DPR ini juga memberikan sebuah pantun khusus kepada Prabowo Subianto. “Dari Teuku Umar ke Kertanegara, dijamu nasi goreng oleh Ibu Mega. Meski Pak Prabowo tidak jadi kepala negara, tetapi masih bisa berkuda dan lapang dada,” katanya disambut meriah anggota MPR dan tamu undangan.

Dalam kesempatan itu Bamsuet me-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

demokrasi yang semakin baik.

“Kita bangga memiliki demokrasi yang khas Indonesia, yakni Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang ber-ruh kebangsaan yang memuliakan, merawat keragaman untuk membangun persatuan dalam perbedaan, serta mewujudkan impian bersama dalam rumah besar Indonesia, Rumah Pancasila,” jelas Bamsuet.

Selain itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini mengingatkan, dalam lima tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dinamika lingkungan strategis global diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang telah menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global.

“Selain berbagai permasalahan internal di dalam negeri, dalam lima tahun ke depan, Indonesia juga akan menghadapi tantangan global yang tak ringan. Jika tidak siap dan waspada, Indonesia dapat tergilas dalam

kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu. Berbaurnya ancaman militer dan non-militer mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi,” urai Bamsuet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah ini juga menambahkan, ekonomi dunia sedang mengalami ketidakpastian, persaingan semakin tajam, dan perang dagang semakin memanas. Kemudahan arus informasi dan komunikasi juga membawa ancaman tersendiri terhadap ideologi Pancasila.

Dengan membonceng fenomena globalisasi, nilai-nilai individualisme, liberalisme, dan ekstremisme telah ditransformasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif, seolah harus diterima sebagai standar nilai baru yang terbaik dalam pembangunan sistem politik, ekonomi, dan budaya Indonesia.

“Namun, seberat apapun tantangan yang akan kita hadapi, akan terasa sangat ringan

jika kita pikul bersama. Kita harus memiliki optimisme yang tinggi, memiliki kesadaran dan komitmen seluruh komponen bangsa untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional, saling bahu-membahu, bergotong-royong. Ringan sama dijinjing berat sama dipikul,” urai Bamsuet.

Bendahara Umum Partai Golkar 2014-2016 ini mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menjalankan amanat rakyat dengan sebaik-baiknya. Dengan memegang teguh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perbedaan akan bermuara pada kebersamaan dalam rumah kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dengan bergotong-royong tantangan yang berat akan menjadi terasa ringan. Kita satu saudara, harus bahu-membahu, bergandengan tangan meraih masa depan Indonesia yang gemilang,” pungkas Bamsuet. □

BSC



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

nyebutkan satu per satu tamu kehormatan negara sahabat. Mereka adalah Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah; Perdana Menteri Australia, Scott Morrison; Perdana Menteri Republik Singapura, Lee Hsien Loong; Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen; Raja Eswatini, Raja Miswati III; Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Wang Qishan; Wakil Presiden Republik Sosialis Viet Nam, Đ-ng ThĒ Ngíc ThĒnh; Wakil Presiden Republik Uni Myanmar, Henry Van Thio; Utusan Khusus Presiden Republik Korea, Noh Young-min; Utusan Khusus Presiden Filipina, Theodoro Locsin Jr; Utusan Khusus Perdana Menteri Jepang, Nakayama Norihiro; Utusan Khusus Presiden Persatuan Emirat Arab, Sheikh Nahyan Mubarak Al Nahyan; dan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat, Hon. Elaine L. Chao; dan utusan khusus Presiden Republik Suriname Soewarto Mustadja.

Sebelum proses pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden, Bamsuet membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan KPU berisi penetapan Ir.H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2019 dengan meraih 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah nasional.

Selanjutnya prosesi Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah. Joko Widodo lebih dulu mengucapkan sumpah sebagai presiden, baru kemudian K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan sumpah sebagai wakil presiden. Wakil Presiden 2014 – 2019 Jusuf Kalla menyaksikan prosesi pengucapan sumpah itu.

“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Jokowi.

Setelah itu, Ma'ruf juga mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden RI. “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa,” ucap Ma'ruf Amin.

Keduanya kemudian menandatangani Berita Acara Pelantikan. Lalu sepuluh Pimpinan MPR juga membubuhkan tanda

tangan di Berita Acara Pelantikan. Dengan demikian, sejak saat itu, Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019 – 2024. Joko Widodo kembali ke tempat duduk semula. Sedangkan K.H. Ma'ruf Amin bertukar posisi tempat duduk dengan Jusuf Kalla. Melihat pertukaran itu, hadirin pun bertepuk tangan.

Tak lupa, dalam Sidang Paripurna itu, Bamsuet menyampaikan apresiasi kepada Wakil Presiden periode 2014 – 2019 Jusuf Kalla selama lima tahun mendampingi Presiden Joko Widodo. “Atas nama pimpinan dan anggota majelis, kami sampaikan penghargaan setinggi tingginya kepada Bapak Jusuf Kalla atas pengabdian Bapak kepada masyarakat bangsa dan negara,” ungkap Bamsuet disambut tepuk tangan selama beberapa saat.

Sebelum menutup Sidang Paripurna MPR, Bamsuet mempersilahkan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasarudin Umar, membacakan doa. Setelah itu Bamsuet menutup Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 – 2024. Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” kembali dikumandangkan.

Tim Majelis

## “Jokowi – Maruf Mengayomi Seluruh Rakyat”

**K**ETUA MPR Bambang Soesatyo mengajak semua elemen masyarakat untuk mensyukuri rahmat dan karunia Tuhan YME karena pada hari ini (Ahad, 20 Oktober 2019-*red*) Bangsa Indonesia boleh mengambil sumpah jabatan dan pelantikan Presiden RI serta Wakil Presiden RI periode 2019 – 2024.

Dengan pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI hari ini oleh MPR RI, sosok Presiden terpilih Joko



Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin legitimate memimpin bangsa dan negara untuk periode lima tahun ke depan. Melekat pada kedua pemimpin adalah hak dan kewajiban melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, termasuk hak prerogatif membentuk formasi kabinet.

Peristiwa bersejarah hari ini menandai langkah maju Indonesia mengejawantahkan demokrasi Pancasila, sekaligus sebagai kekuatan untuk terus menapaki modernisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberlanjutan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari hasil pemilihan Presiden yang demokratis patut dipahami sebagai kehendak rakyat Indonesia agar Demokrasi Pancasila terus ditumbuhkembangkan.

Untuk merayakan kemenangan dan kejayaan demokrasi Pancasila itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut dan menerima dengan gembira duet kepemimpinan Joko Widodo – Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. MPR memastikan, duet kepemimpinan Jokowi – Maruf Amin akan selalu menaungi dan mengayomi seluruh elemen masyarakat, tanpa terkecuali.

Politik Pemerataan Pembangunan yang selama ini sudah dikenal sebagai karakter pengabdian Presiden Jokowi pasti dilanjutkan. Semua desa, dari ujung Sabang hingga ujung Merauke, akan mendapatkan sentuhan pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing desa. Kualitas pembangunan harus terus dipertajam.

Mengacu pada realitas persoalan dan tantangan terkini, MPR akan merekomendasikan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk fokus merawat kebhinnekaan bangsa dalam bingkai Pancasila. MPR juga akan merekomendasikan kepada kedua pemimpin untuk segera merealisasikan ragam infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kemampuan Generasi Milenial dan Generasi Z menanggapi perubahan zaman. Menjadi kewajiban negara untuk mempersiapkan orang muda Indonesia sebagai generasi penerus yang tangguh, inovatif, dan kreatif.

Dunia menyaksikan peristiwa bersejarah hari ini. Tujuh belas kepala negara dan utusan sejumlah negara sahabat telah hadir di Jakarta untuk menyaksikan upacara pelantikan Presiden RI.

Ini lah momentum bagi kita bersama untuk menunjukkan profil Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, berhikmat dan yang selalu menawarkan persaudaraan kepada semua bangsa. □

**Bamsuet**

## Pidato Perdana Presiden

# Lima Prioritas Pembangunan 2019-2024

Presiden menyampaikan lima hal prioritas untuk dikerjakan pada periode kedua pemerintahannya. Apa saja?



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**ETELAH Ir. H. Joko Widodo mengucapkan sumpah presiden dan Prof. Dr. K.H. Maruf Amin mengucapkan sumpah wakil presiden, serta menandatangani Berita Acara Pelantikan di hadapan Sidang Paripurna MPR, maka keduanya sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2019 – 2024. Ketua MPR Bambang Soesatyo yang memimpin Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden atas nama Pimpinan dan anggota MPR mengucapkan selamat kepada Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin yang telah memperoleh kepercayaan rakyat Indonesia untuk mengemban amanah rakyat, bangsa, dan negara dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (8) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR yang menyatakan: "Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan," Ketua MPR pun mempersilahkan Joko Widodo untuk menyam-

paikan pidato perdana awal masa jabatan presiden. "Tiba saatnya kita mendengarkan pidato awal masa jabatan Presiden Saudara Ir. H. Joko Widodo dalam sidang paripurna ini. Kepada saudara Ir. H. Joko Widodo kami persilakan," ucap Bamsot, begitu Bambang Soesatyo bisa disapa.

Presiden Joko Widodo berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju podium untuk



menyampaikan pidato perdana. Mengawali pidato, Joko Widodo menyapa dan memberikan salam hormat berturut-turut kepada Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-6 Soesilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden Ke-11 Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Ke-12 Muhammad Jusuf Kalla. Kemudian memberikan salam hormat kepada kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari Negara-negara sahabat, dan para pemimpin lembaga negara.

"Yang saya hormati sahabat baik saya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Uno," ujar Jokowi. Mendengar namanya disebut, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang duduk bersebelahan serempak berdiri dan memberikan hormat kepada Jokowi. Aksi keduanya mendapat sambutan tepuk tangan dari anggota MPR dan tamu undangan.

Presiden membuka pidato perdananya dengan berbicara tentang mimpi satu abad



Indonesia merdeka. “Mimpi kita, cita-cita kita di tahun 2045, pada satu abad Indonesia merdeka, mestinya, Insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan menurut hitung-hitungan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan. Itulah target kita. Target kita bersama,” katanya.

Mimpi kita di tahun 2045, kata Presiden, Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD 7 triliun. Indonesia sudah masuk 5 besar ekonomi dunia dengan kemiskinan mendekati nol persen. “Kita harus menuju ke sana. Kita sudah hitung, sudah kalkulasi, target tersebut sangat masuk akal dan sangat memungkinkan untuk kita capai. Namun, semua itu tidak datang otomatis, tidak datang dengan mudah. Harus disertai kerja keras, dan kita harus kerja cepat, harus disertai kerja-kerja bangsa kita yang produktif,” papar Presiden.

“Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton,” imbuh Kepala Negara.

Menurut Presiden, berani mendobrak rutinitas yang monoton adalah satu hal tersendiri yang menjadi perhatian, selain meningkatkan produktivitas. Dia meminta pekerjaan yang dilakukan jajaran pemerintah untuk tidak lagi hanya bersifat rutinitas dan hanya berorientasi proses, tapi juga harus berorientasi pada hasil-hasil yang nyata. “Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan,” kata Presiden.

Presiden melanjutkan, seringkali birokrasi menganggap bahwa apabila program kerja sudah dijalankan dan laporan akuntabilitas telah diselesaikan, maka program tersebut dikatakan telah terlaksana. Namun, menurut Joko Widodo, proses kerja pemerintah tidak hanya sampai di sana. “Cara mengeceknya itu mudah. Lihat saja ketika kita mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada *send*, artinya telah terkirim. Ada *delivered*, artinya telah diterima. Tugas kita itu menjamin *delivered*, bukan hanya menjamin *send*,” tambah Presiden.

Maka, Presiden menegaskan, tugas birokrasi kini tak lagi hanya menjalankan program semata, melainkan memastikan bahwa program tersebut berjalan tanpa hambatan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. “Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya *sending-sending* saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah *making delivered*. Tugas birokrasi kita itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat,” tandas Presiden.

Selanjutnya Presiden menyampaikan lima hal prioritas untuk dikerjakan pada periode kedua pemerintahannya. Jokowi ingin membangun sumber daya manusia (SDM)



Indonesia yang unggul. “Pertama, pembangunan SDM akan menjadi prioritas utama kita, membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan kita,” katanya.

Pada periode kedua, Presiden juga tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ini diperlukan untuk menggenjot perekonomian Indonesia. “Kedua, pembangunan infrastruktur akan kita lanjutkan. Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian

rakyat,” ujarnya.

Selain itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan regulasi. Ada dua undang-undang besar yang diinginkan untuk segera terbit. “Ketiga, segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM,” tutur dia.

Poin lain yang menjadi sorotan Jokowi adalah penyederhanaan birokrasi. Jokowi mewanti-wanti para pejabat untuk bekerja dengan baik demi tercapainya pembangunan Indonesia. “Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” ujar dia.

Poin terakhir yang disampaikan Jokowi untuk dilakukan pada periode kedua adalah transformasi ekonomi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin bangsa Indonesia tak hanya mengandalkan sumber daya alam. “Pada akhirnya, yang kelima adalah transformasi ekonomi. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar dia.

Di bagian akhir pidatonya, Presiden menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Muhammad Jusuf Kalla yang telah bahu-membahu menjalankan pemerintahan selama 5 tahun terakhir. Dalam bahasa Bugis, Presiden menutup pidatonya,

*“Pura babbara’ sompekku...  
Pura tangkisi’ golikku...”  
“Layarku sudah terkembang...  
Kemudiku sudah terpasang...”*

*Kita bersama  
Menuju Indonesia maju!!!*



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**Lestari Moerdijat** Wakil Ketua MPR RI

## Perlu Pemerataan Pembangunan Nasional Secara Adil

*Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sudah mengucapkan sumpah di depan Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Ahad, 20 Oktober 2019 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Keduanya juga sudah menandatangani Berita Acara Pelantikan. Dengan demikian Ir. H. Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sah memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI masa bakti 2019 – 2024.*

*Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 – 2024 dihadiri sekitar 1.100 undangan. Di antara tamu undangan hadir Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil Presiden Hamzah Haz dan Boediono, dan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2019 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, serta tokoh nasional lainnya, dan tamu kehormatan negara sahabat. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden*

*2019 – 2024 berjalan lancar, aman, tertib, dan khidmat.*

*Majelis meminta tanggapan Pimpinan MPR seputar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Berikut wawancara Majelis dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Nasdem, Lestari Moerdijat, mengenai tantangan ke depan yang dihadapi dan program jangka pendek Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Petikannya.*

**Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019 – 2024 telah berjalan lancar, aman, tertib, dan khidmat. Apa tanggapan Ibu terhadap jalannya sidang pelantikan presiden dan wakil presiden ini, yang dihadiri sejumlah tokoh nasional dan tamu kehormatan negara-negara sahabat?**

Tentunya, kita sangat bersyukur Sidang Paripurna MPR Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada hari Ahad, 20 Oktober 2019,

kemarin berjalan lancar, aman, tertib, serta khidmat. Dengan sidang paripurna itu maka Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin telah sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk masa jabatan 2019 – 2024. Pelantikan ini dihadiri tokoh nasional dan juga tamu kehormatan dari negara sahabat.

Saya kira kehadiran para tokoh nasional dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini sangat baik dan bagus. Kehadiran mereka bisa menepis segala macam isu yang tidak benar, terutama seputar kebekuan politik yang terjadi. Kehadiran para tokoh bangsa ini juga bisa menjadi teladan buat masyarakat luas di Tanah Air bahwa dalam berdemokrasi itu kontestasi adalah hal yang biasa. Yang penting bagi kita adalah bagaimana tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

**Dengan telah dilantiknyanya Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin dan sah sebagai Presiden dan Wakil Presiden, apa yang menjadi harapan Ibu?**

Harapan-harapan tentu ada, dan tentuju

pada Jokowi sebagai Presiden baru kita. Sebenarnya, beliau meneruskan periode kedua jabatan sebagai Presiden. Jadi, semestinya tidak ada masalah karena beliau sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai presiden pada periode pertama. Beliau hanya melanjutkan kewajiban dan tanggung jawab itu.

Perubahan hanya pada Wakil Presiden dan susunan kabinetnya saja. Walaupun nanti dalam susunan kabinet ada wajah lama dan baru, tetapi penentuan kabinet dan orang-orang yang akan membantunya merupakan hak prerogatif Presiden.

Untuk Bapak Jokowi, tentu kita berharap

dalam wadah NKRI.

Namun, beliau juga tidak bisa bekerja sendiri. Kebijakan yang beliau putuskan harus bisa ditangkap dan diimplementasikan oleh para pembantunya, yaitu para menteri kabinetnya. Ini menjadi penting. Karena itu, jajaran kabinet nanti harus diisi oleh orang-orang yang bisa mencari solusi di setiap situasi, bukan hanya dilihat dari sisi keahlian atau expertise saja, tetapi juga harus seiring dan sejalan dengan kondisi dan dinamika politik yang ada.

Pembangunan nasional itu sendiri harus memberdayakan masyarakat dan didasari kesiapan masyarakat. Inilah yang harus

### **Menurut Ibu, apa tantangan yang dihadapi presiden dan wakil presiden yang baru dilantik?**

Negara sebesar Indonesia pasti memiliki tantangan ke depan yang tidak ringan. Seperti sudah saya katakan, Presiden dan Wakil Presiden 2019 – 2024 ini harus menyadari, mewaspada, dan mencari solusi terbaik terhadap isu-isu seperti potensi disintegrasi bangsa. Beberapa kejadian belakangan ini berpotensi mengarah ke situ (disintegrasi bangsa), misalnya masalah di Papua. Menurut saya, penanganan masalah seperti itu harus cepat dan tepat, jangan sampai berlarut-larut.



dalam periode kedua ini beliau meneruskan pembangunan yang selama lima tahun kemarin sudah membangun pondasinya. Dalam periode lalu, beliau sudah mengambil keputusan-keputusan besar yang bersifat sangat fundamental dan strategis. Keputusan itu pun sudah diimplementasikan. Sekarang tinggal bagaimana melanjutkan apa yang sudah diputuskan dan diimplementasikan.

Tentu saja masih ada beberapa permasalahan pada periode lalu, seperti soal isu potensi terjadinya disintegrasi bangsa, soal konflik SARA di beberapa daerah di Indonesia. Konflik bernuansa SARA itu bisa menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Masalah ini harus menjadi pemikiran beliau pada periode kedua ini untuk dicarikan solusinya dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa

dibangun, melibatkan semua elemen, harus terkoordinasi dan sama-sama berperan dalam mewujudkan perubahan pembangunan nasional ke arah yang lebih baik.

### **Dengan pelantikan presiden dan wakil presiden ini maka kontestasi pun sudah selesai. Bagaimana selanjutnya? Apakah presiden dan wakil presiden perlu mengajak atau memasukkan pihak di luar koalisi pemerintah?**

Kontestasi politik itu adalah bagian dari demokrasi. Menurut saya, presiden perlu mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Jokowi dan K.H. Ma'ruf Amin sudah diberi amanah sebagai presiden dan wakil presiden, tentu harus mengajak persatuan. Ajakan itu adalah sesuatu yang baik. Kita semua ingin seperti itu, menjaga persatuan dan kesatuan.

Selain itu, pembangunan nasional yang akan dijalankan presiden dan wakil presiden baru juga perlu difokuskan, terutama dalam hal penyebaran pembangunan secara adil sesuai dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Bagaimana menurut Ibu pembentukan kabinet mendatang?**

Soal kabinet itu menjadi ranahnya presiden. Beliau pasti tahu mana yang terbaik. Kita berharap kabinet harus mampu membantu presiden memecahkan berbagai tantangan dan persoalan bangsa Indonesia. Keahlian memang diperlukan tapi di samping itu perlu juga dilihat dari sisi kenegarawanan dan karakter kebangsaan. Para pembantu presiden harus memiliki kenegarawanan dan karakter kebangsaan yang kuat sejalan dengan keahlian dan kapabilitas mereka. □

Bertemu Presiden Terpilih Joko Widodo

# Pemilihan **Presiden** Langsung Tidak Akan Di amandemen



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pimpinan MPR mengajak Presiden dan Wakil Peresiden (Terpilih), Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, untuk bisa seiring sejalan dengan MPR RI menghadapi berbagai agenda ketatanegaraan.

**P**IMPINAN MPR RI mengantarkan undangan kepada Presiden Joko Widodo untuk hadir dan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia 2019-2024, bersama KH Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, pada 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB, di Gedung Nusantara, Kompleks MPR RI, Jakarta. Pimpinan MPR RI memastikan, seluruh proses persiapan menjelang pelantikan presiden - wakil presiden telah siap. Koordinasi dengan berbagai lembaga negara seperti KPU, TNI, Polri, BIN, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara juga terus dilakukan, agar pada hari pelaksanaan pelantikan bisa berjalan khidmat.

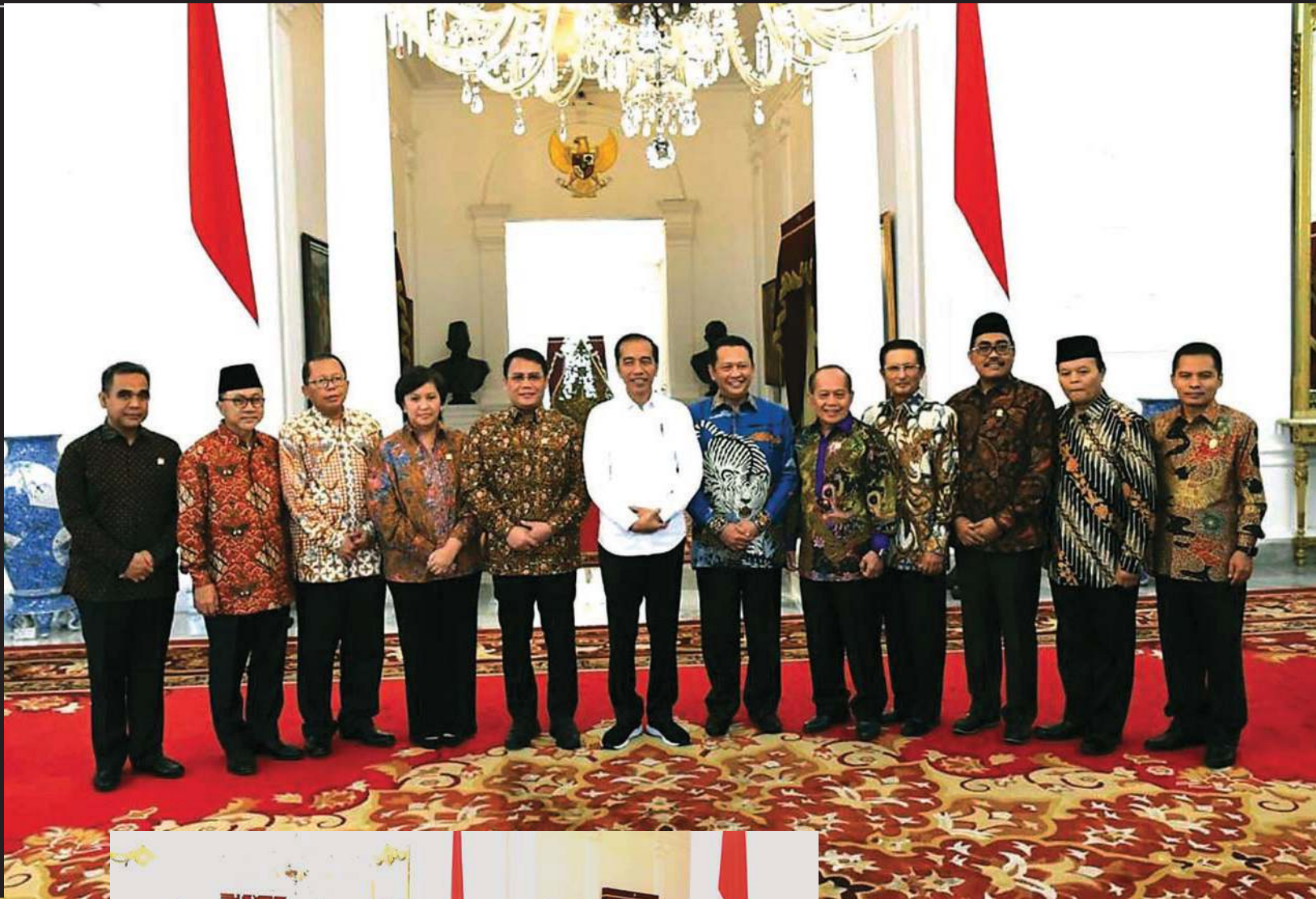
“Silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo sekaligus meminta pandangan beliau guna memastikan beberapa hal teknis lainnya. Presiden mempercayakan sepenuhnya kepada MPR RI sebagai tuan

rumah. Berbagai ikhtiar sudah dilakukan agar acara pelantikan yang merupakan gong terakhir dalam perjalanan penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa kita lalui dengan sukses. Kesuksesan pelantikan bukanlah semata buah hasil kerja MPR RI, melainkan buah dari hasil kerja Bangsa Indonesia,” ujar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai bertemu Presiden Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/10/19).

Turut hadir dalam acara itu, para Wakil Ketua MPR RI, antara lain: Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB), Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Syarif Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini juga menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo bahwa MPR RI juga telah melakukan silaturahmi sekaligus mengantarkan undangan pelantikan kepada Wakil Presiden terpilih 2019-2024 KH Maruf Amin, Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri, kandidat calon presiden - wakil presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Serta ke Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kehadiran mereka dalam pelantikan selain membawa kesejukan bagi iklim politik nasional, juga akan membawa pesan penting bahwa para elite politik selalu mengedepankan gotong royong dalam



membangun bangsa dan negara. Berbagai luka dan dinamika saat Pemilu 2019 lalu telah kita balut bersama, sehingga masyarakat di akar rumput tak lagi dihadapkan pada potensi perpecahan,” tandas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, usai dilantik dan resmi memimpin Indonesia selama lima tahun ke

depan, MPR RI mengajak Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin bisa seiring sejalan dengan MPR RI dalam menghadapi berbagai agenda ketatanegaraan. Khususnya terkait dengan rencana amandemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana direkomendasikan oleh MPR RI periode 2014-2019.

“Saya tegaskan, amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 tidak membahas pemilihan presiden. Pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung. Tidak dikembalikan ke MPR RI. Tidak ada pertanggungjawaban presiden ke MPR. Cukup Ibu Megawati Soekarnoputri yang menjadi Mandataris MPR RI terakhir tahun 2002,” tegas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum KADIN ini memastikan, amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 tidak akan menjadi bola liar. Dipastikan pula masa jabatan presiden tetap lima tahun dan maksimal dua periode.

“Amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 hanya akan membahas masalah ekonomi dan pembangunan. Kita tidak akan membiarkan menjadi bola liar. Sekali lagi saya tegaskan tidak ada amandemen terkait pemilihan presiden secara langsung,” pungkas Bamsuet. □

Bertemu Megawati Soekarnoputri

# Sempat Bahas Soal Amandemen Terbatas UUD

Megawati Soekarnoputri adalah tokoh bangsa pertama disambangi Pimpinan MPR RI, dalam rangka penyampaian undangan Pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo beserta delapan Wakil Ketua MPR, yaitu: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, melakukan kunjungan silaturahmi ke kediaman Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, di Jl. Teuku Umar No. 27 A Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).

Ini merupakan kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 kepada para tokoh bangsa, dalam rangka silaturahmi

sekaligus menyampaikan undangan pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.

Selain Megawati beberapa tokoh lain yang dikunjungi Pimpinan MPR dalam rangka menyampaikan undangan, antara lain: Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno, Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden terpilih KH. Ma'ruf Amin.

Ahmad Basarah, salah satu Pimpinan MPR

yang juga politisi PDI Perjuangan tiba lebih dulu di kediaman Megawati Soekarnoputri. Menyusul kemudian, berturut-turut Fadel Muhammad (pimpinan MPR mewakili Kelompok DPD), Syarief Hasan (Fraksi Partai Demokrat), dan di belakangnya Zulkifli Hasan (Fraksi PAN). Setelah itu, tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo yang datang hampir bersamaan dengan Jazilul Fawaid (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa). Sedangkan Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) tiba





belakangan atau beberapa saat sebelum pertemuan dimulai.

Usai pertemuan, kepada awak media, Bambang Soesatyo mengatakan, pertemuan silaturahmi ini sekaligus digunakan untuk menyampaikan undangan kepada Ibu Mega agar bisa hadir pada pelantikan Presiden pada Ahad, 20 Oktober 2019. Pada kesempatan itu, Pimpinan MPR juga meminta pandangan Megawati terkait pelaksanaan konstitusi, sesuai pengalamannya sebagai Presiden ke-5 Indonesia. "Ini penting karena MPR berencana melaksanakan amandemen terbatas terhadap konstitusi, khususnya menyangkut ekonomi dan pembangunan," ungkap Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo.

Jadi, lanjut Bamsuet, MPR membutuhkan *blue print* rencana pembangunan Indonesia 50 tahun ke depan. Dan, itu akan menjadi *guidence* pelaksanaan pembangunan, dan harus dilakukan oleh siapapun yang memerintah.

Saat ini, kata Bamsuet, MPR membuka diri kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI



Tahun 1945). Amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 ini penting, agar keberlangsungan pembangunan bisa terus berjalan, meski pemerintahannya berganti.

"Seluruh visi misi kampanye, mulai dari presiden hingga pemerintah daerah, harus sejalan dengan 50 tahun perencanaan pembangunan Indonesia, agar hasil-hasil pembangunan bisa dicapai dengan cepat," kata Bamsuet.

Selaku tuan rumah, Megawati menyambut hangat kehadiran Pimpinan MPR di ke-

diamannya. Diskusi yang berjalan sekitar 90 menit itu, menurut Mega, berlangsung secara rileks dan terbuka. Pada kesempatan tersebut Mega menghargai proses pemilihan Ketua MPR yang berlangsung secara musyawarah dan mufakat.

"Di MPR pemilihan ketua harus berjalan secara musyawarah mufakat, kolektif kolegial. Karena kalau melalui voting berarti bukan Majelis Permusyawaratan Rakyat namanya, dan itu bukan Indonesia," katanya. □

MBO

Bertemu Susilo Bambang Yudhoyono

# Jangan Padamkan Gagasan Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Pimpinan MPR beranjang sana ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Rabu malam (16/10/2019). Selain memastikan kehadirannya dalam acara Pelantikan Presiden RI, SBY juga menyampaikan pesan soal amandemen UUD NRI Tahun 1945.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) mengapresiasi respon hangat dan antusiasme Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menerima undangan resmi dari Pimpinan MPR RI untuk hadir pada Sidang Paripurna MPR RI dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 di MPR.

Undangan disampaikan oleh Bamsot yang mendatangi langsung ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu malam (16/10/2019). Bersama Ketua MPR RI juga ikut serta para Wakil Ketua MPR, yakni: Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.

Usai pertemuan, Bamsot menjelaskan bahwa SBY menyatakan kesediaannya untuk hadir pada acara pelantikan tersebut. "Hal ini menjadi sebuah pesan kepada dunia bahwa momen kehadiran berbagai elemen masyarakat dan para tokoh bangsa dalam acara pelantikan ini menunjukkan suhu politik di Indonesia sangat kondusif dan para pemimpinnya kompak," ujar Bamsot.







Pernyataan dan pesan dari SBY yang merupakan tokoh bangsa, menurut Bamsoet, harus mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Sebab, bangsa Indonesia saat ini tidak lagi banyak memiliki Bapak dan Ibu Bangsa. SBY merupakan salah satu mantan Presiden RI yang sekarang menjadi tokoh bangsa, selain Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ibu Bangsa.

“Kedua tokoh bangsa tersebut adalah aset bangsa, guru bangsa, yang kita sama-sama teladani. Kehadiran beliau-beliau (SBY

dan Megawati Soekarnoputri) akan memberikan keteduhan bagi perpolitikan Indonesia, dan sekaligus memberi pesan dan kesan yang baik buat kepemimpinan Bapak Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin dalam lima tahun ke depan,” imbuhnya.

Selain menyampaikan undangan, pertemuan antara Pimpinan MPR dan SBY malam itu juga membahas tentang Rekomendasi MPR periode 2014-2019. Dalam kesempatan itu, SBY berpesan, jika ada gagasan, pemikiran, dan aspirasi tentang rencana Perubahan UUD NRI Tahun 1945,

khususnya gagasan menghadirkan kembali haluan negara model GBHN hendaknya jangan dipadamkan. “MPR harus menampung semua masukan dan gagasan itu,” katanya.

Intinya, SBY menginginkan agar MPR memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan tentang berbagai hal menyangkut perkembangan bangsa, termasuk perlu tidaknya melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. □

DER

Bertemu Prabowo Subianto

# Prabowo Subianto Bilang: “Bersatu Itu Keren”

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan respon sangat luar biasa ketika menerima undangan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 yang disampaikan langsung oleh Pimpinan MPR.

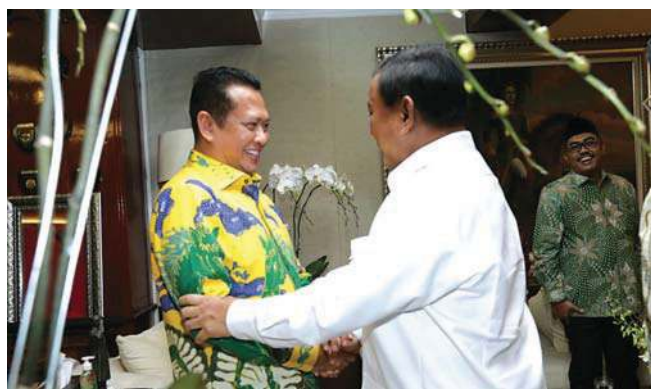


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**ENERIMA undangan resmi yang disampaikan langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsot) untuk hadir dalam Sidang Paripurna MPR dengan agenda Pelantikan Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019, di MPR RI Jakarta, Letnan Jenderal (Purn.) H. Prabowo Subianto Djohadikusumo memberikan respon sangat antusias.

Jumat malam (11/10/2019), Ketua MPR Bamsot bersama para Wakil Ketua MPR:

Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menyerahkan undangan itu kepada Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta.

“Malam ini kami sengaja datang berkunjung ke tempat seorang tokoh bangsa yang juga seorang kandidat presiden dan ketua umum partai nomer dua terbesar dalam perolehan suara rakyat, Bapak Prabowo Subianto,

untuk menyampaikan undangan acara Pelantikan Presiden dan Wapres RI pada 20 Oktober 2019. Dan, respon beliau sangat luar biasa. Beliau mengatakan, walaupun tidak diundang dia akan hadir,” ujar Bamsot dalam keterangannya usai pertemuan itu.

Bamsot menjelaskan, respon Prabowo tersebut menggambarkan sikap kenegaraan seorang Prabowo yang ingin ditunjukkan kepada rakyat bahwa persatuan lebih diutamakan. “Bersatu itu keren, kata beliau,” tambah Bamsot.





Prabowo Subianto adalah tokoh bangsa yang kedua dikunjungi oleh Pimpinan MPR dalam rangka silaturahmi dan sekaligus penyampaian undangan Pelantikan Presiden setelah kunjungan pertama ke kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan dengan para tokoh bangsa ini, menurut Bamsuet, banyak hal didiskusikan, terutama mengenai kebangsaan dan kenegaraan.

Prabowo dalam diskusi tersebut menyampaikan bahwa elemen-elemen bangsa, baik itu partai politik maupun DPR dan Kelompok DPD, harus membangun sinergi satu sama lain. Sinergitas juga harus dibangun untuk semua elemen bangsa, dengan satu tujuan, yaitu bersama-sama menjaga nilai-nilai persatuan dan membangun bangsa ini ke depan.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini selanjutnya mengungkapkan bahwa dalam diskusi tersebut Prabowo juga berharap agar elemen-elemen bangsa mampu mem-



berikan contoh bahwa ada saatnya berkontestasi dan ada pula saatnya bersatu untuk kepentingan yang lebih luas lagi, yakni kepentingan bangsa dan negara.

Sementara Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut menyatakan apresiasinya kepada Pimpinan MPR yang telah mengundang dia secara resmi untuk

menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wapres RI pada 20 Oktober 2019. "Terima kasih untuk Pimpinan MPR RI, saya merasa sangat dihormati. Saya tegaskan, saya akan hadir dan ini wajib bagi saya sebagai warga negara untuk menghormati sistem politik dan konstitusi negara kita," ujarnya. □

DER

Bertemu Jusuf Kalla, Wakil Presiden

# “Adalah Kewajiban Menyaksikan Pelantikan Pengganti Saya”

Menurut Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Presiden Jusuf Kalla selama ini ternyata mengamati dengan cermat konstitusi dan tata negara. Perlu dipikirkan ke depan, hubungan antarlembaga Negara.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR Bambang Soesatyo didampingi para Wakil Ketua MPR yakni: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono pada pukul 08.00 WIB, 17 Oktober 2019, mendatangi kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), di Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta.

Kehadiran pimpinan MPR ke rumah dinas

Wakil Presiden itu dalam rangka menghaturkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024, di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, pada 20 Oktober 2019, pukul 14.30.

Usai pertemuan, kepada pers, Bambang Soesatyo mengatakan: “Pagi hari ini kita ngobrol asyik dengan Pak JK. Kalau tidak diingatkan ngobrolnya bisa sampai siang”, ujar pria yang akrab disapa Bamsuet itu

sambil tersenyum.

Selanjutnya, Bamsuet menjelaskan, kehadiran Pimpinan MPR di rumah dinas Wakil Presiden adalah untuk mengharap kehadiran Pak JK dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2019. “Kami menyampaikan undangan secara formal kepada Pak JK”, ujar mantan Sekretaris Jenderal PB HMI itu.

Lebih lanjut Bamsuet mengatakan, dalam pertemuan itu, pimpinan MPR bersama Pak





JK berbicara panjang lebar mengenai konstitusi. “Kita mendapat masukan bahwa yang perlu dipikirkan ke depan adalah hubungan antarlembaga negara”, ungkapnya. Bamsoet berterima kasih, sebab Pak JK selama ini mengamati dengan cermat konstitusi dan tata negara yang menyatakan tidak ada lembaga tertinggi dan tinggi negara. “Jadi semua sama sebagai lembaga negara”, paparnya. Bamsoet menyatakan, yang menjadi pertanyaan Pak JK adalah sekarang siapa mengawasi siapa. Pertanyaan itu, menurut Bamsoet, perlu kita pelajari untuk

bagaimana mendudukan atau kedudukan MPR di antara lembaga negara lainnya.

Menurut Bamsoet, dalam pertemuan itu, Pak JK menyarankan MPR tetap terbuka kepada aspirasi publik yang berkembang di tengah masyarakat atas rekomendasi MPR Periode 2014-2019 tentang amandemen UUD secara terbatas, dan tentang keinginan menghidupkan kembali haluan negara ala GBHN. “Jadi memang kami membuka diri terhadap aspirasi publik”, tutur Bamsoet.

Dalam kesempatan yang sama, di hadapan para wartawan, Jusuf Kalla menyam-

paikan terima kasih atas undangan dari MPR untuk menghadiri Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. “Tentu acara ini bagi saya penting, karena di samping menyaksikan Presiden dan Wakil Presiden baru juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama dengan Parlemen selama lima tahun terakhir”, ujarnya.

“Insha Allah saya hadir dalam acara itu dan memang kewajiban saya untuk menyaksikan pelantikan pengganti saya”, tambahnya. □

AWG

Bertemu Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Terpilih

# Kehadiran Ma'ruf Amin Diharapkan Membawa Kesejukan

Ketika Pimpinan MPR melakukan silaturahmi dengan Wakil Presiden terpilih, Ma'ruf Amin, ada harapan besar terpancar di sana. Sang Kiai diharapkan mampu membantu Presiden Joko Widodo dalam membangun ekonomi syariah, sesuai keahlian beliau.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**M**ENJELANG pukul 19.00 WIB, 15 Oktober 2019, satu persatu Pimpinan MPR tiba di rumah kediaman Wakil Presiden terpilih Pemilu Presiden 2019, Ma'ruf Amin, di kawasan Menteng, Jakarta. Mereka yang datang bersilaturahmi itu adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo, bersama para Wakil Ketua MPR: Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Selepas pertemuan tertutup antara Pimpinan MPR dan Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan kepada pers bahwa kedatangan Pimpinan MPR ke kediaman Ma'ruf Amin adalah untuk menyampaikan undangan dan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 di Gedung Nusantara, Kompleks Gedung

MPR/DPR/DPD, Jakarta, pukul 14.30 WIB.

“Bapak Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan terima kasih karena Pimpinan MPR datang langsung mengantar undangan, dan Pak Ma'ruf Amin memberikan apresiasi

kepada Pimpinan MPR”, ujar Bambang Soesatyo, seraya mengatakan: “Kami menyampaikan kepada beliau memang inilah tradisi MPR dari waktu ke waktu.”

Selanjutnya Bamsuet mengungkapkan,





dalam pertemuan itu juga mendiskusikan mengenai masalah ekonomi. Pimpinan MPR berharap Ma'ruf Amin bisa membuat suasana perpolitikan semakin teduh dan adem. Pimpinan MPR bersyukur Indonesia dikarunia anugerah yang luar biasa, "Presiden dari kalangan nasionalis dan Wakil Presiden dari kalangan umat Islam", ujarnya. Dari sinilah diharapkan akan membawa kesejukan bagi perjalanan sejarah Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Pimpinan MPR juga berharap Ma'ruf Amin mampu menggantikan posisi Pak Jusuf Kalla untuk membantu Presiden Joko Widodo dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan dengan keahlian beliau dalam ekonomi syariah.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf Amin menyampaikan ucapan terima kasih karena Pimpinan MPR langsung mengundang semua pihak dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, calon Presiden dan Wakil Presiden, serta mantan Presiden. Dia mengakui, ada harapan besar yang diamanatkan pada dirinya untuk bisa mendampingi Presiden Joko Widodo dalam membangun keutuhan



bangsa dan menyatukan seluruh potensi yang ada.

"Setelah melihat langkah yang dilakukan oleh MPR yang justru sudah membuka harapan itu sehingga memudahkan langkah berikutnya", ujarnya. MPR telah melakukan komunikasi dan silaturahmi politik. Ini tradisi yang positif.

Ma'ruf Amin menyebut, langkah MPR itu pertanda bangsa ini mempunyai keinginan besar untuk membangun keutuhan bangsa. "Silaturahmi politik sudah dimulai MPR", ujarnya. Dan, dia berharap, tradisi ini diteruskan dalam rangka membangun bangsa ke depan. □

AWG

Bertemu Sandiaga Salahuddin Uno

# “Kontestasi Sudah Selesai, Saatnya Bersatu”

Kehadiran Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden memberikan pesan positif bagi dunia internasional. Karena, itu menunjukkan indikasi politik Indonesia stabil.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR RI lainnya bersilaturahmi dengan calon Wakil Presiden 2019-2024, Sandiaga Salahuddin Uno. Selain mengantarkan undangan pelantikan Presiden-Wakil Presiden 2019-2024, pimpinan MPR RI juga bertukar pikiran terkait masalah kebangsaan.

“Di usianya yang relatif masih muda, Mas Sandiaga sudah tampil membawa penyegaran politik dengan maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto. Ini membanggakan, karena membuktikan bahwa kontestasi kepemimpinan nasional bukan hanya milik para senior. Siapapun dengan latar belakang apapun bisa maju. Mas Sandiaga ini Cawapres paling milenial,” ujar Bamsoet usai bersilaturahmi dengan Sandiaga, di Jakarta, Senin (14/10/19).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain: Ahmad Muzani (F-Gerindra), Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Jazilul Fawaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PPS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini

menyampaikan, baik Prabowo Subianto maupun Sandiaga Uno akan meluangkan waktu menghadiri pelantikan presiden - wakil presiden pada 20 Oktober 2019 di Kompleks MPR RI. Ini membuktikan kebesaran hati keduanya bahwa usai Pemilu 2019 semua pihak harus kembali mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bukan lagi mengedepankan persaingan politik semata.

“Kehadiran Pak Prabowo Subianto dan Mas Sandiaga dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden akan

memberikan pesan yang positif bagi dunia internasional bahwa politik Indonesia stabil. Kemarin berkontestasi dan sekarang saatnya kita bersatu,” tegas Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.

Bamsoet juga memberikan apresiasi terhadap sikap politik yang dijalankan Prabowo Subianto melalui sejumlah pertemuan dengan ketua partai politik. “Tadi malam menemui dan berkomunikasi politik dengan Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Malam ini bertemu Cak Imin sebagai Ketum PKB, dan besok dengan Airlangga, Ketum







Partai Golkar,” ungkap Bamsoet, Senin (14/10/2019).

Dia meyakini, langkah yang ditempuh oleh Prabowo Subianto itu adalah langkah yang baik untuk cuaca dan iklim politik kita ke depan. “Harapan kami tentu dengan iklim yang sudah baik ini, saatnya bersatu membangun bangsa ini,” katanya.

Sementara itu, kandidat Cawapres Pemilu 2019, Sandiaga Uno mengaku, sangat tersanjung dan terhormat karena ketua MPR dan pimpinan MPR lainnya datang secara langsung menyampaikan undangan untuk acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Sandiaga berjanji akan hadir dalam acara pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut.

“Ini merupakan budaya yang perlu dilestarikan dalam era kemajuan teknologi. Biasanya undangan dikirim melalui email atau gojek, tapi ini Ketua MPR yang mengantar undangan langsung. Terimakasih Mas



Bamsoet, saya sangat tersanjung, dan Insya Allah saya hadir,” kata Sandiaga.

Sandiaga menegaskan, memenuhi undangan itu menjadi kewajiban dan tugas sebagai warga negara. Apalagi dirinya merupakan peserta kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2019. “Kehadiran kami

mengirimkan pesan kepada masyarakat internasional dan juga masyarakat seluruh Indonesia bahwa kontestasi sudah selesai. Kita sekarang menatap lima tahun pembangunan Indonesia. Kita dalam satu bingkai NKRI,” pungkas Sandiaga. □

BSC

Rakor Jelang Pelantikan Presiden/Wakil Presiden

# Ketua MPR: Situasi Keamanan Sangat Kondusif

Masalah keamanan menjadi isu yang sensitif jelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Terlebih setelah terjadinya penusukan terhadap Menkopolhukam dan maraknya aksi demonstrasi mahasiswa.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo memimpin Rapat Koordinasi MPR dengan Pimpinan DPR, DPD, Panglima TNI, Kaplori dan Komisi Pemilihan Umum. Rapat Koordinasi itu diselenggarakan dalam rangka persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2019. Pertemuan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks

Parlemen Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Sebelum pertemuan dimulai tampak sejumlah ajudan Panglima TNI dan Kaplori siap siaga di dalam ruang pertemuan. Mereka menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, khususnya terkait bahan tayangan. Pengamanan juga terasa ketat, maklum pertemuan itu berlangsung setelah sebelumnya terjadi peristiwa penusukan terhadap Menkopolhukam, Wiranto. Selain itu, kondisi

lain yang tentunya harus diantisipasi, termasuk ancaman demo mahasiswa yang menuntut agar Presiden mengeluarkan Perppu pembatalan UU KPK dan menolak disahkannya RUU KUHP.

Usai pertemuan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama Ketua DPR Puan Maharani, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kaplori Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal Polisi





(Purn) Budi Gunawan memberikan keterangan kepada pers. Pada kesempatan itu, Bamsuet mengajak seluruh warga masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk bahu-membahu, bergotong-royong, dan bekerja sama untuk menyukseskan acara pelantikan presiden dan wakil presiden, yang akan diselenggarakan pada Ahad (20/10/2019).

“Prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden harus berlangsung tertib, aman, dan khidmat. Karena keberhasilan acara ini akan menjadi pesan damai dari Indonesia untuk dunia. Karena itu, saya mengajak semua elemen masyarakat untuk secara bersama-sama dan saling bahu-membahu menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden,” kata Bamsuet.

Menurut penjelasan Panglima TNI dan Kapolri, masih kata Ketua MPR, situasi keamanan sangat kondusif. Semua potensi keributan yang mungkin terjadi jelang pelantikan presiden bisa diatasi dan diantisipasi dengan baik oleh aparat keamanan. Bahkan, aparat keamanan menjamin keselamatan presiden dan wakil presiden, mulai dari rumah menuju ke MPR hingga kembali ke rumah masing-masing. Semua sudah diantisipasi secara penuh oleh Poli.

Selain presiden dan wakil presiden, menurut Bamsuet, aparat berwenang juga menjamin keselamatan anggota MPR

yang akan hadir pada acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Demikian pula keamanan tamu-tamu negara, sejak datang dan menginap di hotel, pengamanan serta pengawasan terhadap mereka sudah disiapkan dengan baik.

Menurut Bamsuet, ada dua kepala negara, empat kepala pemerintahan, sembilan utusan negara, dan 147 perwakilan negara akan datang menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden. “Aparatur berwenang akan menjamin keselamatan mereka, sejak menginjakkan kaki di Bandara, menginap di hotel, tiba di Senayan, hingga mereka kembali ke negara masing-masing. Semua sudah ada protapnya dan akan dilaksanakan dengan baik,” kata Bambang Soesatyo.

Harapan serupa juga disampaikan Ketua

DPR, Puan Maharani. Puan berharap, pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pilpres 2019 bisa berjalan dengan tertib, sakral, aman, dan khidmat. Karena itu, ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama, bahu-membahu, dan bergotong-royong menyukseskan pelantikan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan KH. Ma’ruf Amin. Ini penting, sebagai bukti penghargaan kepada presiden dan wakil presiden.

“Sebagai warga satu bangsa, kita harus terbiasa kerjasama dan gotong-royong, termasuk untuk membangun Indonesia. Ke depan, kami juga akan bekerjasama dengan eksekutif agar masyarakat lebih sejahtera,” ujar Puan. □

MBO



Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta

# Gladi Bersih Pelantikan Presiden 2019-2024



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR Bambang Soesatyo bersama para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, dan Arsul Sani, Sabtu (19/10/2019), sekitar pukul 14.15 WIB, tiba di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Menjelang sore itu, Pimpinan MPR sengaja datang ke Gedung Bundar untuk menyaksikan Gladi Bersih Pelantikan Presiden dan

Wakil Presiden Periode 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang diagendakan esok hari, Ahad (20/10/2019).

Secara seksama pimpinan MPR mengikuti jalannya gladi bersih, sejak prosesi kedatangan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024 di Ruang Sidang Paripurna MPR hingga mereka meninggalkan kembali gedung tersebut.

Saat konferensi pers, Bambang Soesatyo

mengatakan, setelah mengikuti gladi bersih untuk persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, kami yakin persiapan sudah rampung, tinggal pelaksanaan saja. "Mohon didoakan agar pelaksanaan pelantikan berjalan lancar, tertib, dan sesuai harapan kita, yakni berlangsung dengan hikmat," harap Bamsuet.

Bamsuet memperkirakan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden memakan





waktu kurang lebih satu jam. Prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ini selain dihadiri oleh seluruh anggota MPR, juga disaksikan 17 kepala negara dan pemerintahan, seperti Sultan Brunei, Perdana Menteri Malaysia, Singapura, Australia, dan Wakil Presiden Cina. Selain itu, hadir pula 168 duta besar negara-negara sahabat.

Juga para mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta tokoh-tokoh bangsa lainnya juga telah menyatakan kesediaannya untuk hadir. Mereka antara lain: Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ke-lima Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-enam Susilo Bambang Yudhoyono, mantan Wakil

Presiden Hamzah Has dan Budiono, calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Sandiaga Uno.

Pada kesempatan itu, Pimpinan MPR juga menyampaikan harapannya kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Pimpinan MPR berharap, agar dapat mempertahankan capaian yang sudah diraih oleh Presiden Joko Widodo pada periode sebelumnya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. "Capaian yang telah diraih oleh Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla hendaknya bisa ditindaklanjuti oleh pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Saya yakin dan percaya Joko Widodo dan Ma'ruf Amin bisa

melanjutkan apa yang sudah dicapai periode sebelumnya", ucapnya.

Mengingat tantangan ke depan tidak ringan maka semua harus kompak menghadapinya. "Kalau semua kompak dan bergotong royong pasti semua bisa diatasi," katanya seraya menyebut sejumlah tantangan ke depan, meliputi: tantangan ekonomi, persaingan dagang, dan kemajuan teknologi yang pesat.

Bamsuet menyebutkan, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin merupakan gabungan antara unsur nasional dan Islam, sehingga pertentangan ideologi tidak akan terjadi lagi. "Saatnya kita bersatu membangun bangsa", tegasnya. □

AWG

Rapat Perdana Pimpinan MPR

# Sepakat Mendalami dan Mengkaji Soal Amendemen

Terkait amendemen, MPR membuka ruang seluas-luasnya dan menyerap seluruh aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**P**IMPINAN MPR periode 2019 – 2024 menggelar rapat pimpinan (Rapim) perdana di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Lantai 9, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10/2019). Rapim MPR membahas tiga agenda besar, yaitu: *Pertama*, soal pembagian tugas di antara Pimpinan MPR; *Kedua*, persamaan persepsi terhadap rekomendasi atas amendemen dari MPR periode lalu; *Ketiga*, jadwal pelantikan presiden.

Rapim dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo dan diikuti para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Muzani (F-Gerindra), Lestari Moerdijat (F-Nasdem), Jazilul Fawaid (F-PKB), Syarif Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Usai Rapim, Bamsuet menjelaskan dalam rapat perdana Pimpinan MPR RI ini diputuskan pembagian tugas pimpinan MPR RI. Yakni Bambang Soesatyo (F-Golkar) sebagai Koordinator Umum; Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan) sebagai Koordinator Bidang Sosialisasi Empat Pilar MPR RI; dan Lestari Moerdijat (F-Nasdem) sebagai Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah.

“Koordinator Bidang Pengkajian Ketata-

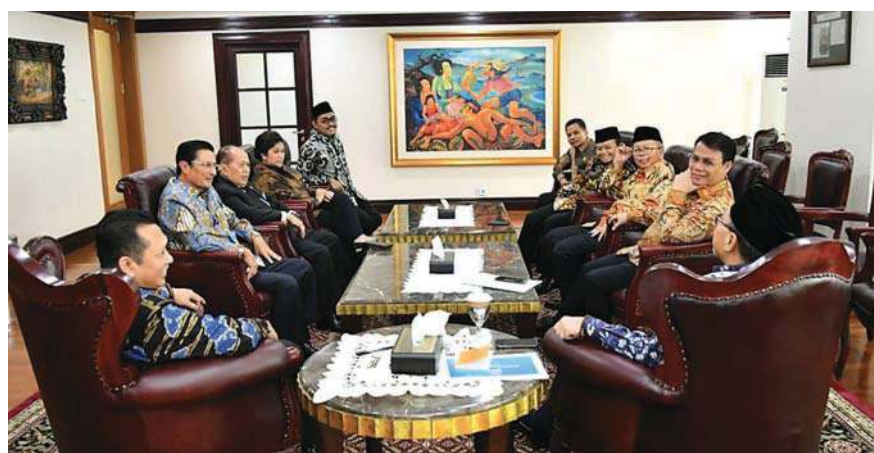
negara dipegang Syarif Hasan (F-Demokrat), Koordinator Bidang Penganggaran MPR RI dipegang Fadel Muhammad (Kelompok DPD), Koordinator Bidang Komisi Kajian Ketatanegaraan dipegang Ahmad Muzani (F-Gerindra),” papar Bamsuet.

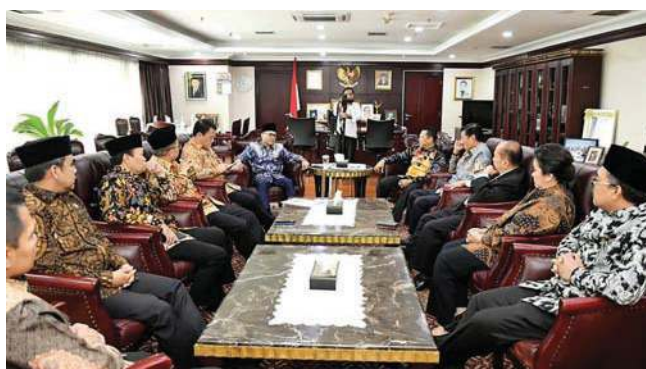
Dia menambahkan, Koordinator Bidang Persidangan MPR RI dipegang Zulkifli Hasan (F-PAN), Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara dipegang Jazilul Fawaid (F-PKB), Koordinator Bidang Evaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI dipegang Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Koordinator Bidang Akuntabilitas Kinerja MPR

RI dipegang Arsul Sani (F-PPP).

“Keputusan diambil melalui proses musyawarah untuk mufakat. Tidak ada perdebatan ataupun saling berebut jabatan. Di sini yang kita kedepankan adalah kebersamaan untuk mencari titik temu, bukan mengedepankan perbedaan,” urai Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini

Selanjutnya Bamsuet menerangkan, Rapat Pimpinan MPR RI juga menyelesaikan komposisi kepemimpinan di Alat Kelengkapan MPR RI. Antara lain, Badan Sosialisasi diketuai F-Gerindra dengan Wakil Ketua dari F-Nasdem, F-PAN, F-PKS, dan Kelompok





DPD. Di Badan Pengkajian, ketua dipegang F-PDI Perjuangan dengan Wakil Ketua dari F-Golkar, F-Demokrat, F-PPP, dan Kelompok DPD. “Sedangkan di Bidang Penganggaran, Ketua dipegang F-Golkar, dengan Wakil Ketua dari F-PDI Perjuangan, F-Gerindra, F-PKB, dan Kelompok DPD,” jelasnya.

Dalam soal rekomendasi MPR periode 2014 – 2019 terkait amendemen, Bamsoet menegaskan, Pimpinan MPR periode 2019 – 2024 akan menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2014 – 2019 melalui proses dan tahapan-tahapan yang jelas dan terukur, transparan, dan melibatkan partisipasi publik secara luas. Untuk itu, MPR membuka ruang seluas-luasnya dan menyerap seluruh aspirasi yang ada dan berkembang di masyarakat.

“Pimpinan MPR akan segera membentuk susunan pimpinan dan anggota Badan Pengkajian MPR yang telah disahkan pada

Sidang Paripurna 3 Oktober lalu. Pimpinan MPR akan menugaskan Badan Pengkajian MPR untuk menyamakan persepsi di antara fraksi-fraksi parpol dan kelompok DPD di MPR terhadap wacana amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 dan melakukan pengkajian secermat mungkin,” katanya.

“Kami sepakat akan membuka ruang sebesar-besarnya bagi berbagai aspirasi masyarakat. Kami sadar betul keputusan apapun yang kami lakukan akan berdampak dan berimplikasi luar biasa bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Sehingga kami harus cermat dan harus menyerap seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat,” tambahnya.

“Jadi dengan demikian saya ingin mengatakan bahwa kami masih membuka diri kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya terkait rekomendasi MPR pada periode lalu,”

sambungannya.

Menurut Bamsoet, Pimpinan MPR akan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 tentang Usul Perubahan Pasal-pasal UUD. “Jadi tidak terlalu tepat kalau kita seolah-olah digambarkan mengambil keputusan soal amendemen, padahal kita belum mengambil keputusan soal amendemen,” ungkap Bamsoet.

Oleh sebab itu, lanjut Bamsoet, Pimpinan MPR secepat mungkin menimba dan menggali aspirasi dari masyarakat dan publik. Itu yang disampaikan terkait dengan rekomendasi MPR periode lalu. “Kebetulan Pimpinan MPR periode lalu, ada Pak Hidayat Nur Wahir dan Zulkifli Hasan. Kita sepakat akan mengkaji dan mendalami lagi soal (amandemen) itu,” jelasnya. □

BSC

Delegasi Forum Dekan

# Menyampaikan Berbagai Masalah Kebangsaan

Akademisi dari berbagai perguruan tinggi beraudiensi dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Mereka menyampaikan banyak hal mengenai kondisi sosial politik.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**I HARI pertama sebagai Ketua MPR periode 2019-2024, Bambang Soesatyo bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Lt9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2019, menerima 15 dekan yang tergabung dalam 'Forum Dekan Ilmu-Ilmu Sosial'. Mereka antara lain berasal dari Universitas Hasanuddin, Universitas Brawijaya, Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Siliwangi, Universitas Tadulako, Universitas Bengkulu, Universitas Terbuka, dan Universitas Sumatera Utara.

Delegasi yang dipimpin Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Armien, menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini, seperti soal revisi UU KPK, RUU KUHP, gerakan mahasiswa, dan separatisme yang ada di Papua.

Menanggapi aspirasi tersebut, pria yang akrab disapa Bamsoet itu, mengatakan, apa yang disampaikan oleh para dekan sangat

penting sebagai masukan kepada MPR. "Apa yang disampaikan harus kita dengar, dan saya sampaikan kepada komisi terkait yang ada di DPR," kata mantan Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI itu. Penyampaian kepada DPR, menurut Bamsoet, merupakan mekanisme yang ada di parlemen.

Dalam masalah revisi UU KPK, menurut Bamsoet, merupakan inisiatif dari DPR. Sedang RUU KUHP merupakan inisiatif dari pemerintah. Dalam membahas masalah tersebut, menurut Bamsoet, semua pihak, stakeholder, sudah diundang untuk diminta masukan. Dalam RUU KUHP, menurut Bamsoet, ada semangat untuk memiliki undang-undang hukum pidana sendiri, sebab selama tujuh Presiden belum bisa diwujudkan. Dia mengakui, memang ada kelemahan dalam RUU KUHP sehingga hal yang demikian membuat *miss-understanding* di masyarakat. "Sosialisasinya juga kurang", ungkapnyanya. Hal itu mengakibatkan ada beberapa pasal yang dibuat lucu-lucuan.

Terhadap kelemahan, pasal-pasal yang kontras seperti mengenai kebebasan berpendapat sudah mulai disempurnakan. "Harus ada penyempurnaan", ucapnya.

Terkait revisi UU KPK, Bamsoet mengakui, sudah selesai dan bola ada di pemerintah. Mengenai apakah undang-undang yang telah direvisi itu diteruskan atau tidak, ada dua jalan yang kemungkinan bisa ditempuh, yaitu: Presiden membatalkannya dengan mengeluarkan Perppu atau judicial review di MK yang diajukan oleh masyarakat.

Bamsoet menyebut, KPK memang harus diperkuat namun harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga itu, menurut Bamsoet, harus ada yang mengawasi. "Tak boleh ada yang melemahkan KPK," tegasnya.

Terkait moralitas parlemen yang disampaikan oleh para dekan, Bamsoet mengatakan, masalah ini memang masalah yang tak habis-habisnya. "Karena parlemen adalah kumpulan dari berbagai macam golongan", ujarnya. Masalah moral dari anggota parlemen memang harus ada perbaikan, sebab kalau tidak parlemen akan diisi oleh orang-orang kaya atau berduit.

Dia mengakui, partai politik telah melakukan kaderisasi hingga 'berdarah-darah,' namun begitu kader dilepas di tengah masyarakat, mereka kalah dengan orang yang memiliki uang. Untuk itu, Bamsoet setuju dengan apa yang disampaikan para tamunya bahwa sistem demokrasi yang ada harus dievaluasi.

Mengenai gerakan mahasiswa yang terjadi beberapa belakangan ini, Bamsoet mengakui, merupakan gerakan yang murni. Untuk itu, dia menegaskan, agar penanganan terhadap demonstrasi dilakukan secara bijak.

Terkait masalah kerusuhan yang terjadi di Wamena, Jayapura, Papua, Bamsoet meyakini, ada kepentingan luar yang sangat kental untuk menekan Indonesia. Apa yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, dijadikan pemantik kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok separatis. □

AWG





## Suara Si Bung Menggelegar Memompa Semangat Para Pejuang

Bela negara tak hanya dengan memanggul senjata. Serti halnya dilakukan Sutomo. Pria yang akrab dipanggil Bung Tomo berjuang untuk mempertahankan Kota Surabaya dari serangan tentara Inggris, dengan mendirikan Radio Pemberontakan. Dari pemancar ia menggelorakan semangat perjuangan kepada rakyat untuk melawan tentara Inggris. Setiap jam siaran, masyarakat berkumpul di depan radio dan di tempat-tempat pengeras suara. Suara Si Bung bisa bikin merinding.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**J**AKARTA, 15 September 1945, tentara Inggris mendarat. Di kota yang sebelumnya bernama Batavia itu, tentara Inggris melakukan operasi pemulihan keamanan dengan tindakan melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke negerinya. Pasukan Inggris yang datang ke Indonesia dengan bendera AFNEI (*Allied Forces Netherlands East Indies*) dan bertindak atas mandat pasukan gabungan Blok Barat, Sekutu, berani melakukan hal demikian kepada Jepang, karena Negeri Matahari Terbit itu sudah menyatakan kalah perang dalam Perang Dunia II pada pertengahan Agustus 1945.

Setelah kondisi Jakarta aman dan terkendali, selanjutnya tentara Inggris melakukan hal yang sama di Surabaya. Mereka melakukan pendaratan di kota ini pada 25 Oktober 1945. Namun, kehadiran tentara Inggris itu tak sekadar membersihkan kekuasaan Jepang di Indonesia, namun secara diam-diam mereka juga mengembalikan kekuasaan Belanda ke Indonesia. NICA (Netherlands Indies Civil Administration) secara diam-diam ikut 'rombongan' AFNEI dan tentara Sekutu.

Jauh hari sebelum kedatangan AFNEI, di

saat Indonesia masih berumur 14 hari, tepatnya pada 31 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menyatakan, mulai 1 September 1945 bendera nasional, Merah - Putih, harus dikibarkan di seluruh Indonesia. Maklumat itu menimbulkan masalah dan selanjutnya memicu pertempuran yang besar antara Indonesia dengan Inggris, ketika sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan W. V. Ch. Ploegman mengabaikan kewajiban itu. Di saat hari menjelang tengah malam, tepatnya pukul 21.00, 18 September 1945, ia mengibarkan bendera Belanda, Merah-Putih-Biru, di tiang tinggi Hotel Yamato, hotel mewah yang berada di Jl. Tunjungan, Surabaya. Pada masa Belanda hotel itu disebut Hotel de Orange.

Kibaran bendera tak semestinya itu keesokan harinya memicu amarah arek-arek Suroboyo, pemuda-pemuda Surabaya. Mereka berada di sana untuk memprotes pengibaran bendera triwarna itu. Sebab, Indonesia sudah merdeka dari penjajahan negara manapun. Walikota (Residen) Surabaya, Sudirman, mendengar dan mengetahui masalah ini. Tak ingin arek-arek Suroboyo main hakim sendiri, Sudirman bersama dengan Sidik dan Hariyono masuk ke Yamato untuk bertemu dengan Ploegman. Dalam pertemuan tersebut, Sudirman

dengan tegas mengatakan agar bendera Belanda diturunkan. Namun keinginan itu rupanya tidak dituruti oleh Ploegman.

Desakan agar bendera yang tak selayaknya dikibarkan itu diturunkan menjadi memanas hingga orang Belanda itu mengeluarkan pistol. Hingga terjadilah perkelahian antara Sidik dan Ploegman. Sidik berhasil mencekik Ploegman hingga tewas, namun ia akhirnya gugur setelah tentara Belanda yang ada di sekitar ruangan menembaknya. Sedang Sudirman dan Hariyono menyelamatkan diri keluar hotel.

Dalam suasana yang kalut, beberapa arek Suroboyo masuk ke hotel untuk mencari jalan naik ke tiang tinggi di hotel itu. Setelah berhasil keluar dari hotel dengan selamat, Hariyono, kembali ke dalam hotel bersama dengan Koesno Wibowo dan arek-arek Suroboyo lainnya menuju ke tiang tinggi. Setelah berhasil naik tiang tinggi, mereka menurunkan bendera Belanda. Setelah bendera digenggaman tangan, warna biru yang ada di bendera dirobek sehingga tinggal merah-putih. Selanjutnya bendera yang berwarna merah-putih itu dinaikkan kembali sebagai tanda bendera Indonesia.

Kejadian penurunan bendera Belanda di Hotel Yamato menjadikan suasana Surabaya menjadi tegang. Aksi penurunan bendera

menjadi pemicu tentara Inggris melakukan operasi pemulihan keamanan di Surabaya.

Pada 12 Oktober 1945, Sutomo atau yang lebih akrab dipanggil Bung Tomo tiba di Surabaya dari Jakarta. Kedatangan kembali di tempat kelahirannya membawa gagasan besar, yakni mendirikan stasiun pemancar radio. Stasiun pemancar yang didirikan pastinya bukan untuk tujuan komersial, namun untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Nama stasiun pemancar radio yang didirikan itu adalah Radio Pemberontakan. Menurut seorang sejarawan, radio itu dibuat guna menciptakan solidaritas massa dan memperbesar semangat juang para pemuda.

Sebenarnya saat itu pemerintah sudah

Bung Tomo, Kepala RRI setuju-setuju saja asal apa yang dimau itu mendapat izin dari Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Surabaya Doel Arnowo dan Walikota Surabaya Sudirman.

Bung Tomo dalam aktivitasnya tak pernah kenal lelah. Setelah tiba di Surabaya, dia langsung bertemu dengan Kepala RRI, malam harinya dia mengundang arek-arek Suroboyo. Dalam pertemuan yang digelar di Jl. Biliton No. 7 itu, ia mengajak arek-arek membentuk Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI). Organisasi itu bersifat kelaskaran berani mati. Mendengar ajakan itu, mereka yang mengadakan pertemuan menyatakan sepakat dan setuju. Organisasi BPRI itu akan didukung oleh stasiun radio yang dibentuk.

*Tiger Shark* karya Peter Hodgkinson. Hiu macam itulah yang selanjutnya menjadi pengantar awal dan akhir siaran.

Saat pertama kali mengudara, Bung Tomo dengan gagah menceritakan pengalamannya saat di Jakarta. Dikatakan, "aku lupa bahwa aku sedang berada sendirian di dalam studio. Seolah-olah di hadapanku ada beribu-ribu, bahkan puluhan ribu orang yang mendengarkan pidatoku", ujarnya. Lebih lanjut dia mengatakan, seakan-akan para pendengarku itu seorang demi seorang kudekati dan kupegang bahunya, kuajak waspada, bersiap menghadapi bahaya yang menghadang. Tak dapat kulukiskan betapa gembiranya hatiku ketika aku selesai membaca. "Hampir tak kubersihkan peluh yang membasahi wajahku, kalau tidak ada



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

memiliki Radio Republik Indonesia (RRI), namun bila menggunakan RRI, keberadaannya mudah dideteksi oleh pihak lawan. Untuk itu dalam pertemuan antara Presiden Soekarno, Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin, dan Bung Tomo, perlunya dibentuk stasiun radio baru asal bukan RRI. Stasiun radio yang baru itu kelak beroperasi secara 'gelap'.

Tiba di Surabaya, Bung Tomo langsung menuju Kantor RRI yang berada di Jl. Simpang. Kepada Kepala RRI Surabaya, Si Bung menyampaikan pesan Menteri Penerangan yang intinya agar RRI membantu cita-cita Bung Tomo untuk menyampaikan pesan-pesan perjuangan. RRI diminta bantuan selama Radio Pemberontakan belum terwujud. Mendengar apa yang disampaikan

Setelah melakukan pertemuan di beberapa tempat, di surat kabar *Soeara Rakjat* yang terbit 15 Oktober 1945, ada pengumuman yang menyebut mulai hari itu Radio Pemberontak mulai *on air* alias mengudara. Radio yang masih 'menginduk' pada RRI itu mempunyai frekuensi gelombang 34 meter. Radio dipancarkan dari Jl. Mawar. Bangunan itu sebelum dijadikan kantor Radio Pemberontakan merupakan asrama *Nederland Indische Landbouws Maaschapij* (NILM), perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan.

Saat kali pertama mengudara, Bung Tomo ingin siaran dibuka dengan lagu mars. Namun keinginan itu tak terkabulkan, sebab RRI tak memiliki lagu-lagu mars. Sebagai gantinya, diputarkan lagu berirama hawai dengan judul

kawan yang memperingatkan akan hal itu," ujar Bung Tomo.

Radio itu mengudara setiap Rabu malam dan Ahad malam. Pembawa acara mengudarakan berita ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah lainnya, dan bahasa Inggris. Bahasa Inggris dikumandangkan dari radio itu sebab untuk membangun opini di dunia internasional. Untuk mengisi siaran, baik RRI maupun Radio Pemberontakan saling mendukung. Mereka saling tukar berita dan acara.

Melihat dan mendengar Radio Pemberontakan, Doel Arnowo berharap agar pemancar radio itu segera dirampungkan. Perhatian dari pemerintah pusat terhadap radio itu sangat tinggi, buktinya Menteri Pertahanan drg. Moestopo memberi bantuan

pesawat pemancar bergelombang pendek. Pemancar itu dulunya bekas milik Jepang yang dimiliki Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bantuan itu selanjutnya dimodifikasi dan dikembangkan oleh pegawai radio dan anggota BPRI seperti Hasan Basri, Ali Oerip, dan Soemadi.

Dua hari setelah kedatangan tentara Inggris di Surabaya, terjadi pertempuran antara Indonesia dengan Inggris. Pada 29 Oktober 1945, kedua negara sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Pengumuman diberlakukan gencatan senjata disiarkan oleh Presiden Soekarno lewat Radio Pemberontakan. RRI tak digunakan untuk mengudarakan berita itu sebab radio milik pemerintah itu sedang mengalami kerusakan, terbakar.

Meski terjadi gencatan senjata, namun ada tembak antara arek-arek Suroboyo, rakyat Indonesia, dengan tentara Inggris terjadi secara sporadis. Puncak bentrokan adalah terbunuhnya Komandan Tentara Inggris di Jawa Timur, Brigadir Jenderal Mallaby, pada 30 Oktober 1945, pukul 20.30 di sekitar Jembatan Merah. Kronologisnya, ketika Mallaby yang hendak melintas di Jembatan Merah bertemu dengan sekelompok milisi Indonesia. Kesalahpahaman yang terjadi membuat seorang milisi menembak jenderal itu. Ledakan granat pada mobil yang ditumpangi Mallaby memperparah kondisinya.

Kematian Mallaby membuat Inggris murka. Pengganti Mallaby, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, sampai mengeluarkan ultimatum pada 10 November 1945, milisi, tentara, dan pejuang Indonesia harus menyerahkan senjata dan menghentikan perlawanan kepada AFNEI dan NICA.

Dari sinilah Radio Pemberontakan dan pengobaran semangat dari Bung Tomo menjadi penting dalam peristiwa 10 November. Pada hari itu, Bung Tomo di depan microphone radio menganjurkan semua pemuda Surabaya, di mana pun berada, segera kembali ke Surabaya. Dalam pidatonya ia menggelorakan perlawanan kepada ultimatum Inggris. *Lihat box pidato Bung Tomo yang disiarkan radio.*

Saat Inggris menyerbu dan menduduki Surabaya, pemancar Radio Pemberontak-



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

an diselamatkan dari incaran tentara dengan cara dibawa keluar kota. Pemancar yang ada mula-mula ke Bangil. Di daerah yang sekarang masuk Kabupaten Pasuruan itu dirasa kurang aman, selanjutnya pemancar dibawa ke Jalan Glintung di Kota Malang. Di Glintung juga dirasa kurang aman hingga akhirnya dibawa ke Kedung Kandang, suatu desa di luar Malang. Di tempat inilah pemancar memancarkan siarannya.

Soal bagaimana Bung Tomo berpidato dan mengenai Radio Pemberontakan, mantan Pemimpin Redaksi *Panjebbar Semangat*, Moechtar, mengatakan, siaran radio dimulai dengan memutar lagu *Tiger Shark* (Tempo.co, 9 November 2015). Menurut pria kelahiran Pacitan, Jawa Timur, 22 Februari 1925, selepas *Tiger Shark*, suara berganti

kumandang takbir Bung Tomo, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar..." Lalu, suara berapi-api Bung Tomo bergema. Menurut Moechtar, suara lantang berpidato ala Bung Karno itu menjadi daya tarik. Banyak orang merinding mendengarkan Bung Tomo membakar semangat untuk perang melawan penjajah. "Saya saja merinding mendengarkannya," ujarnya. Lebih lanjut dia menuturkan, siaran radio yang dilakukan Bung Tomo merupakan siaran langsung, bukan dari hasil rekaman yang diputar ulang. "Isi pokoknya mengajak pemuda dan rakyat Indonesia untuk bersatu dan tidak gentar melawan penjajah," kata Moechtar.

Apa yang dikatakan oleh Moechtar itu diperkuat oleh sejarawan Rushdy Hoessein.



Menurut Rushdy, peran Bung Tomo dalam Peristiwa 10 November adalah orasi yang membakar rakyat untuk melakukan perlawanan. Di saat usianya masih muda, 25 tahun, saat itu Bung Tomo menjadi Kepala

Departemen Penerangan di organisasi Pemuda Republik Indonesia. Menurut cerita Rushdy, Bung Tomo memilih melancarkan agitasi dan propaganda lewat corong radio. Orasinya setiap hari pada pukul

setengah enam sore selalu ditunggu. “Orang menyemut di sekitar tiang-tiang peneras suara yang tersebar di berbagai sudut Surabaya”, ujar Rushdy. o

AWGI dari berbagai sumber

## Pidato Bung Tomo Membakar Semangat Rakyat yang Disiarkan Radio

*Bismillahirrohmanirrohim..  
Merdeka!!!*

*Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya.  
Kita semuanya telah mengetahui.*

*Bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua.  
Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan, menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang.*

*Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan.*

*Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih tanda bahwa kita menyerah kepada mereka*

*Saudara-saudara.*

*Di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.*

*Pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku,  
Pemuda-pemuda yang berawal dari Sulawesi,  
Pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali,  
Pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan,  
Pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera,*

*Pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini.*

*Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing.  
Dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung.*

*Telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol.  
Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana.*

*Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu saudara-saudara.*

*Dengan mendatangkan Presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini. Maka kita ini tunduk untuk memberhentikan pertempuran.*

*Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri.  
Dan setelah kuat sekarang inilah keadaannya.*

*Saudara-saudara kita semuanya.*

*Kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima*

*tantangan tentara Inggris itu,  
dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya.  
Ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia.  
Ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini.  
Dengarkanlah ini tentara Inggris.  
Ini jawaban kita.  
Ini jawaban rakyat Surabaya.  
Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian.*

*Hai tentara Inggris!*

*Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu.*

*Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu.  
Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu  
Tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan kekuatan yang ada tetapi inilah jawaban kita:*

*Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah*

*Yang dapat membikin secarik kain putih merah dan putih  
Maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah kepada siapapun juga*

*Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting!*

*Tetapi saya peringatkan sekali lagi.*

*Jangan mulai menembak,*

*Baru kalau kita ditembak,*

*Maka kita akan ganti menyerang mereka itu kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka.*

*Dan untuk kita saudara-saudara.*

*Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka.*

*Semboyan kita tetap: merdeka atau mati!*

*Dan kita yakin saudara-saudara.*

*Pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita,*

*Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar.*

*Percayalah saudara-saudara.*

*Tuhan akan melindungi kita sekalian.*

*Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!*

*Merdeka!!!*

## Bung Tomo Arek Suroboyo

Sebagai arek Suroboyo, Sutomo atau yang lebih akrab dipanggil Bung Tomo tak kenal lelah menempa diri. Di kepanduan, ia mendapat bekal ilmu yang sangat berarti untuk mengarungi kehidupan. Pernah sebagai jurnalis dan menteri dalam masa Presiden Soekarno. Sebagai manusia, pria kelahiran Kampung Blauran, pernah teledor.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**D**I TAHUN 1900-an, di Kampung Blauran, Surabaya, hiduplah pasangan Kartawan Tjiptowidjojo dan Subastita. Keluarga itu di Blauran merupakan orang yang terpendang. Berbagai pekerjaan pernah dipangku oleh Kartawan, seperti anggota polisi, pegawai pemerintahan, dan pegawai swasta. Kartawan tak hanya sibuk dalam kerja, dia juga pernah aktif di Sarekat Islam. Ia masih mempunyai pertalian darah dengan pengawal Pangeran Diponegoro. Sedang ibunya adalah perempuan yang mempunyai pertalian dengan orang Jawa Tengah, Sunda, dan Madura.

Dari pasangan itu, pada 3 Oktober 1920, lahirlah seorang anak laki-laki. Kartawan memberi nama anaknya Sutomo. Sebagai anak dari keluarga yang terpendang, Kartawan menyekolahkan Sutomo kali pertama di *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), setara SD pada masa sekarang. Selepas menimba ilmu di HIS, Sutomo melanjutkan pendidikan di MULO (*Meer*

*Uitgebreid Lager Onderwijs*), setara SMP zaman sekarang. Saat tekun sekolah di MULO, depresi melanda dunia. Hal demikian berpengaruh pada kehidupan ekonomi masyarakat. Depresi yang terjadi membuat Sutomo terpaksa keluar sekolah. Untuk membantu mengatasi masalah keluarga, Sutomo yang masih berumur 12 tahun memilih bekerja.

Namun, niat untuk menjadi orang yang pandai dan berilmu tak pupus karena keadaan. Dia ingin tetap sekolah meski dengan cara korespondensi. Untuk itulah ia masuk *Hoogere Burgerschool* (HBS) dengan cara itu. Bagi Sutomo, sekolah atau menimba ilmu tak hanya di bangku sekolah. Di kepanduan yang bernama Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dia menimba diri dengan berbagai ilmu yang diajarkan. Sutomo mengakui bahwa di kepanduan dia mendapat banyak hal. "Filsafat kepanduan, ditambah dengan kesadaran nasionalis yang saya peroleh dari KBI dan dari kakek saya,

merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formal", ujarnya.

Di KBI, Sutomo merasa benar-benar 'sekolah' dan dididik. Di kepanduan itulah talentanya muncul. Di usia 17 tahun, nama Sutomo melejit di Hindia Belanda, pasalnya, dia tercatat orang kedua sebagai pandu terbaik. Sebagai pandu terbaik Sutomo meraih penghargaan berupa *Pandu Garuda*. Hanya segelintir orang yang bisa meraih prestasi itu.

Bakat Sutomo tak hanya di kepanduan. Dalam dunia jurnalis, wartawan, rupanya ia juga sangat lihai. Di sela-sela sibuk di kepanduan, ia berkecimpung sebagai wartawan di Harian *Soeara Omoem*. Dari sini kariernya melejit. Di saat usianya baru 18 tahun, sudah menjadi Redaktur Mingguan *Pembela Rakyat*. Tak hanya di mingguan, pada 1939, ia menjadi kolumnis Harian *Ekspres*. Harian ini merupakan surat kabar berbahasa Jawa.

Bergelut dalam dunia jurnalis, apa yang

dilakukan oleh pria yang selanjutnya akrab dipanggil Bung Tomo itu seperti di kepanduan, yakni berprestasi. Selepas *menclok* sana dan *menclok* sini di berbagai media, ia bekerja di Kantor Berita *Antara*, kantor berita resmi milik pemerintah. Kali pertama di *Antara*, dia menjadi koresponden untuk wilayah Jawa Timur. Sebagai koresponden, *Antara* puas dengan berita kiriman Sutomo. Untuk itu pada usia 25 tahun, Bung Tomo diangkat menjadi Kepala Kantor Berita *Antara* di Surabaya. Sebagai seorang wartawan, ia mempunyai strategi penulisan di masa penjajahan Jepang. Untuk menge- labui sensor Jepang yang sangat ketat, Si Bung menulis kabar yang ada dengan

pejuang.

Bung Tomo sadar kekecewaan rekan-rekannya. Dia pun merasa apa yang dilakukan itu melanggar janji. Menjelang pernikahan, ia lebih dahulu meminta izin kepada pengurus dan anggota Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI). Dalam berita Harian *Boeroeh*, 16 Juli 1947, yang mengabarkan pernikahan Sutomo dengan Sulistina, tertanda pimpinan BPRI merestui pernikahan yang telah digelar pada 19 Juni 1947. Dalam untaian kata tertulis, “setelah ikatan persahabatan mereka diresmikan, mereka akan lebih memperhebat perjuangan untuk rakyat dan revolusi; meskipun perkawinan telah dilangsungkan,

hancurkan kedudukan kekuatan Indonesia. Menurut seorang sejarawan, keteledoran Sutomo terjadi beberapa kali tanpa disadari.

Peristiwa lain akibat keteledoran yang dilakukannya adalah, suatu waktu, dengan suara berapi-api, Bung Tomo menyerukan, “bongkar semua senjata di Kedung Cowek, bagikan seluruhnya kepada rakyat. Kita memerlukan segala macam senjata untuk menembak pesawat terbang musuh, membunuh semua tentara Inggris.” Siaran yang dikumandangkan itu mengakibatkan dua jam kemudian pasukan Inggris menemukan lokasi Kedung Cowek dan menghujannya dengan tembakan meriam. Beruntung dua hari sebelumnya senjata milik tentara Indonesia



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

menggunakan bahasa Jawa.

Dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya kembalinya penjajahan Belanda. Di kalangan pemuda pejuang ada pantangan tidak akan nikah sebelum Indonesia benar-benar lepas dari cengkraman Belanda. Untuk itu, para pemuda pejuang tersungut-sungut bila melihat ada kabar pernikahan yang muncul di ruang advetorial surat kabar. Pantangan yang demikian juga sempat digenggam Bung Tomo. Namun dalam perjalanan, dia ‘melanggar’ pantangan itu. Di masa perjuangan yang masih mendidih, ia menikahi Sulistina. Apa yang dilakukan itu ada yang mendukung, tetapi ada pula yang membully-nya. Pihak yang kecewa dengan pantangan itu menyalahkan sikap Si Bung yang tidak komitmen dengan sikap para pemuda

mereka tidak menjalankan kewajiban dan hak sebagai suami-istri sebelum ancaman terhadap kedaulatan negara dan rakyat dapat dihalaukan.” Istrinya juga mendukung langkah suaminya. Sulistina mengatakan, “kami harus berjanji melaksanakan dengan patuh, syarat ini demi keselamatan negara.”

Dalam sebuah kesempatan, Bung Tomo dianggap kerap melakukan keteledoran. Dalam siaran yang dikumandangkan, dia kadang *keceplosan* sehingga justru membocorkan kekuatan tentara Indonesia. Ia tanpa sengaja memperingatkan penembak meriam yang berada di sekitar Undaan bahwa tembakannya tak mencapai sasaran, bahkan jatuh di daerah kawan. Ungkapan yang demikian justru menjadi informasi penting bagi pihak tentara Inggris. Mereka kemudian bergerak ke Undaan dan meng-

sudah dipindahkan dari tempat itu. Meski demikian para komandan tentara Indonesia seperti Soengkono, Jonosewojo, dan Rambei, marah. Mereka menuduh Sutomo gegabah dan tidak sadar keamanan.

Selepas perjuangan kemerdekaan selesai dan pemerintahan Indonesia sudah berjalan normal tanpa gangguan Belanda dan Inggris, Si Bung pernah merasakan kekuasaan. Pernah memangku jabatan sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata/Veteran sekaligus Menteri Sosial Ad Interim pada 1955-1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Tak hanya menjadi eksekutif, ia juga pernah menjadi anggota legislatif sebagai anggota DPR pada 1956-1959 mewakili Partai Rakyat Indonesia. □

AWG|dari berbagai sumber

# Bersama Berjuang untuk Indonesia

Tentara Indonesia, pemuda, ulama, dan santri bersatu melawan tentara Inggris di Surabaya. Resolusi Jihad menambah kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**S**URABAYA di bulan September hingga November pada tahun 1945, dalam suasana tegang. Peristiwa di Hotel Yamato dan kedatangan pasukan Inggris di kota itu menjadi perhatian tidak hanya seluruh bangsa Indonesia, namun juga dunia internasional. Presiden Soekarno, tentara Indonesia, ulama, santri, dan rakyat bahu membahu bersiap diri untuk mempertahankan Kota Surabaya dari upaya tentara Inggris untuk menjadikan sebagai basis kekuatan militer guna mengembalikan Indonesia kepada kolonialisme Belanda.

Agar Surabaya tidak direbut tentara Inggris, ada dua peristiwa penting yang

terjadi pada Oktober 1945 di kota itu. *Pertama*, 15 Oktober Radio Pemberontakan yang dimotori oleh Bung Tomo mengudara. *Kedua*, 22 Oktober 1945, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari kota-kota yang ada di Jawa dan Madura mengadakan pertemuan di Jl. Bubutan. Mereka terpanggil untuk ikut secara aktif berjuang mempertahankan kemerdekaan. Dalam pertemuan tersebut, para ulama NU mendeklarasikan *Resolusi Jihad Fii Sabilillah*. Isi *Resolusi Jihad* adalah: *berperang menolak dan melawan penjajah itu fardlu 'ain (yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-*

*anak, bersenjata atau tidak) bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu jadi fardlu kifayah (yang cukup, kalau dikerjakan sebagian saja).* Menurut sejarawan sekaligus Ketua Lesbumi PBNU, Agus Sunyoto, ajakan untuk melakukan jihad itu menyebar dari masjid ke masjid dan mushola ke mushola.

Dua hari setelah *Resolusi Jihad* di-deklarasikan oleh para ulama NU, Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan kepada rakyat untuk melawan tentara Inggris. Tentu pidato itu juga didengar oleh para ulama dan santri. Agus Sunyoto dalam tulisan di *online nu.or.id*, menyebut pendirian pos-pos pertahanan Inggris di Surabaya tidak hanya membuat murka pemerintah dan tentara Indonesia, namun juga para pemuda pejuang, ulama, dan santri. Pada 26 Oktober 1945, para pemuda dan santri yang dipimpin oleh Gus Ahyat Cholil yang aktif di Hisbullah yang berada di kawasan Ampel, Sukadana, Boto Putih, Pekulen, Pegirikan, dan Sawah Pulo menuju ke pos-pos pertahanan tentara Inggris. Tanpa ada yang mengomando, dengan didahului takbir, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ratusan santri beserta pemuda menyerang pos pertahanan Sekutu di Benteng Miring di sebelah utara gedung sekolah Al-Irsyad.

Keesokan hari, tepatnya 27 Oktober, selepas peristiwa di Benteng Miring, tersiar kabar ada korban di pihak pemuda dan santri. Di satu sisi hal demikian membuat marah bangsa Indonesia, di sisi lain tentara Inggris menganggap penyerbuan di Benteng Miring sebagai pertanda akan terjadi pertempuran besar-besaran. Untuk itu mereka menambah kekuatan pasukan guna memperkuat pertahanan-pertahanan yang didirikan. □

AWG/dari berbagai sumber





**Mirza Ahmad**

Masyarakat Riau

## Harapan Baru Kepada Wakil Rakyat Baru

**W**AKIL Rakyat adalah jabatan yang mentereng bagi rakyat biasa, seperti saya. Hanya orang-orang pintar yang mampu menjadi wakil rakyat. Namun, mereka duduk dan dipilih menjadi wakil rakyat adalah karena pilihan rakyat. Jadi, jangan sampai seperti kata pepatah: "Kacang lupa kulitnya."

Wakil rakyat ke depan harus sering turun ke bawah, menyambangi rakyat di daerah-daerah bahkan di pelosok-pelosok, dengarkan aspirasi mereka dan keinginan mereka. Wakil rakyat harus menjadi harapan buat rakyat yang bisa membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Wakil rakyat juga mesti memerhatikan permasalahan yang menimpa rakyat, seperti kerusuhan, konflik, jangan sampai mereka menderita berlama-lama. Jangan sampai rakyat sesama rakyat saling bermusuhan dan berkonflik, ini penting untuk diperhatikan.

Ciptakanlah banyak peluang di daerah, seperti peluang kerja dan usaha sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh dalam bekerja atau berusaha dan ini bisa membuat rakyat daerah berkurang untuk mengadui nasib di kota-kota besar. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap masalah sosial di kota-kota besar. Keterkaitan seperti itu harus dipikirkan oleh semua wakil rakyat. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA



**Bangjoh**

Masyarakat Maros

## Wakil Rakyat Harus Suarakan Hati Rakyat

**K**ETIKA wakil rakyat terpilih, dia sudah terikat kepada rakyat yang memilihnya dan rakyat secara keseluruhan. Untuk itu janganlah melupakan mereka setelah terpilih. Saya pribadi bangga orang daerah saya terpilih menjadi wakil rakyat, itu sangat bagus. Kami jadi memiliki harapan besar.

Soalnya, sangat sedikit dari daerah kami yang bisa melenggang ke Senayan. Untuk itulah saya berharap, semestinya orang-orang asli daerah diberikan porsi yang lebih banyak untuk berkiprah di pusat, sehingga bisa membangun daerahnya.

Jika telah terpilih, wakil rakyat harus sering-sering menyapa rakyat, menemui, memperjuangkan nasib rakyat, sebab rakyat memilih karena dengan alasan memiliki harapan besar untuk memperbaiki nasibnya lewat para wakilnya.

Berbagai bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan menyentuh langsung masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan harus diperhatikan dan masyarakat daerah harus diberi akses yang mudah untuk mendapatkannya melalui UU yang berpihak kepada rakyat tanpa kecuali. □

DER

## Bahasa Menunjukkan Suatu Bangsa

MENJELANG mengakhiri masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dan menjelang pelantikan Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Tapi bukan sesuatu yang baru, karena sebelumnya sudah ada UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Dalam undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada Pasal 28, jelas menyebutkan: *Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.* Dengan demikian, aturan penggunaan Bahasa Indonesia sudah jelas adanya. Dibuat tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperkokoh keberadaan Bahasa Indonesia.

Keberadaan bahasa adalah menunjukkan sebuah bangsa. Sebuah bangsa menjadi hambar ketika keberadaan bahasa yang mereka gunakan tidak memiliki kejelasan dan asal usulnya. Bahasa juga sebagai sarana untuk mempersatukan sebuah bangsa. Beda bahasa bisa menceraikan beraikan suatu bangsa. Untuk itulah para Pemuda Indonesia pada Kongres II Pemuda menyebutkan, bahasa bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Lebih jelasnya mengenai Perpres tersebut, berikut pendapat anggota MPR.

**Hetifah Sjaifudian** Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

### Bukan Untuk Melarang Belajar Bahasa Asing

**P**ERATURAN Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia adalah undang-undang yang merujuk pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Selama ini aturan turunan yang ada baru mengatur mengenai penggunaan bahasa Indonesia oleh pejabat negara dalam acara-acara kenegaraan. Perpres terbaru ini mengatur lebih luas lagi, seperti penamaan bangunan dan lain sebagainya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Akan ada tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan Perpres ini. Perpres ini salah satunya mengatur bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain wajib berpidato dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

Apakah Perpres itu ingin menduniakan bahasa Indonesia? Pertama kali kita perlu mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia yang mudah diterima. Namun, dalam dunia global, khususnya ekonomi kreatif



dengan sasaran milenial akan mengalami transisi yang tidak mudah. Supaya tingkat penerimaan masyarakat, khususnya milenial, tinggi maka perlu dilakukan sosialisasi secara

intensif. Badan bahasa bisa melakukan melalui media-media sosial dan cara-cara lain yang mudah diserap untuk membawa kebiasaan baru dan kebanggaan berbahasa

Indonesia.

Apakah hal yang demikian menunjukkan ketidakmampuan bangsa Indonesia dalam berbahasa Internasional? Harus dihindari kesalahpahaman bahwa Perpres ini bukan ingin mencegah anak-anak kita belajar bahasa asing. Terbitnya Perpres 63 Tahun 2019 sangat baik, dan perlu diapresiasi, untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan, karena nama-nama gedung, seperti hotel, perumahan, perkantoran, nama waduk,

bandungan, dan lain sebagainya sebaiknya memang menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini juga senafas dengan Undang-Undang Tentang Pemajuan Kebudayaan yang menekankan pentingnya penggunaan bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Meskipun penekanan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan lebih kepada semangat merawat bahasa daerah.

Lalu bagaimana di dalam negeri masif penggunaan bahasa asing untuk nama

perumahan, gedung, dan kegiatan? Perpres No. 63 Tahun 2019 di setiap daerah perlu diikuti oleh lahirnya perda-perda yang mengatur lebih rinci tentang penggunaan bahasa Indonesia untuk nama-nama gedung atau nama nama tempat yang saat ini masih didominasi oleh nama-nama atau bahasa asing. Sebagai contoh di BSD Tangerang Selatan, mayoritas nama-nama perumahan menggunakan nama-nama asing seperti *The Green*, dan lain sebagainya. □

AWG

**Jazuli Juwaini** Anggota MPR dari Fraksi PKS

## Untuk Menjaga Identitas Bangsa Indonesia

**P**ERATURAN Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2019 bukan aturan baru, karena sudah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara. Pasal 28 undang-undang tersebut jelas menyatakan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

Ini lazim saja karena pada umumnya kepala negara dan pejabat negara lain juga melakukan hal yang sama dalam forum resmi dunia (didampingi penerjemah). Dalam perspektif kebangsaan, ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk menjaga identitas dan karakter sekaligus memperkenalkan bahasa Indonesia di pentas dunia.

Tapi tentu saja tidak kemudian diartikan penguasaan terhadap bahasa asing yang sudah menjadi bahasa dunia (khususnya bahasa Inggris, Arab, Spanyol, mandarin, dan bahasa internasional lainnya) menjadi tidak penting/tidak perlu.

Penguasaan bahasa asing memberi nilai kompetitif dalam pergaulan dunia di berbagai bidang, termasuk dalam diplomasi internasional. Artinya, meski dalam pidato resmi kepala negara dan pejabat negara wajib

menggunakan bahasa Indonesia, namun dalam forum-forum tidak resmi, informal, lobi, diskusi, bahkan seminar publik penggunaan bahasa asing jelas memiliki nilai lebih. Hal ini bukan saja untuk kepentingan membangun kepercayaan, kedekatan, keakraban, dan pemahaman, lebih dari itu memudahkan pencapaian tujuan dan target yang di-

harapkan.

Dalam konteks itulah seorang kepala negara dan pejabat negara dituntut untuk bisa membawakan diri dengan kemampuan komunikasi yang baik ketika hadir dalam pentas diplomasi internasional. Saya kira intinya di sana. □

AWG



**Audiensi Santri Tahfiz Leadership**

# Pemimpin Harus Lewat Kaderisasi

Ketika menerima para santri penghafal Alquran, Wakil Ketua MPR menyarankan agar para santri belajar mengenai kepemimpinan, dan terus mengasah potensi yang dimiliki.



**W**AKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan, globalisasi merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. “Di era globalisasi, dunia seolah menjadi tanpa batas,” ujar HNW. Untuk menghadapi era globalisasi ini, menurut HNW, kita harus menguasai bahasa-bahasa Internasional.

HNW mengemukakan hal itu saat menerima audiensi 12 Santri Kubik Tahfiz Leadership di Ruang Rapat Pimpinan, Lt 9, Gedung Nusantara III, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 23 Oktober 2019.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan rasa bangganya kepada para tamunya ini, karena himpunan anak muda dari berbagai latar dan daerah itu cinta Alquran dan menjadikan kitab suci umat Islam sebagai pedoman dalam kehidupan dan leadership, kepemimpinan.

Tahfiz Leadership, seperti dijelaskan salah seorang santri, Achmad Jamalulael, tidak sekadar sebagai wadah untuk menghafal Alquran, namun juga sarana untuk melatih kepemimpinan. Mereka di sini dididik selama delapan bulan. “Setelah mengikuti kaderisasi, sebagai anggota kita harapkan bisa membuka cabang di daerah masing-



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

masing,” tuturnya.

Menanggapi masalah kepemimpinan, HNW mengatakan, kepemimpinan atau pemimpin itu tidak bisa datang atau terbentuk secara tiba-tiba. Menurut HNW, pemimpin harus melalui proses kaderisasi. Proses itu dimulai sejak anak-anak, sekolah, organisasi, dan mengikuti kursus, seperti Tahfiz Leadership. “Untuk itu, kegiatan ini dimaksimalkan dalam organisasi kalian,” sarannya.

Lebih lanjut HNW mengatakan, manusia tak bisa hidup sendiri. Mereka harus menjalin silaturahmi, pertautan dengan berbagai pihak, termasuk dalam dunia internasional. Bergaul dengan beragam orang dengan latar belakang berbeda akan menjadi bagus bila dibiasakan. Dengan pergaulan dalam keberagaman, menurut HNW, kita akan mengetahui karakter masing-masing orang.

Sehingga dari sinilah mereka yang akan menjadi pemimpin bisa memahami orang yang dipimpin.

HNW menegaskan, dalam Alquran juga diajarkan mengenai kepemimpinan. Dia mengandaikan bila pemimpin diibaratkan sebagai imam, maka imam harus tahu kondisi makmumnya sehingga ia tidak bermena-mena. “Imam yang baik harus siap menjadi makmum,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu mencontohkan, para ulama pendiri bangsa. Dengan menjadikan Alquran sebagai pedoman, para ulama berjuang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. “Para ulama ikut memerdekakan Indonesia, mereka berasal dari beragam ormas Islam”, ujarnya. □

AWG

## Gema Keadilan Provinsi DKI Jakarta

# Hidayat Khawatirkan Moral Bangsa Indonesia

Krisis moral yang tengah menimpa bangsa Indonesia kembali jadi sorotan. Penyebabnya, maraknya aksi pembunuhan melibatkan istri, suami, dan anak.

**D**I HADAPAN pengurus Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan Provinsi DKI Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi moral bangsa yang kian memburuk. Saat ini, kata Hidayat, setiap hari media mengabarkan soal kejahatan terhadap keluarga yang dilakukan anggota keluarga lainnya.

Misalnya, ada anak yang menginjak kepala ibunya sendiri, lantaran kesal setelah dinasihati orangtuanya. Ada juga istri yang tega membunuh suami dan anaknya, karena ingin menguasai harta kekayaan. Juga suami yang tega membunuh istrinya. "Semua peristiwa ini membuat kita miris," ungkap Hidayat Nur Wahid.

Jadi, menurut Hidayat, moral bangsa Indonesia sangat memprihatinkan, bahkan kalau boleh dibilang berada pada titik terendah. "Kejadian seperti ini sering kita dengar, sementara di negara maju yang masalah moral keagamaannya tidak begitu diperhatikan malah jarang terjadi," ungkap Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu dikemukakan Wakil Ketua MPR saat menerima kunjungan delegasi Gerakan Pemuda (Gema) Keadilan Provinsi DKI Jakarta. Acara tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III lantai 9, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Delegasi Gema Keadilan DKI Jakarta yang dipimpin ketuanya, Noval Abuzarr, datang menemui Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid untuk menyampaikan sejumlah acara yang hendak digelar dalam waktu dekat. Antara lain, menyelenggarakan dialog dalam rangka peringatan peristiwa G-30-S/PKI. Juga peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober akan datang.

Melihat kenyataan kian terpuruknya moral bangsa Indonesia, Hidayat berharap, Gema Keadilan Provinsi DKI Jakarta mau berkontribusi aktif dalam menjaga dan meningkatkan moral masyarakat, khususnya generasi muda. "Kawan-kawan ini generasi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

muda, jadi seharusnya lebih tahu bagaimana cara mendekati generasi millennial. Mereka ini harus diberikan kegiatan positif yang sesuai dengan jiwa mereka, agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan," kata Hidayat.

Menurut Hidayat, Gema Keadilan juga harus memberi perhatian lebih pada kasus penyalahgunaan narkoba. Apalagi saat ini semakin banyak anak-anak muda yang terpapar narkoba. Agar kegiatan tersebut sukses, Hidayat memberi saran supaya

Gema Keadilan mau bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Seperti aparaturnya polisi, BNN dan juga pemerintah daerah.

Selain itu, agar kegiatan yang diinisiasi Gema Keadilan berdampak luas, Hidayat meminta, agar remaja masjid diikutsertakan. Apalagi jumlah anggota remaja masjid sangat banyak. Mereka juga memiliki banyak kegiatan positif yang sudah berjalan selama ini. □

MBO



Deklarasi BKAD2PPB

# Mediator dalam Menyelesaikan Masalah Papua

Anggota DPD dan DPR dari Provinsi Papua dan Papua Barat membentuk wadah berupa badan komunikasi. Badan ini diharap menjadi mitra pemerintah dalam menyelesaikan masalah di sana.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**D**UAPULUH satu wakil rakyat dari Provinsi Papua dan Papua Barat, yang terdiri dari 8 anggota DPD dan 13 anggota DPR, bertempat di Press Room, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 25 Oktober 2019, mendeklarasikan berdirinya Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD Papua dan Papua Barat, disingkat BKAD2PPB. Hadir dalam deklarasi itu Ketua BKAD2PPB Yorrys Raweyai, Wakil Ketua BKAD2PPB Komarudin Watubun, Sekjen BKAD2PPB Filep Wamafma; anggota BKAD2PPB Robert J. Kardinal, Trifena M. Tinal, H. Sulaeman L. Hamzah, dan Roberth Rouw.

Kepada para wartawan, Yorrys mengatakan, sejak lama di Provinsi Papua dan Papua Barat terjadi berbagai dinamika dan permasalahan yang sepertinya tidak kunjung selesai, antara lain masalah Hak Azasi Manusia (HAM). Untuk itu, kata Yorrys, perlu ada lembaga formal yang merepresentasikan diri untuk menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. “Dalam berbagai masalah, sepertinya pemerintah berjalan sendiri”, tutur anggota DPD dari Papua itu.

Untuk itu, wakil rakyat berasal dari Papua dan Papua Barat, baik yang berada di DPD maupun DPR, bersepakat untuk membentuk

wadah yang mempunyai legalitas. Wadah ini diharapkan mampu menjadi mediator dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada di tanah Papua secara keseluruhan. “Untuk itu, kita bersepakat membentuk BKAD2PPB”, ujar mantan politisi Partai Golkar itu. Menurut aktivis Pemuda Pancasila ini, anggota dari badan ini akan menginventarisir masalah-masalah yang ada. Badan juga ingin mempublikasikan masalah yang ada secara baik dan benar, serta bertanggung jawab.

Dalam kesempatan yang sama, Komarudin Watubun menyebut, badan yang mempunyai legalitas ini berdiri dengan dasar dua prinsip, yakni: prinsip peri kemanusiaan dan peri keadilan. Diungkapkan, lembaga ini sebenarnya sudah berdiri sejak lama. Sekarang tambah kompak, sebab kondisi Papua yang tenang meski tidak nyaman. Untuk itulah wakil rakyat dari dua provinsi itu menginventarisir persoalan yang ada dalam rangka membangun Papua sebagaimana yang tertera dalam Alinea IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Politisi PDI Perjuangan ini mengakui, persoalan Papua terjadi karena ingkar dari janji yang ada. Untuk itulah tugas wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat untuk ikut peduli

dan mengatasi masalah yang tak pernah terselesaikan. “Dari Presiden ke Presiden masalah di Papua tak pernah terselesaikan”, ujarnya. “Untuk itu, kami ingin membantu Presiden”, tambahnya. Presiden Joko Widodo, menurut Komarudin Watubun, merupakan Presiden yang paling banyak berkunjung ke pulau paling timur Indonesia itu. Meski demikian tensi di Papua tak pernah selesai, bahkan meningkat.

Sementara Filep Wamafma mengungkapkan, semua yang berkumpul di badan ini untuk melihat apa yang belum disentuh dan dikerjakan dalam membangun Papua. Persoalan Papua diakui sangat panjang dan belum menemukan konsep bagaimana untuk membangun Papua. “Untuk itu kami terpanggil berkontribusi pada Presiden”, paparnya.

Dia menyebutkan, badan ini sebagai bentuk nyata para wakil rakyat dari Papua dan Papua Barat memperjuangkan suara rakyat di sana. Bila tidak mampu memperjuangkan dapilnya, menurut Filep Wamafma, apa gunanya menjadi wakil rakyat di Jakarta. “Untuk itu kami berjuang untuk menyelesaikan masalah”, paparnya. “Kami menjadi mitra dari pemerintah daerah dan pusat”, tambahnya. □

AWG

## Diskusi Empat Pilar MPR

# Politik MPR Adalah Politik Kebangsaan

Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang merepresentasikan partai politik dan DPD untuk membangun politik kebangsaan. Pemilihan Ketua MPR secara musyawarah dan mufakat juga menjadi contoh konkret politik kebangsaan di MPR.

**A**NGGOTA MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan, politik di MPR adalah politik kebangsaan bukan politik kekuasaan. Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang merepresentasikan partai politik dan DPD untuk membangun politik kebangsaan. Pemilihan Ketua MPR secara musyawarah dan mufakat juga menjadi contoh konkret politik kebangsaan di MPR.

"Di MPR arahnya adalah politik kebangsaan bukan politik kekuasaan," kata Saleh dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Praktik Politik Kebangsaan" di Media Center, Gedung



Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Narasumber lain dalam dialog ini adalah Peneliti Politik LIPI Prof. Siti Zuhro, dan anggota DPD dari Papua Barat, Dr. Philip Wamahma.

Saleh menjelaskan, perbedaan antara politik kebangsaan dan politik kekuasaan. Tujuan politik kebangsaan adalah memperkuat kohesivitas sosial dan persatuan nasional. Politik kebangsaan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan kelompok. Politik kebangsaan bersifat jangka panjang dan menjangkau jauh ke depan.

Sebaliknya politik kekuasaan mengutamakan kepentingan kelompoknya, seperti kepentingan partai politik. Politik kekuasaan sifatnya jangka pendek untuk meraih kekuasaan. Partai politik memang untuk mencari kekuasaan. Saleh mencontohkan politik kekuasaan seperti memperebutkan posisi menteri di kabinet.

"MPR mengedepankan politik kebangsaan dibanding politik kekuasaan," ujar Sekretaris



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Fraksi PAN MPR ini. Dia mencontohkan Pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang merepresentasikan partai politik dan DPD untuk membangun politik kebangsaan. Pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat juga contoh konkret politik kebangsaan di MPR.

Contoh politik kebangsaan di MPR adalah Sidang Tahunan MPR dan Sosialisasi Empat Pilar MPR. "Sidang Tahunan MPR bermuansa etis, bukan politik. Yaitu, etika seorang pemimpin menjelaskan kepada rakyat capaian selama satu tahun. Sosialisasi Empat Pilar MPR juga merupakan contoh politik kebangsaan. Karena tidak ada kepentingan politik praktis dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR. Itu adalah konteks politik kebangsaan," paparnya.

Tidak jauh berbeda, anggota DPD dari Papua Barat Philip Wamahma sepakat bahwa MPR adalah wadah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan politik secara nasional. "MPR sebagai rumah bersama dalam rangka memperjuangkan kepentingan-kepentingan warga negara," ujarnya.

Philip melihat ada kelemahan dalam membangun politik kebangsaan. Yaitu, pemegang kekuasaan tidak melaksanakan secara maksimal kewenangan yang diberikan. "Jika negara ingin menerapkan politik kebangsaan maka perlu komitmen dan konsistensi para pemegang kekuasaan

dalam menjalankan kewenangan dan setiap pengambilan keputusan. Perlu komitmen dan konsistensi dalam mengelola Indonesia. Kalau pemerintah hanya mengedepankan politik praktis, saya yakin dan percaya sistem politik nasional itu akan berpengaruh pada politik lokal," katanya.

Sementara itu peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan, berbicara kebangsaan bukanlah tentang penguasa tetapi tentang pemimpin yang "berpihak," baik di level nasional maupun di level lokal. Keberpihakan itu terlihat ketika pemimpin mengambil keputusan. "Ini adalah pertanyaan kebangsaan," katanya.

Siti Zuhro mengajak untuk mengevaluasi perilaku dan tutur kata elit (politik). Sebab, ketika masyarakat membutuhkan role model atau teladan dari para elit, masyarakat tidak mendapatkan teladan itu. "Kita evaluasi elit (politik) kita. Peran apa yang sedang dimainkan elit kita. Apakah para elit menjadi faktor pendorong bagi kemajuan kita berbangsa dan bernegara, atau justru menjadi faktor yang menghambat karena perilakunya," katanya.

Evaluasi, lanjut Zuhro, tidak hanya pada elit (politik) tetapi juga evaluasi terhadap infrastruktur (partai politik, civil society, media) dan suprastruktur politik. □

BSC

Putaran Final LCC Empat Pilar MPR

# Ma'ruf Cahyono: Generasi Muda Harus Paham Nilai-nilai Kebangsaan

LCC Empat Pilar MPR merupakan salah satu metode untuk menginternalisasikan, menyosialisasikan, membumikan, dan membunyikan nilai-nilai Empat Pilar MPR.



**M**AJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali menggelar putaran final dan grand final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat SLTA se-Indonesia tahun 2019. Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91, Sekretaris Jenderal MPR Dr. H. Ma'ruf Cahyono membuka secara resmi LCC Empat Pilar MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Dalam sambutannya, Ma'ruf Cahyono mengucapkan selamat datang kepada para siswa peserta LCC Empat Pilar dan guru pendamping, serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi. "Selamat datang di Gedung MPR. Kehadiran para siswa peserta putaran final LCC ini adalah bagian dari generasi muda yang unggul di provinsi masing-masing. Para juara di provinsi masing-masing," ujarnya.

Ma'ruf menjelaskan, MPR setiap tahun menyelenggarakan LCC Empat Pilar MPR RI. LCC Empat Pilar MPR adalah salah satu metode digunakan MPR untuk menginternalisasikan, menyosialisasikan, membumikan, dan membunyikan nilai-nilai Empat Pilar MPR. Mengawali putaran final dan grand final LCC bertepatan dengan peringatan Hari

Sumpah Pemuda ini bisa menjadi momentum untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, khususnya siswa peserta LCC Empat Pilar MPR.

"Generasi muda harus paham tentang Pancasila sebagai ideologi negara, konstitusi UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya memberi kesadaran bernegara, tetapi juga kesadaran berkonstitusi, komitmen terkait NKRI dan pemahaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga Empat Pilar MPR RI

bisa terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Di tengah kemajuan teknologi informasi, lanjut Ma'ruf, pemuda harus terus-menerus melakukan adaptasi terhadap perubahan. Tidak hanya memiliki ketahanan terhadap ideologi bangsa, tapi juga pemuda harus mengisi dengan kemampuan, kompetensi, dan daya saing yang tinggi. "Kalau kita tidak mampu meningkatkan daya saing itu, kita akan ketinggalan dengan bangsa lain. Masa depan bangsa ini berada di pundak pemuda,







FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sehingga pemuda tidak hanya memiliki daya tahan tapi juga daya saing,” paparnya.

Kepada para siswa peserta LCC Empat Pilar MPR, Ma’ruf juga berpesan agar memiliki wawasan kebangsaan. Belajar tentang wawasan kebangsaan adalah belajar menjadi warga negara yang baik. “Pemuda harus menyemai Indonesia yang religius, Indonesia yang humanis, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang demokratis, dan Indonesia yang adil,” pesannya.

Pembukaan putaran LCC Empat Pilar MPR tingkat SLTA ini dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR dan peserta LCC Empat Pilar dari 34 provinsi di Indonesia beserta guru pendamping, dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi masing-masing. Setiap sekolah diwakili 10 siswa. Materi yang dilombakan terkait dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Seleksi awal sudah dilakukan di setiap

provinsi masing-masing. Pemenang LCC Empat Pilar tingkat provinsi mengikuti putaran final di Jakarta untuk memperebutkan juara LCC Empat Pilar MPR tingkat nasional. Rangkaian final dan grand final LCC Empat Pilar dimulai sejak Senin (28/10/2019) hingga 5 November 2019. Selain lomba, peserta juga mengikuti kegiatan lain seperti audiensi dengan Pimpinan MPR, wisata pendidikan, outbound, dan lainnya. □

**BSC**

## Berharap Menjadi Juara Nasional

**S**HANICE Erupley, siswi kelas II SMK Kehutanan Negeri Manokwari, Papua Barat, sangat bangga menjadi salah seorang peserta Final LCC Empat Pilar MPR 2019. “Tahun ini adalah tahun luar biasa, sekolah kami akhirnya lolos masuk final. Kami berharap bisa meraih juara pertama LCC Empat Pilar MPR 2019 tingkat nasional,” katanya usai acara Pembukaan Final LCC Empat Pilar MPR 2019, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Menurut Shanice, keberhasilan sekolahnya lolos seleksi tingkat provinsi dan maju ke putaran final LCC di Jakarta ini karena kesabaran para guru yang terus mendampingi tim. “Saya bersama teman-teman sangat berterima kasih atas dukungan guru-guru, pendamping, orang tua, dan juga teman-teman kami. Terima kasih juga kami



sampaikan kepada MPR RI yang telah memberikan kesempatan kami dari daerah untuk menunjukkan kemampuan dalam ajang nasional,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Fidela Eliza-

beth Arden Doom, siswi SMA Negeri 5 Jayapura, Papua. Fidela juga mengungkapkan sekolahnya baru tahun ini berhasil menjadi finalis LCC Empat Pilar MPR 2019 di Jakarta.

“Masuk menjadi finalis merupakan hal yang berat. Tapi, akan kami buktikan dengan kerja keras, kami akan meraih hasil yang sebaik-baiknya. Target kami menyabet juara nasional untuk kami bawa ke Papua,” ucapnya.

Namun, lanjut Fidela, teman-teman dari daerah lain yang juga hebat-hebat, tentu punya harapan yang sama. Oleh karena itu, kata Fidela, yang penting tim harus berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya. “Kami rasa siapapun juaranya harus kita dukung, dan kita hormati,” ujar Fidele. □

**DER**

Ketua MPR Bambang Soesatyo:

# Terapkan Nilai-Nilai **Luhur Pancasila** dalam Kehidupan Sehari-hari



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**K**ETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengajak semua pihak untuk bersama-sama lebih mengenali dan memahami landasan ideologi, konstitusi, komitmen kebangsaan, serta semangat kesatuan dalam perbedaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa, adalah nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dikenali, dipahami dan diimplementasikan.

“Sudah lama, tepatnya dimulai sejak 2004, MPR RI berkeinginan melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR dalam rangka menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat. Materi yang sudah disusun sebagai guidance bagi anggota MPR RI kemudian diturunkan dalam metode yang diserahkan kepada Badan Sosialisasi yang bertugas melakukan sosialisasi sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang,” ujar Bamsoet dalam acara Serah Terima Kepengurusan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Jakarta, Jumat (11/10/19).

Selanjutnya, Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini menjelaskan, dalam melakukan salah satu tugas sesuai amanat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, yakni “mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaannya, serta menyerap aspirasi,” MPR RI melalui alat kelengkapan yakni Badan Pengkajian pada 2018 melakukan survei tentang efektifitas pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan MPR RI.

“Hasil survei menunjukkan sebanyak 32,8% masyarakat secara nasional telah mengikuti sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilakukan oleh MPR. Jika angka tersebut dikonversi sesuai dengan proyeksi BPS dan Bappenas yang menyebut jumlah penduduk Indonesia di tahun 2018 sebanyak 265 juta, maka jumlahnya menyentuh sekitar 87 juta jiwa,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, hasil survei terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada publik juga menunjukkan sikap yang positif. Sebanyak 99,1% publik mengaku bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitupun dengan Bhinneka Tunggal Ika, sebanyak 99,8%



berpendapat bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghormati warga lain, walaupun berbeda agama dan keyakinan.

“Salah satu pertanyaan survei yang ditanyakan ke responden, yakni tentang paparan Sosialisasi Empat Pilar berhasil memberikan efek ataukah tidak. Temuannya, sebanyak 65,1% responden mengaku mengalami perubahan pandangan dan sikap setelah mengikuti sosialisasi. Sisanya 34,9% mengaku tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa Sosialisasi Empat Pilar MPR yang dilaksanakan berjalan cukup efektif. Selain juga memberikan catatan bagi MPR untuk terus meningkatkan efektifitas Sosialisasi Empat Pilar dalam bidang materi dan media yang digunakan,” tandas Bamsuet.

Ketua MPR yang pernah memegang jabatan Bendahara Umum Partai Golkar 2014-

2016 ini memandang, MPR RI tak bisa berjalan sendiri. Karenanya perlu dukungan pemuda untuk aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat berbasis kemasyarakatan dalam perspektif kebangsaan.

“Selain tentang kemajemukan, sebagai sebuah bangsa kita juga berada di tengah bayang-bayang tantangan kebangsaan yang berat. Antara lain, masalah kemiskinan, belum optimalnya sektor pendidikan dalam membangun bangsa, kegaduhan para elit politik, terjadinya kerusakan sumber daya alam, kondisi masyarakat di daerah-daerah perbatasan, konflik horizontal, terorisme, dan masalah ancaman kedaulatan negara di tengah cengkraman hegemoni ekonomi-politik dunia,” urai Bamsuet.

Sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat, Ketua DPR RI 2018-2019 ini mendorong pengurus dan anggota GAMKI

terus aktif dalam kegiatan pemberdayaan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Tujuannya untuk mewujudkan harapan dan cita-cita bangsa yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut memang bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

“Sebagai langkah konkret, bisa diawali dengan menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Pemahaman dan pengimplementasian nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara dalam setiap aspek kehidupan secara menyeluruh dan konsisten, diharapkan mampu menumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Bamsuet. □

Ma'ruf Cahyono:

# Wawasan Kebangsaan Adalah Cara Pandang Wujudkan Cita-Cita Kemerdekaan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EKRETARIS Jenderal MPR RI Dr. Ma'ruf Cahyono, SH, MH mengungkapkan bahwa generasi muda Indonesia saat ini dan ke depan mesti lebih memahami kembali nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. Sebab, pasca reformasi ada gambaran kekhawatiran bangsa tentang ke-Indonesiaan terutama internalisasi pemahaman Pancasila dan wawasan kebangsaan yang hilang.

Kondisi terjadi, menjurut Ma'ruf Cahyono, pasca reformasi Eka Prasetya Pancakarsa yang dibentuk dengan TAP MPR No. II Tahun 1978 sudah tidak ada. Begitu pula BP-7 dibubarkan dan seluruh perangkat yang terkait dengan TAP tersebut sudah tidak ada lagi sejak 1999 sampai 2009. Jadi, "Cukup lama vakum. Sehingga ada sesuatu yang terputus, yakni metode menginternalkan Pancasila itu hilang, sehingga hampir sekian tahun generasi muda tidak mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan," katanya.

Ma'ruf Cahyono mengemukakan hal tersebut

ketika berbicara sebagai keynote speech dalam acara Dialog Wawasan Kebangsaan dalam rangka Dies Natalis ke-56 Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Acara ini dihadiri ratusan peserta civitas akademika, mahasiswa dan alumni Unsoed, di Aula Justitia 3 Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (20/9/2019).

Dialog Wawasan Kebangsaan yang

diselenggarakan oleh MPR bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unsoed tersebut berlangsung setengah hari dengan metode interaktif. Tampil sebagai narasumber utama adalah Prof. Drs. Rubijanto Misman dan Nasihin Masha. Dialog ini mengupas tema sentral 'Peningkatan Pemahaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan.'

"Terkait soal nilai-nilai Pancasila dan





wawasan kebangsaan, pertanyaan besarnya adalah kenapa hal itu sampai terjadi (hilangnya internalisasi Pancasila dan wawasan kebangsaan). Itu yang mesti direnungkan semua pihak, terutama generasi muda,” ujarnya. Padahal, lanjut Ma’ruf, pemahaman wawasan kebangsaan sangat penting. Wawasan kebangsaan adalah satu cara bangsa ini dan satu cara pandang bangsa ini untuk meraih cita-cita, yakni cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

“Sekali lagi, generasi muda mesti memahami betapa pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan,” tegasnya. Sangat disayangkan, lanjut Ma’ruf, apabila sebagai generasi muda kehilangan aspek kognisi atau pengetahuan dan pemahaman Pancasila

serta wawasan kebangsaan. “Jika itu terjadi bagaimana generasi muda akan bergerak kepada aspek selanjutnya, yakni aspek afeksi yakni sikap dan kesadaran. Belum lagi dalam tataran implementasi di kehidupan sehari-hari,” jelas Ma’ruf Cahyono.

Karena itu, kata Ma’ruf lebih lanjut, semua hal tersebut adalah ‘pekerjaan rumah’ dan tanggung jawab semua anak bangsa, terutama generasi muda, yang harus paham, lalu cepat mengambil peran agar nilai-nilai Pancasila yang diyakini sebagai ideologi dan wawasan-wawasan kebangsaan oleh semua warga bangsa jangan sampai surut dan menghilang.

Sementara Rektor Unsoed Prof. Dr. Ir. Suwanto, MS., mengatakan bahwa pemahaman wawasan kebangsaan mesti terus ditanamkan kepada rakyat Indonesia,

terutama generasi muda, sebagai pemegang tampuk kepemimpinan bangsa di masa depan.

“Penanaman wawasan kebangsaan adalah tanggung jawab kita semua sebagai anak bangsa, termasuk sivitas akademika di perguruan tinggi, kepada generasi muda yakni para mahasiswa. Sebab merekalah nanti akan memegang tampuk kepemimpinan di negeri ini nanti,” ujarnya.

Rektor juga mengingatkan, negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan besar dengan keberagaman yang sangat besar pula, maka memang sangat diperlukan sosok-sosok masa depan yang sangat mamahami wawasan kebangsaan secara baik dan benar.

Hal tersebut diamini oleh Muhammad Hamdan Fatah, mahasiswa Fakultas Hukum Unsoed 2019. Hamdan sangat mengapresiasi kerjasama MPR dan Unsoed menggelar dialog tentang wawasan kebangsaan. “Wawasan kebangsaan sangat penting, saya tahu itu. Tapi saya bertambah paham bahwa begitu pentingnya wawasan kebangsaan dipahami oleh generasi muda bangsa setelah mengikuti dialog ini. Tidak main-main, ini sangat serius,” katanya.

Menurut Hamdan, pemahaman wawasan kebangsaan yang benar akan semakin memperkokoh rasa kebangsaan, nasionalisme, dan rasa persaudaraan dalam diri setiap warga negara. Dan, “Itu sangat baik untuk membentengi diri dari serbuan negatif globalisasi,” katanya. □



DER





Wathan, Ma'ruf, dan Ketua Umum Wiramuda Hoirul.

Sebagai Anggota Kehormatan Muhammadiyah, Bamsuet mengingatkan para anggota Muhammadiyah, khususnya dari kalangan pemuda dan pemudi, agar tak lelah mengerjakan amal usaha keagamaan, demi terbangunnya manusia Indonesia yang tak lupa atas asal usulnya sebagai bangsa Indonesia yang beradab, berbudaya, beragama, dan berilmu pengetahuan.

Karenanya, selain terobosan dakwah melalui olahraga sepakbola, Muhammadiyah juga bisa bekerjasama dengan MPR RI dalam menyelenggarakan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI dalam berbagai format kekinian. Tak hanya dalam format seminar, namun juga bisa menggunakan media sosial, kegiatan olahraga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Salah satu tujuan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, kata Bamsuet, agar kita tak melupakan konsensus kebangsaan, tak lupa terhadap asal usul dari mana kita berasal. Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, merupakan kekuatan sosial bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai rintangan



dan tantangan. "Kemajuan teknologi saat ini harus kita gunakan untuk melakukan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Saya ajak kaum pemuda untuk bersama menyosialisasikan 4 Pilar MPR RI melalui chanel media sosial," tandas Bamsuet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPi ini juga menyinggung tentang masih maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian di berbagai platform media sosial. Terbaru, Oxford Internet Institute (OII) melaporkan hasil risetnya sepanjang 2017-2018, yang menyebutkan Indonesia bersama berbagai

negara lainnya tak lepas dari buzzer yang mendengungkan pembelahan opini publik dan disinformasi informasi melalui media sosial.

"Jika dibiarkan terus seperti ini, lama-lama media sosial dan internet kita tak ubahnya tempat sampah. Di sinilah peran penting Muhammadiyah, yang sudah terkenal dengan aktifitas kependidikannya untuk turut membersihkan ruang media sosial dari berbagai aktifitas yang mendistorsi pengetahuan publik," pungkas Bamsuet. □

## Delegasi IAIN Purwokerto

# Datang ke MPR untuk Menambah Wawasan Akademik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**B**ERTEMPAT di Ruang GBHN Lt.2, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/ DPR/DPD Senayan, Jakarta, 22 Oktober 2019, ratusan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto diterima oleh Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono, didampingi Kabiro Humas Siti Fauziah, dan Kabag Pemberitaan, Hulembaga, dan Informasi Muhammad Jaya.

Delegasi yang dipimpin oleh Dr. Ahmad Sidiq berkunjung ke MPR selain untuk bersilaturahmi juga untuk menambah wawasan akademik mereka. "Dengan hadir di sini akan menambah wawasan baru, selain di kampus", ujarnya. "Di sini sangat tepat untuk belajar ilmu tata Negara," tambahnya. Ahmad Sidiq berharap, kedatangan para mahasiswa ini bisa membawa manfaat bagi kampusnya yang berada di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, itu.

Dalam forum pertemuan itu, Ma'ruf Cahyono memaparkan kedudukan lembaga-lembaga negara yang ada dalam konstitusi. Dia menyebutkan, lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, BPK, selepas UUD Tahun 1945 berbeda dengan sebelum

UUD diamandemen. "Dulu ada istilah lembaga tinggi dan tertinggi negara," ujarnya. Dan, "MPR tak seperti dahulu lagi," ucapnya.

Selepas UUD diamandemen, kedudukan lembaga-lembaga negara menjadi setara. Yang membedakan lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya,



Ma'ruf Cahyono

menurut Ma'ruf Cahyono, adalah fungsinya. "Sekarang kedudukan lembaga negara adalah horizontal fungsional", ujarnya. Dia mencontohkan, seperti DPR berfungsi membuat undang-undang. Dalam masalah fungsi, sistem tata negara menghendaki tak ada duplikasi. Mengetahui fungsi masing-masing lembaga negara inilah yang menurut Ma'ruf Cahyono merupakan inti dasar bila ingin belajar tata negara.

Terkait MPR, Ma'ruf Cahyono menyebut bahwa lembaga negara ini sekarang memiliki 10 pimpinan. Sepuluh pimpinan ini diatur dalam UU Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Sepuluh pimpinan itu mempunyai tugas masing-masing, seperti tugas Sosialisasi Empat Pilar, kajian tata negara dan konstitusi, peninjauan Ketetapan MPR, dan penyerapan aspirasi masyarakat. "Supaya lembaga negara ini mempunyai kinerja maksimal dan mampu merespon dinamika masyarakat", tuturnya.

MPR Periode 2019-2024, jelas Ma'ruf Cahyono, jumlah anggotanya bertambah. Anggota MPR merupakan gabungan dari





anggota DPR dan DPD. “Hadirnya provinsi baru, Kalimantan Utara, juga membuat jumlah anggota MPR bertambah”, paparnya.

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, MPR mempunyai alat kelengkapan, yakni Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Komisi Kajian Konstitusi. Lembaga itu ada yang menjalankan amanat UUD, undang-undang, dan peraturan tata tertib. “Supaya tugasnya konstitusional”, ucapnya. Badan-badan itu ada yang bertugas menjalankan Sosialisasi Empat Pilar, melakukan kajian tata negara, dan

penganggaran.

Kepada para mahasiswa yang berjaket hijau tersebut, Ma’ruf menyatakan bahwa proses atau dinamika konstitusi itu berputar. Sekarang dalam konstitusi tidak ada pasal yang menyebut mengenai haluan negara dan tidak adanya utusan golongan di MPR. “Tapi hal itu sekarang muncul keinginan ingin dihidupkan atau diadakan kembali”, ungkapnya.

Kabiro Humas Siti Fauziah dalam kesempatan yang sama memberi gambaran mengenai hal-hal yang ada di Kompleks

Parlemen, seperti mengenai Gedung Nusantara. Selain itu Siti Fauziah juga menjelaskan bahwa MPR selama ini melakukan Sosialisasi Empat Pilar dengan berbagai macam metoda, seperti lewat *training of trainers*, *focus group discussion*, lomba cerdas cermat, legal drafting, debat konstitusi, *outbound*, seni dan budaya, bahkan lewat ceramah-ceramah tokoh agama. “Kita juga melakukan sosialisasi lewat pertunjukan wayang dan seni budaya daerah lainnya”, ujarnya. □

AWG

PSB Kabupaten Banyumas

# Merawat Indonesia dengan Memahami Empat Pilar MPR



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**H**ALAMAN Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada akhir Oktober 2019, dipenuhi oleh ratusan warga dan para pedagang yang datang dari berbagai pelosok Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Mereka berbondong-bondong datang ke lokasi tersebut, karena Jum'at malam (25/10/2019) itu, Sekretariat Jenderal MPR RI bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas menggelar seni budaya tradisional Wayang Kulit semalam suntuk.

Pagelaran Wayang Kulit ini diselenggarakan dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Malam itu, pagelaran seni wayang menampilkan lakon "Mamayu Hayuning Bawana Ambrastha Dur Angkara Murka," dengan dalang Ki Gandhik Wayah Soegino, dan dimeriahkan oleh para sinden yang terdiri dari Agnes, Eni Lestari, dan lawak Bodong.

Selain warga masyarakat pecinta wayang kulit, pagelaran Wayang Kulit ini juga dihadiri oleh para pejabat setempat, antara lain: Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pem-

angunan Kabupaten Banyumas, Edy Prabowo, SH., yang hadir mewakili Bupati Kab. Banyumas. Juga hadir Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, dr. Budi Setiawan; Anggota DPRD, Kapolres, Kapolsek, Dandim, Danramil, dan Camat Sumbang Drs. Nungky Harry Rachmat, M.Si, serta para kepala desa.

Sementara pimpinan MPR RI yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR RI, Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., hadir bersama Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM.; Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan

Informasi Biro Humas MPR, Muhamad Jaya; dan Kepala Bagian Akomodasi dan Angkutan Sesjen MPR, Purwadi.

Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., selaku panitia pelaksana pagelaran seni budaya wayang kulit ini, dalam sambutannya menyatakan, MPR memilih seni budaya sebagai salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR karena di dalam seni budaya tradisional mengandung filosofi yang berisi tuntunan dan panutan, selain sebagai tontonan.

Dalam memasyarakatkan Empat Pilar MPR,





lanjut Siti Fauziah, MPR menggunakan berbagai metode. “Selain sebagai salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar, MPR memilih seni budaya tradisional dengan tujuan, ikut melestarikan seni budaya daerah serta memperkuat rasa gotong-royong sebagai implementasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar MPR yang sudah terbangun selama ini,” kata Siti Fauziah.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Dr. H. Ma’ruf Cahyono, SH., MH., saat menyampaikan sambutannya mengatakan, pagelaran wayang kulit merupakan salah satu metode Sosialisasi Empat Pilar MPR. Di daerah lain, kata Ma’ruf Cahyono, juga diselenggarakan kegiatan serupa tapi disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Ma’ruf Cahyono berharap, dengan sosialisasi Empat Pilar MPR masyarakat bisa mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.

Ma’ruf Cahyono menegaskan, berbicara Indonesia bukan hanya bicara negara tapi juga bicara karakteristik bangsa Indonesia, dan untuk itu mari kita bersama merawat Indonesia dengan memahami Empat Pilar MPR. “Sosialisasi melalui seni wayang ini penting untuk merawat jati diri bangsa serta mengangkat kearifan lokal,” ujarnya.

Selanjutnya, Ma’ruf mengajak para penonton wayang ini untuk sama-sama



mendengarkan petuah Empat Pilar MPR dari Ki Dalang. Apa yang disampaikan oleh Ki Dalang bukan hanya sekedar tontonan, namun harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum menutup sambutannya, Ma’ruf Cahyono membacakan puisi Manifesto Ini Baru Indonesia. “Mari kita saksikan pagelaran wayang kulit ini, terus jaga dan laksanakan nilai-nilai luhur bangsa,” pinta putera Banyumas itu.

Sementara Bupati Banyumas dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Edy Prabowo, SH., menyatakan, sosialisasi

Empat Pilar MPR melalui wayang kulit sangat strategis. Apalagi masyarakat Banyumas sangat menyenangi kesenian wayang. “Mudah-mudahan pagelaran wayang Empat Pilar ini membuat masyarakat Banyumas semakin memahami makna Empat Pilar MPR,” ujarnya.

Pagelaran wayang kulit segera dimulai setelah Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono didampingi Siti Fauziah, Muhamad Jaya, Edy Prabowo, SH., Budi Setiawan dan sejumlah pejabat setempat lainnya menyerahkan secara simbolis tokoh wayang kepada dalang Ki Gandhik Wayah Soegino. □

JAZ



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**Saleh Partaonan Daulay**, Anggota MPR Fraksi PAN

## Kita Kawal Program dan Kebijakan Pemerintah

**S**ETELAH dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada Ahad, 20 Oktober 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin mengumumkan sekaligus melantik para menteri Kabinet Indonesia Maju untuk pemerintahan 2019–2024 pada Rabu pagi, 23 Oktober 2019. Kabinet ini berisi 34 menteri dan 4 jabatan setingkat menteri. Mereka berasal dari kalangan profesional sebanyak 18 orang (53%) dan dari partai politik sebanyak 16 orang (47%). Dalam kabinet ini juga ada enam menteri berlatar belakang militer. Dari 34 menteri tersebut terdiri dari 29 menteri laki-laki dan lima menteri perempuan.

Kabinet Indonesia Maju diwarnai sejumlah nama dan wajah baru, misalnya pengusaha Erick Thohir, praktisi media Wishnutama, pemilik GoJek Nabel Makarim. Tak kalah mengejutkan adalah nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, rival Joko Widodo dalam dua kali Pemilihan Presiden, sebagai Menteri Pertahanan. Setelah menteri Kabinet Indonesia Maju dilantik, Presiden juga mengumumkan dan melantik sebanyak 12 Wakil Menteri pada Jumat siang (25/10/2019) di Istana Negara. Para wakil menteri

ini berasal dari kalangan pengusaha, birokrat, politisi, dan relawan.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menanggapi pengumuman dan pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju ini. Berikut penuturan Sekretaris Fraksi PAN MPR itu beberapa waktu lalu. Petikannya.

**Beberapa hari setelah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan K.H. Ma'ruf Amin sudah mengumumkan dan melantik menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. Apa pendapat Bapak secara umum dengan pembentukan Kabinet Indonesia Maju ini?**

Pertama-tama tentu kita mengucapkan selamat kepada para menteri dan wakil menteri yang akan membantu presiden dalam masa pemerintahan 2019 – 2024. Kita mendoakan supaya kabinet yang sudah terbentuk ini bisa berjalan efektif dan bisa melaksanakan tugas secara maksimal untuk menyejahterakan rakyat. Tetapi, di sisi lain, kita juga berhak untuk menyampaikan penilaian-penilaian dan catatan-catatan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang nanti

diambil pemerintah dan kabinetnya.

**Kalau melihat dari komposisi menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, tampak ada nuansa untuk mengakomodir partai politik pendukung, termasuk memberi kursi menteri kepada Partai Gerindra?**

Saya tidak tahu persis. Presiden yang bisa menjelaskan apa maksud di balik pengangkatan para menteri dan wakil menteri. Kalau kita lihat dari komposisi Kabinet Indonesia Maju ini, para menteri dan wakil menteri memang bukan hanya dari kalangan profesional, tapi juga dari partai politik. Apakah hal itu untuk mengakomodasi partai politik pendukung? Ya jelas. Pasti mengakomodir partai-partai politik pendukung. Tapi, apakah pengangkatan menteri dan wakil menteri dari kalangan partai politik untuk tujuan politis atau untuk tujuan yang lebih strategis? Nah, soal ini kita bisa tanya kepada presiden. Tapi yang jelas, menteri dan wakil menteri memang ada dari kalangan profesional dan ada dari kalangan partai politik.

**Ada juga relawan yang mendapat posisi wakil menteri. Apa tanggapan Bapak?**

Saya tidak mengetahui persis kapasitas

dari relawan itu. Saya hanya kenal namanya saja. Jadi, saya tidak bisa memberikan justifikasi apakah yang bersangkutan bisa bekerja efektif atau tidak sebagai wakil menteri. Yang jelas, presiden pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus untuk mengangkat siapa pun yang dianggap mampu untuk mengemban dan melaksanakan tugas itu.

**Yang cukup menarik dalam kabinet ini adalah masuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana menurut Bapak?**

Itu merupakan hak Pak Prabowo untuk menentukan sikap dan langkah politiknya. Kami yang ada dalam koalisi dengan Pak Prabowo perlu mempertegas bahwa koalisi itu sudah dibubarkan. Pada waktu itu sudah diputuskan bahwa masing-masing partai politik silakan untuk mengambil langkah dan jalannya sendiri. Dan, hari ini kita menyaksikan Partai Gerindra mengambil jalan untuk bergabung dengan pemerintah. Itu adalah hak Partai Gerindra. Kami tidak berhak untuk memberikan penilaian. Selama ini masyarakat yang memberikan mandat kepada partai politik yang dipilihnya. Karena itu, masyarakat juga yang akan menilainya. Kami tidak bisa memberi penilaian. Itu adalah sikap politik Partai Gerindra.

**Juga ada kontroversi tentang posisi Menteri Agama yang dipegang dari kalangan militer. Bagaimana menurut Bapak?**

Ya kita menganggap biasa saja. Bagus kok kalau dipegang oleh militer, dan juga bisa berhasil. Saya contohkan Menteri Agama dari kalangan militer yang saya kenal kinerjanya, yaitu almarhum Tarmizi Taher. Ia dari kalangan militer. Kerjanya bagus. Dia mewariskan program di Kementerian Agama, yaitu Siskohat, sistem komputerisasi haji Indonesia. Siskohat ini dikerjakan pada masa beliau. Sampai sekarang pun Siskohat masih dipakai.

Jadi, kementerian itu sebetulnya tergantung orangnya. Kementerian Agama bukan soal pemahaman keagamaan tapi soal manajemen, yaitu bagaimana mengatur birokrasi di Kementerian Agama. Kementerian Agama bukan kementerian kiai dan ulama, tapi mengatur bagaimana proses pelaksanaan kebebasan menjalankan agama di Indonesia. Karena itu, tidak masalah

Menteri Agama dari kalangan militer.

**Bagaimana dengan jumlah wakil menteri yang relatif cukup banyak, yaitu 12 wakil menteri berasal dari partai politik, profesional, dan juga relawan?**

Saya melihat pelantikan wakil menteri ini masih menimbulkan atau menyisakan tanda tanya. Kenapa? Karena ketika dilantik pada Ahad 20 Oktober 2019, Presiden mengatakan akan melakukan reformasi birokrasi, yaitu memangkas eselon III dan eselon IV, dan hanya menyisakan eselon I dan II. Menurut saya, langkah ini luar biasa. Kalau pemangkasan itu dilakukan merupakan sebuah terobosan besar dalam birokrasi. Ini merupakan langkah yang progresif dan perlu dicoba.



Tapi, di sisi lain, kita mengetahui ada 12 wakil menteri yang dilantik. Pertanyaannya, apakah pelantikan wakil menteri sebanyak itu tidak bertentangan atau kontradiktif dengan gagasan presiden untuk memangkas birokrasi di pemerintahan?

Selain itu, setiap kementerian dan lembaga tentu ada Dirjen dan Deputi. Dirjen dan Deputi ini menangani masalah yang khusus dan spesifik. Misalnya, di Kementerian Kesehatan ada Dirjen Yankes, yaitu pelayanan kesehatan yang mengurus rumah sakit-rumah sakit di Indonesia. Tugas Dirjen sudah jelas. Para Dirjen ini membantu menteri. Artinya, sudah ada yang membantu menteri di kementerian. Nah, sekarang ditambah dengan wakil menteri yang tugasnya juga membantu menteri. Lalu bagaimana job descriptionnya? Apakah wakil menteri hanya untuk tugas seremonial misalnya

membuka pelatihan, rapat, dan sebagainya, atau juga bisa mengeksekusi program?

Persoalan lain, dalam pembahasan anggaran untuk APBN tahun 2020, saya tidak menemukan nomenklatur anggaran untuk wakil menteri. Jadi, tidak ada anggaran untuk wakil menteri. Pertanyaannya, anggaran untuk wakil menteri diambil dari mana?

**Apakah keberadaan wakil menteri bisa menimbulkan “matahari kembar” di kementerian?**

Saya kira tidak. Wakil menteri sudah pasti otoritasnya di bawah menteri. Wakil menteri akan ikut menteri. Kalau pun ada perbedaan antara menteri dan wakil menteri, pasti akan diselesaikan di internal. Cuma saya tidak tahu apakah wakil menteri bisa

langsung bekerjasama dengan para Dirjen di kementerian. Para Dirjen adalah pejabat karir yang sudah 25 – 30 tahun di kementerian, tiba-tiba ada orang dari luar yang masuk dan menjadi pengambil kebijakan nomor dua setelah menteri. Karena itu memang jabatan status wakil menteri ini kelihatannya politis bukan birokratis.

**Bagaimana dengan partai politik di luar pemerintahan?**

Meski di luar pemerintahan bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita akan ikut mengawal kebijakan pemerintah yang baik dan pro rakyat. Pada sisi lain, jika memang ada program atau kebijakan yang kita lihat tidak mengarah pada kepentingan masyarakat, tentu kita dengan tegas akan memberikan masukan, kritik, dan saran kepada pemerintah supaya check and balance bisa terjaga. □

Tigor Simanjuntak, S.Pd.

## Balada **Seorang Guru** di Daerah Terpencil

**G**URU adalah profesi mulia. Berkat profesi ini, anak-anak di seluruh jagad raya ini bisa membaca, menulis, dan tentunya dapat mengenali dunia. Tugas guru membina dan membimbing murid-muridnya agar tumbuh dan berkembang untuk mencapai cita-cita. Demikian besar peran seorang guru, sampai-sampai ada istilah “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.”

Banyak kisah yang menggambarkan betapa beratnya perjuangan guru dalam

terganggu mendengar suara debur ombak yang sangat keras. Saking kerasnya, suara debur ombak itu selalu membangunkan lelap tidurnya di tengah malam.

“Saat itu saya merasa menderita sekali. Soalnya sebelumnya saya tidak pernah tinggal di tepi laut, tapi tiba-tiba harus hidup di dekat pantai yang suara ombak dan anginnya sangat kencang. Saat itu, benar-benar menjadi masa adaptasi yang sangat berat,” cerita Tigor Simanjuntak kepada

Tidak ada yang bisa diperbuat oleh pihak sekolah, selain berharap bantuan pemerintah segera datang, agar kelas yang rusak bisa dibangun kembali atau direnovasi. Sayangnya, harapan yang ditunggu-tunggu itu tak kunjung tiba. Bahkan, pada 2010 tsunami kembali menerjang Mentawai, akibatnya beberapa kelas di SMA Negeri I Siberut Selatan yang sebelumnya selamat dari tsunami Aceh, kali ini ikut mengalami kerusakan.

Akibat dua kali diterjang tsunami itu, SMA



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

mengentaskan kebodohan murid-muridnya. Salah satunya adalah perjuangan Tigor Simanjuntak, S.Pd., salah seorang guru yang mengabdikan diri di daerah terdepan, atau daerah terpencil dan terluar di kawasan Indonesia. Tepatnya, guru di SMA Negeri I Siberut Selatan, Kabupaten Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.

Tigor pertama kali menapakkan kakinya di Mentawai pada 2006. Pekan pertama tinggal di sana, Tigor merasakan sangat berat. Bagaimana tidak, setiap malam, pria kelahiran Tapanuli Utara, 6 April 1972, itu nyaris tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ia sangat

Majalah *Majelis* saat mengikuti pemilihan guru SMA berdedikasi di daerah terdepan, terluar, dan terpencil, beberapa waktu lalu.

Selain persoalan adaptasi, Tigor juga harus menghadapi kenyataan soal keterbatasan sarana prasarana belajar mengajar. Saat itu di 2006, SMA Negeri I Siberut Selatan belum lepas dari pengaruh tsunami Aceh yang terjadi pada 2004. Kala itu, beberapa ruang belajar mengalami kerusakan diterjang tsunami. Akibatnya, hanya sebagian ruang saja yang bisa digunakan, dan keadaan itu memaksa para siswa belajar bergantian.

Negeri I Siberut Selatan benar-benar hancur berantakan. Bangunan sekolah rata dengan tanah. Para siswa terpaksa belajar di dalam tenda-tenda yang tidak dipakai lagi oleh para pengungsi, dan itu berlangsung hingga 2012, saat pemerintah membangun kembali gedung SMA Negeri I Siberut Selatan.

“Sebagai sekolah di daerah terpencil, kami terbiasa menerima kondisi yang tidak sempurna. Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal biasa. Menghadapi kondisi itu, kami tak boleh patah arang dan berusaha untuk terus semangat dalam kegiatan belajar mengajar,” ungkap Tigor.

Selain masalah sarana dan prasarana, Tigor juga merasakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk bersekolah. Akibatnya, banyak siswa-siswi putus sekolah, dan gagal merampungkan pendidikan. Selain itu, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat membuat para orangtua kurang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya.

“Mengajar di daerah terdepan, benar-benar tantangan yang tidak mudah, apalagi di sana juga banyak murid yang nakal. Malas belajar dan suka merokok,” kata Tigor.

### **Belajar Menanam Cabai**

Persoalan lain yang menghantui Tigor yang mengabdikan sebagai guru di Mentawai adalah tingginya biaya hidup. Maklum, hampir semua kebutuhan pokok di daerah itu harus didatangkan dari Padang. Padahal, ombak dan angin di sana tak menentu. Akibatnya, harga sejumlah komoditas kerap mengalami kenaikan, lantaran stoknya di pasaran sudah menipis. Harga cabai dan tomat misalnya, kerap tembus mencapai Rp100 ribu perkilo.

Kondisi tersebut terasa semakin sulit ketika tunjangan guru di daerah terdepan, terluar, dan terpencil, ditiadakan sejak 2017. Praktis, ia hanya mengandalkan gaji dan dana sertifikasi yang diterima setiap tiga bulan sekali. Untuk menghadapi persoalan tersebut, Tigor berusaha menanam pohon cabai, tomat, dan sayur mayur sendiri. Usaha ini juga dilakukan untuk memberi contoh kepada para siswa dan tetangga. Semua itu dilakukan secara otodidak, karena sesungguhnya Tigor tidak mahir bercocok tanam.

“Minimal saya bisa membuktikan, sesungguhnya kita bisa tanam sendiri, tidak selalu tergantung pada kiriman dari Padang.



Selain itu, kalau kita mau menanam ternyata lumayan juga. Bisa menghemat banyak, minimal memenuhi sendiri kebutuhan akan cabai, tomat, dan sayur mayur,” kata Tigor lagi.

Meski harus menjalani tugasnya dengan berbagai kendala, tapi Tigor tidak pernah menyesal menjadi guru. Apalagi, sejak remaja, sewaktu masih duduk di bangku SLTP, ia sudah bercita-cita menjadi guru. Alasannya, karena guru adalah profesi yang mulia, mencerdaskan para siswa. Keinginan tersebut semakin akan menjadi kenyataan saat ia diterima di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Medan.

Lulus dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Tigor diminta mengajar di almamaternya sewaktu SLTA, yaitu SMEA Dharma Bhakti Siborong Borong, Tapanuli Utara, dari 1998-2002. Tahun 2003-2005, karena alasan menikah dengan perempuan Medan, Tigor pun pindah ke SMA Nasrani Medan.

Di Medan, Tigor merasakan kehidupan sangat keras, termasuk dunia pendidikan. Di SMA Nasrani ini Tigor beberapa kali mendapat tantangan berkelahi dari murid-muridnya. Apalagi saat itu ia mendapat tugas khusus menangani anak-anak nakal. Sehingga ia terkenal dan terbiasa menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh murid-muridnya.

Karena terdorong keinginan menjadi Aparatur Sipil Negara, Tigor pun ikut tes PNS di Mentawai dan diterima mengajar di SMA Negeri I Siberut Selatan.

“Kebiasaan menghadapi murid nakal membuat saya selalu menanamkan kedisiplinan dan ketegasan tinggi. Dan, itu sempat terbawa hingga saya mengajar di Mentawai. Namun, saya segera sadar, saat ini sudah bukan zamannya hukuman fisik, seperti yang saya temukan di Medan,” katanya. □

MBO

## Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin Diliput Ribuan Media Nasional dan Internasional

**P**ELANTIKAN Presiden RI Jokowi dan Wapres RI Ma'ruf Amin masa jabatan 2019-2024 yang digelar dalam Sidang Paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Ahad (20/10/2019) menarik perhatian ribuan awak media dari berbagai media massa cetak, online, dan elektronik, baik nasional maupun internasional.

Di antara ribuan wartawan dari berbagai media nasional dan internasional tersebut tercatat ABC-Australia, Nine Network, Xinhua News Agency China, Sydney Morning Herald, Radio Television Brunei, The Yomiuri Shimbun Japan, Radio Television Malaysia, Media Corp. Singapore, dan ratusan wartawan dari dalam negeri.

Para wartawan nasional dan internasional ini beberapa jam sebelum acara dimulai sudah menempati posisi yang cukup strategis di area depan dan samping Gedung Nusantara. Mereka sangat tertib dan mengikuti semua aturan dan prosedur yang ditentukan. Meski mereka kadang berebutan mewawancarai narasumber, namun mereka tetap tertib.

Antusiasme ribuan media massa dalam dan luar negeri ini tidak lepas dari peran Bagian Pemberitaan Biro Humas Setjen MPR RI dalam mengakomodir keperluan para peliput dalam peliputan acara



yang istimewa tersebut. Pelayanan untuk para wartawan sudah dimulai dari pembukaan registrasi peliputan secara online dan puncaknya penyerahan Id Card khusus pers sehari sebelum acara pelantikan. □

DER



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

## Kebudayaan Betawi Hadir di Acara Welcoming Event For Parliament Members

**P**LAZA Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat (10 dan 11 Oktober 2019) ramai digelar acara Welcoming Event For Parliament Members bertema 'Gebyar Budaya Betawi dan Sisi Lain Jakarta'.

Acara yang digagas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta didukung Lembaga MPR, DPR dan DPD ini, selain menampilkan berbagai kekhasan kebudayaan Betawi seperti seni tari Betawi, kuliner khas Betawi, seni musik khas Betawi, dan busana khas Betawi.

Selain itu, dalam acara itu juga ditampilkan 'Sisi Lain Jakarta' dalam bingkai pameran/workshop fotografi, lomba foto, demo membuat, demo menyulam, demo membuat boneka, fashion show, pertunjukan tari kolosal anak, dan parade busana 34 provinsi.

Seremoni peresmian dan pembukaan acara yang digelar di panggung utama, Plaza Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen,

Jakarta, Kamis (10/10/2019). Acara ini dihadiri Pimpinan DPD RI, Kepala Biro Humas Setjen MPR RI Siti Fauziah mewakili MPR RI dan perwakilan DPR RI, serta dihadiri juga oleh ratusan pengunjung dari berbagai elemen masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah menyampaikan apresiasi atas nama pribadi dan juga atas nama MPR atas terselenggaranya acara tersebut di lingkungan parlemen. "Saya sangat mendukung upaya pelestarian budaya, seperti acara ini, sebab kebudayaan Indonesia adalah kekayaan bangsa yang harus mendapat perhatian serius agar generasi muda tak kehilangan kebudayaannya sendiri," kata Siti Fauziah.

Acara ini, menurut Siti Fauziah, luar biasa karena sebagian besar pesertanya dan pelakunya adalah anak-anak muda. "Saya salut," katanya. □

DER



## Purwadi Menyaksikan Langsung 10 Kali Pelantikan Presiden



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

**P**ELANTIKAN Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang berlangsung 20 Oktober 2019 sudah dapat dipastikan adalah prosesi peralihan kekuasaan, Presiden dan Wakil Presiden, terakhir yang disaksikan langsung oleh Drs. Purwadi. Soalnya, akhir Oktober 2019 ini, pria asal Purworejo, Jawa Tengah, ini akan mengakhiri masa baktinya sebagai Apartur Sipil Negara (ASN) di lembaga negara yang memiliki fungsi tertinggi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), ini.

Pria yang hampir setiap hari mengenakan blangkon – karena Purwadi memang penggemar kesenian tradisional, wayang – adalah salah satu karyawan MPR yang dapat menyaksikan peristiwa penting secara langsung setiap lima tahun sekali itu, kecuali bila terjadi pergantian Presiden di tengah masa jabatan. Kalau dihitung-hitung, sejak Purwadi tercatat sebagai karyawan MPR pada 1 Maret 1982, dia telah menyaksikan 10 kali prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, termasuk yang terakhir 20 Oktober lalu.

“Selama menjadi pegawai MPR, saya mengikuti dan ikut melayani pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak sepuluh kali,” tutur Purwadi, yang kini menjabat Kepala Bagian Akomodasi dan Angkutan, Biro Umum, Setjen MPR RI. Pak Pur, begitu dia biasa disapa, menyaksikan tiga kali pelantikan Presiden Soeharto, yaitu pada 1983, 1988, 1993, dan 1998. Tapi, pada 1998, terjadi tuntutan reformasi yang menyebabkan Presiden Soeharto menyatakan lengser keprabon, dan diganti Wakil Presiden Baharudin Jusuf (BJ) Habibie. “Pada saat pelantikan Presiden Habibie saya tidak ikut melayani dan mengikuti, karena upacaranya berlangsung di Istana Negara,” ujar pria penggemar wayang kulit ini.

Masa jabatan BJ. Habibie hanya berlangsung singkat, dan pada 1999 MPR memilih dan menetapkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia ke-empat. Lalu, pada 2001 terjadi impeachment

terhadap Presiden Abdurrahman Wahid yang menyebabkan dia harus turun, dan penggantinya adalah Megawati Soekarnoputri yang waktu itu Wakil Presiden. Dan, sampai di sini peran MPR RI sebagai lembaga tertinggi berakhir, dan selanjutnya MPR berubah menjadi lembaga negara, setara dengan lembaga negara lainnya.

Sebagai lembaga negara, pada 2004, MPR melantik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden hasil pilihan langsung oleh rakyat. Lima tahun kemudian, 2009, SBY kembali dilantik menjadi Presiden bersama Wakil Presiden Budiono. Masa jabatan SBY yang kedua berakhir pada 2014, dan terpilih sebagai presiden/wakil presiden pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dan, 2019, Joko Widodo kembali dilantik menjadi Presiden berpasangan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Itulah pengalaman yang sulit dilupakan oleh seorang Purwadi. Sampai waktunya pensiun, 31 Oktober 2019, Purwadi telah mengabdikan selama 37 tahun, 8 bulan. “Mungkin ini *record* terlama sebagai pegawai,” ujarnya. Selama mengabdikan sekian tahun di MPR, Purwadi pernah menduduki jabatan Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga, dan Layanan Informasi, Biro Humas; Kepala Sekretarian Wakil Ketua MPR, dan terakhir sampai pensiun menjabat Kepala Bagian Akomodasi dan Angkutan.

Dari sekian banyak melayani dan mengikuti prosesi pelantikan Presiden di MPR, menurut Purwadi, pelantikan Presiden Joko Widodo yang kedua kali ini yang paling sibuk. “Pelantikan Presiden sebelumnya sibuk, namun yang ini paling sibuk”, tutur Purwadi saat ditemui di Gedung Bharana, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. “Dari segi pengamanan kali ini paling ketat, bahkan super ketat”, tambahnya.

Ketika ditanya tentang kesannya selama melayani dan mengikuti proses pelantikan Presiden, Purwadi menyatakan, pelantikan Presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya ini adalah yang paling berkesan. “Pelantikan Presiden sebelumnya berkesan, namun kali ini paling berkesan”, ucapnya. Alasannya, “karena antusiasme dari kepala-kepala negara dan kepala-kepala pemerintahan negara sahabat hadir saat pelantikan”, ungkap Purwadi.

Purwadi juga menilai dari sisi kharisma setiap Presiden Indonesia yang dilantik. “Sebagai orang Jawa, saya menganggap setiap Presiden mendapat *pulung wahyu keprabon*”, tuturnya. *Pulung* inilah, menurut Purwadi, membuat siapapun yang terpilih menjadi Presiden tampak berwibawa. Kewibawaan tidak harus ditunjukkan dengan tampang yang garang, namun bisa ditunjukkan dengan cara kepemimpinannya, sehingga rakyat bisa merasakan atau melihat ia memang pantas menjadi Presiden. “Semua Presiden mempunyai kharisma, ada rasa yang agung”, ungkap Purwadi.

Sebelum meninggalkan Senayan, untuk selanjutnya menikmati pensiun, Purwadi berpesan kepada generasi penerus, junior-junior, agar selalu mengedepankan kedisiplinan, mengutamakan pelayanan, jangan menuntut hak dulu tetapi jalankan kewajiban lebih awal. “Saya merasa prihatin dengan kondisi anak-anak muda sekarang, dari segi kedisiplinan masih kurang,” ujarnya. Ia lalu membandingkan dengan generasi dirinya di mana dedikasi pegawai luar biasa. “Saya mengharap, generasi berikutnya tunjukkanlah dedikasi, disiplin, mengutamakan kewajiban, baru menuntut hak,” begitu pesan Pak Purwadi. □

AWG

## Saya Bersyukur *Diberi Amanah*



**Mulan Jameela**

**S**EJUMLAH artis mewarnai acara Pelantikan Anggota DPR Periode 2019-2024 yang digelar Selasa, 1 Oktober 2019, di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Di antara para artis itu tercatat sejumlah wajah baru sebagai anggota DPR/MPR, salah satunya adalah **Mulan Jameela**. Artis yang bernama lengkap Raden Terry Tantri Wulansari itu berasal dari Fraksi Partai Gerindra daerah pemilihan Jawa Barat XI.

Istri pentolan grup band “Dewa 19,” Ahmad Dhani, ini tampil dalam acara Pelantikan Anggota DPR/MPR itu memakai gaun Bodo, pakaian adat Bugis, yang dikombinasikan dengan hijab yang telah dimodifikasi oleh desainer Didiet Maulana. “Saya bersyukur diberi amanah sebagai wakil rakyat,” kata artis yang pernah menjadi salah seorang personil grup penyanyi “Ratu” ini.

Sebagai anggota DPR, Mulan menyatakan, ingin ditempatkan di Komisi X yang membidangi pendidikan. Alasannya, karena masih banyak rakyat Indonesia membutuhkan perhatian, terutama soal pendidikan dan kesehatan. “Tapi, saya siap ditempatkan di mana (komisi) saja,” kata Mulan seraya memohon doa dari rakyat agar dia mampu menjalankan amanah. □

DER

# Suara Rakyat Tak Boleh Dipinggirkan

**T**OMMY Kurniawan, 35 tahun, termasuk salah seorang artis melenggang ke Senayan, dan dilantik menjadi Anggota DPR/MPR pada 1 Oktober lalu di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Tommy Kurniawan tergabung dalam Fraksi Partai Kebangkita Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan Jawa Barat V.

Aktor kelahiran Jakarta yang mengawali karir keartisannya lewat pemilihan Top Model Cardinal 2000 dan berhasil meraih juara kedua ini menyatakan, akan serius menjalankan amanah sebagai anggota parlemen. Alasannya, "Suara rakyat tidak boleh dipinggirkan, karena suara mereka membuat para wakil rakyat bisa melenggang ke Senayan. Jadi, sekuat tenaga harus memprioritaskan kepentingan daripada kepentingan pribadi," ungkap Tommy Kurniawan.

Sebagai anggota baru DPR/MPR, Tommy berusaha untuk mempelajari apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban anggota dewan. "Saya akan gerak cepat mempelajari tugas-tugas sebagai anggota dewan sesuai UU dan Tata Tertib yang ada. Juga segera membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat tentang apa-apa yang dibutuhkan masyarakat," katanya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

*Tommy Kurniawan*



*Krisdayanti*

## Akan Perjuangkan UU Pro Rakyat

**M**ENGAWALI profesi artis penyanyi dari festival Asia Bagus di Jepang pada 1992. Karirnya di bidang tarik suara ini terus melejit hingga kemudian dinobatkan sebagai salah seorang Diva Indonesia. Itulah **Krisdayanti**, yang kini mulai menapaki profesi sebagai Anggota DPR/MPR Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Timur V.

Ketika hadir pada pelantikan Anggota DPR/MPR masa bakti 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, pelantun lagu "Menghitung Hari" ini mengenakan kebaya berwarna merah dipadukan dengan (bawahan) jarit batik berwarna coklat dan selendang yang warnanya senada dengan bawahan disampirkan di pundak.

Sebagai wakil rakyat, Krisdayanti berjanji akan menjalankan amanah dan akan fokus untuk memperjuangkan Undang-undang yang berpihak kepada rakyat. "Intinya kan berjuang untuk rakyat," ungkap Krisdayanti. Jadi, jelas Krisdayanti, Undang-undang pro rakyat mesti juga melibatkan rakyat, dan mengajak berdialog dengan semua pihak. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

## Menikmati Senja di Kota Tua

**C**ERITA tentang kekejaman kaum penjajah, dan heroisme para pejuang Indonesia tidak hanya terpahat di batu nisan pemakaman, namun juga tersimpan di kota-kota tua. Bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang telah menjajah Indonesia selama 3,5 abad lamanya banyak terdapat kota-kota tua di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kawasan Kota Tua yang terletak di kawasan Jakarta Barat.

Sayangnya, tidak banyak bangunan tua bersejarah peninggalan Belanda terawat dengan baik. Kebanyakan mulai usang dan rusak dimakan usia. Hanya beberapa saja yang masih dirawat dengan baik oleh pemerintah daerah. Padahal, seperti Kota Tua di Jakarta, kawasan bersejarah peninggalan Belanda yang satu ini dapat disulap menjadi kawasan wisata yang tentunya juga bisa memberikan penghasilan bagi rakyat banyak.

Kota Tua Jakarta memang memiliki sisi-sisi yang menarik. Di sini tersimpan cerita tentang kekejaman kaum penjajah dan heroisme kaum pejuang. Kawasan Kota Tua Jakarta ini banyak dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat. Mereka bukan hanya mempelajari sejarah bangsa Indonesia di bawah pemerintah kolonialisme, tetapi juga

menikmati suasana di sana. Khususnya suasana saat senja tiba, atau saat sore berganti malam.

Menikmati senja di Kota Tua Jakarta tak ubahnya seperti melewati sore di Negeri Kincir Angin Belanda. Bangunan tua peninggalan penjajah Belanda yang masih terawat dengan apik, tentu menjadi sebab munculnya rasa seolah-olah sedang berada di Negeri Belanda. Apalagi, lingkungan sekitarnya pun sangat mendukung terciptanya suasana seperti di Eropa.

Begitulah kesan yang didapat Majalah *Majelis* saat berkunjung ke kawasan Kota Tua Jakarta Barat, Ahad sore (27/10). Pada hari libur, kawasan Kota Tua ini terasa beda dibanding hari biasa. Pada Sabtu dan Ahad, para pedagang menjajakan dagangannya berjejer di sepanjang trotoar, mulai dari depan Stasiun Kota hingga tepat di samping Balai Kota Batavia, dan juga kantor Gubernur Jenderal VOC (kini museum Fatahillah). Berbagai barang dagangan dijajakan, seperti aksesoris HP, kaos, sandal, dan sepatu, hingga beragam kuliner.

Menariknya, di depan pelataran Museum Fatahillah berkumpul ribuan orang menikmati waktu libur dengan berasyik-masyik

bermain bersama anggota keluarga dan kerabatnya. Ada yang hanya duduk-duduk saja sembari menikmati makanan kecil. Ada pula yang bersepeda onthel sembari mengenakan atribut topi kompeni atau topi nona-nona Belanda. Warna-warni yang meriah, baik pada topi maupun sepeda, mengesankan keceriaan penumpangnya.

"Duapuluh ribu Pak, untuk setengah jam pemakaian," kata Handoko kepada Majalah *Majelis* yang mendekat untuk melihat beberapa sepeda onthel warna-warni yang terparkir di salah satu sisi kawasan pelataran Museum Fatahillah tersebut.

Handoko lantas menuturkan, pendapatannya sebagai salah satu dari 36 orang penyedia sepeda cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pada Sabtu dan Ahad sepedanya nyaris tak pernah beristirahat. Dari jam 06.00 WIB hingga 18.00 WIB ada saja yang sewa. Sedangkan hari-hari biasa, tetap ada yang menyewa meski tidak sebanyak pada hari libur.

Rental sepeda di kawasan Museum Fatahillah itu mulai ada sejak sekitar 2007 dan dikelola oleh Komunitas Sepeda Onthel Kota Tua. Anggota komunitas berasal dari berbagai profesi, ada mantan juru parkir, pedagang, dan



ojek sepeda di sekitar stasiun kota. Masing-masing anggota hanya boleh menyediakan tiga buah sepeda onthel. Selain sepeda, para penyewa juga mendapat fasilitas topi, dan layanan kesehatan jika terjadi kecelakaan.

### Radio Tabung

Selain berkeliling menggunakan sepeda onthel warna-warni, menikmati senja di Kota Tua Jakarta Barat juga bisa dilakukan sembari mengunjungi beberapa cafe, di sekitar Museum Fatahillah. Cafe-cafe ini menyediakan tempat duduk, baik di dalam maupun di luar ruangan. Harga makanan dan minuman di tempat ini masih cukup terjangkau. Konsumen tidak perlu takut kemahalan, karena daftar menu yang ada sudah mencantumkan harga setiap item makan.

Menikmati senja di Kota Tua sembari kongkow di cafe-cafe ini memberikan ke-

nangan tersendiri. Karena bangunan furniture, dan perlengkapan di dalamnya menampilkan kesan kuno. Misalnya saja radio tabung, mesin ketik kuno, dan mobil-mobil tua. Selain itu ada juga kursi dan meja-meja zaman dahulu, dan sudah tidak diproduksi lagi.

Sembari menikmati hidangan, pengunjung juga bisa menyaksikan pengunjung lalu lalang dengan berbagai aktivitasnya. Ada seniman jalanan dengan berbagai alat musik nan unik. Lainnya, ada segerombolan burung dara yang turun naik dengan bebasnya. Dan ada pula pria wanita yang sedang berasyik masyik dengan pasangannya.

Bagi para pemburu foto selfie, kawasan Kota Tua Jakarta adalah surga yang menyediakan spot-spot foto unik. Berbagai karakter bisa ditemukan di sini. Mulai dari pesulap, para pejuang, nona belanda, mobil tua, hingga foto-foto berlatar belakang

bangunan tua.

Tidak hanya sampai di situ, semakin sore tampak sejumlah orang menawarkan ramalan nasib berdasarkan garis tangan. Mereka ini duduk beralaskan tikar dikelilingi berbagai peralatan yang berbau magis. Dengan senyum yang ramah dan penuh kesabaran, para peramal itu memberikan jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi konsumennya. Baik persoalan asmara, rumah tangga, perkawanan hingga dunia usaha.

Bagi anak-anak muda yang tengah mencari identitas diri, kawasan Kota Tua juga menawarkan seni pembuatan tatto. Ada beberapa seniman tatto yang tampak tengah menunggu konsumennya. Sembari memainkan gadgetnya, para seniman tatto itu bercanda mengusir sepi menanti datangnya konsumen.

Dan, saat senja berlalu, gelap perlahan datang, dan pada saat itulah suasana di Kota Tua ikut berubah. Secara tiba-tiba muncul ratusan pedagang kaki lima membuka dagangannya. Mereka menempati lapak-lapak di teras bangunan yang ada di sana. Bermodalkan pencahayaan yang terbatas, dari lampu-lampu emergency, para pedagang kaki lima itu berburu dengan waktu menunggu para pembeli mampir sebelum malam makin larut. □

MBO

Hillary Brigitta Lasut

# “Anak Kecil” di Kancah Politik Nasional



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

**S**EBELUM Sidang Paripurna MPR, namanya disebut sebagai anggota MPR termuda yang akan memimpin Sidang Paripurna MPR bersama anggota tertua dari DPD pada Sidang Awal Masa Jabatan MPR periode 2019 – 2024 pada 1 Oktober 2019. Ketika memimpin sidang paripurna, Hillary Brigitta Lasut, anggota MPR termuda dari Partai Nasdem yang dimaksud, tampil mempesona. Seluruh mata peserta sidang tertuju pada wanita muda berparas cantik ini. Sejak itulah Hillary Brigitta Lasut mulai mencuri perhatian banyak orang. Popularitas wanita kelahiran Manado, 22 Mei 1996, langsung melejit. Berbagai media, baik online, cetak, dan elektronik, memburunya untuk sekadar wawancara dan ingin mengupas lebih banyak sosok Hillary.

Sejak dilantik sebagai anggota MPR dan DPR pada 1 Oktober 2019, sudah tak terhitung media massa mewawancarai Hillary. Wawancara tak sebatas wawasannya sebagai politisi, pemikiran dan pendapatnya tentang berbagai isu politik nasional, tapi juga mengulik perjalanan hidup dan sisi-sisi pribadi seorang anggota parlemen yang bernama Hillary. Dia juga beberapa kali tampil dalam acara talkshow di stasiun televisi. Dan, lengkap sudah Hillary kini menjelma sebagai publik figur.

Begitulah perubahan jalan hidup anggota DPR berusia 23 tahun dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara ini. Padahal, sebelum terpilih menjadi anggota dewan, Hillary sama seperti gadis-gadis lain seusianya. Tapi setelah menjadi anggota dewan dan tampil memimpin sidang paripurna, Hillary langsung menjadi sorotan dan perhatian publik, tentunya juga di kalangan para politisi dan masuk dalam kancah politik nasional.

Tak berlebihan, Hillary memang memiliki banyak pesona yang membuatnya menjadi incaran para jurnalis dan media. Bukan semata keberhasilan lolos ke Senayan sebagai anggota termuda, tapi paras cantiknya menjadi daya tarik tersendiri. Ditambah masih dalam usia muda Hillary bisa dikatakan memiliki kekayaan berlimpah. Kekayaannya mencapai Rp 9,1 miliar. Tapi, bak panggung sandiwara, perjalanan hidup Hillary juga berliku. Ada cerita sedih, teraniaya, heroism, dan juga bahagia.

“Papa saya sempat terjerat tindak pidana korupsi. Itu membuat keluarga kami terpuruk. Saya dibilang anak koruptor, anak maling serta pencuri. Cacian seperti itu, terus terang, saya terima bertahun-tahun lamanya. Bahkan, jelang pemilihan legislatif lalu, ada beberapa orang yang kembali meniupkan kabar tersebut sebagai salah satu bentuk *black campaign* dengan maksud menjegal saya menuju Senayan,” tuturnya kepada *Majelis* yang mewawancarai di ruang kerjanya, Gedung Nusantara I Lantai 23 Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Caci maki dan *bullying* itu sempat membuat puteri pasangan Elly Engelbert dan Telly Tjunggulung ini merasa tertekan. Ia juga tersisih dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Bukan itu saja, ketika cacian tersebut kembali muncul, dan menjadi sarana kampanye hitam jelang Pileg, Hillary nyaris putus asa. Ia merasa tak akan terpilih sebagai anggota DPR. Apalagi, ia juga tidak memiliki modal finansial sebesar para calon legislatif yang menjadi pesaing di Dapilnya.

“Modal saya hanya nebeng ke partai dan medsos. Saya beli bawang di pasar lalu di-*upload* di medsos. Sementara caleg lain di



Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara, terdiri dari tokoh-tokoh besar. Di Dapil saya ada tiga jenderal, lima incumbent, tiga mantan bupati, dua calon bupati, dan orang-orang berduit lainnya. Karena itu banyak yang pesimis saya akan berhasil lolos ke Senayan,” kata Hillary.

Tetapi Hillary bukanlah sosok yang gampang menyerah. Dia sudah membuktikan tetap bergeming ketika diteriaki sebagai anak maling. Karena itu, kerasnya persaingan memperebutkan kursi di Senayan, tak membuat ia berhenti berusaha. Hillary terus bekerja keras mewujudkan keinginannya menjadi salah satu wakil rakyat di DPR RI.

Seperti gayung bersambut. Upaya tersebut, menurut Hillary, seiring dengan harapan masyarakat Sulawesi Utara menghendaki adanya perubahan. Karena itu, akhirnya dia terpilih sebagai wakil rakyat dari Dapil Sulawesi Utara. Padahal, banyak kalangan yang sebelumnya memandang Hillary dengan sebelah mata. Selain dianggap masih kecil dan belum berpengalaman, Hillary juga memiliki orangtua yang bermasalah dengan kasus korupsi.

### Tidur di Barak

Sebagai perempuan muda di kancah politik, Hillary sudah mulai merasakan banyak perubahan. Belum genap 100 hari menjadi anggota legislatif, Hillary merasakan adanya perubahan itu. Waktunya tersita untuk tugas sebagai anggota parlemen. Kini, waktu untuk bertemu dengan teman dan sahabat berkurang drastis. Bahkan, untuk sekedar menjawab atau membalas pesan elektronik dari teman dan kerabatnya pun, Hillary tidak lagi secepat dulu.

Selain itu, Hillary merasa pandangan masyarakat terhadap dirinya juga sudah berubah. Masyarakat menganggap ia banyak mengetahui persoalan dan jalan keluarnya. Meski sesungguhnya anggapan tersebut tidak benar seluruhnya.

“Saya sadar semua ini adalah risiko yang harus saya terima sebagai anggota legislatif. Bagi saya, inilah waktunya bekerja keras untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang penting orangtua saya mendukung, apalagi mereka tahu saya tengah bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.

Hillary sendiri sesungguhnya tidak pernah bercita-cita menjadi seorang politisi. Salah satu cita-cita yang sempat muncul dalam benaknya adalah menjadi ahli hukum. Karena itu, setelah tamat dari SMA Negeri 1 Manado, Hillary tak menyiakan-nyiakan kesempatan mendapatkan beasiswa dari sebuah perusahaan swasta. Beasiswa itu untuk mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

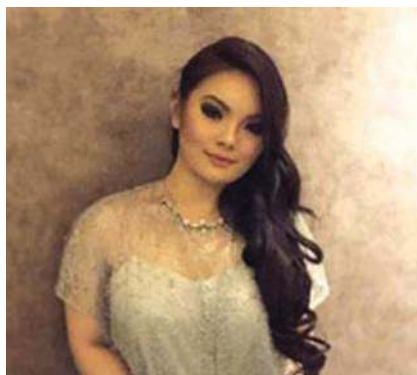


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pelita Harapan (UPH). Setelah menyelesaikan gelar sarjana dari UPH, Hillary melanjutkan studi mengambil master Hukum Internasional di Washington University. Dan, saat ini ia tengah mengikuti program doktor di Universitas Pelita Harapan.

“Tahun 2017 kampus saya mengadakan study tour di DPR, saya sempat berfoto-foto di Gedung Kura-Kura. Saat itu hati kecil saya bicara, satu saat nanti saya akan duduk dan berada di sini. Dan, itu menjadi kenyataan tahun 2019 ini,” kata Hillary lagi

Dalam usia yang relatif masih muda, Hillary sudah ditempa berbagai pengalaman berorganisasi. Ketika di SMA Negeri 1 Manado, ia sudah menjadi Ketua OSIS. Pada saat menjabat Ketua OSIS, ia aktif menggelar diskusi dan mengampanyekan anti narkoba. Saat itu Hillary juga berkesempatan menjadi anggota Paskibra Kota Manado sebagai pembawa bendera. Selama mengikuti training Paskibra, ia harus rela tidur di barak dengan peserta lain dan sejumlah anggota







TNI. “Saya mendapat pengalaman banyak selama ikut Paskibra. Bersama anggota lainnya digembleng dengan pengetahuan bela negara dan Empat Pilar MPR, termasuk jiwa korsia,” ucapnya.

Selain itu, selama di Manado Hillary pernah menjadi peserta *Bunaken Teen Idol* (2009), *Leadership Booth Camp Excelent Leader* (2009), dan *Miss Manado International School* (2009). Ia pernah menjuarai lomba pidato dalam bahasa Inggris, dan lulus dengan 4 besar NEM tertinggi se-Sulut.

Pada masa kuliah, ia juga aktif di Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH. Selama menjadi mahasiswa, Hillary Brigitta Lasut juga pernah menjadi pemenang ketiga *the Extemporaeous Speech Contest* (2011) dan peraih juara II Debat Internal FH UPH (2014). Terakhir, ia menjadi bagian dari Garda Pemuda Partai Nasdem.

### Undang-Undang KPK

Mengomentari tuntutan mahasiswa agar pemerintah mengeluarkan Perppu KPK, Hilary berpendapat, Presiden Joko Widodo tidak perlu terburu-buru memenuhi tuntutan mahasiswa tersebut. Alasannya, keberatan mahasiswa terhadap pasal-pasal UU KPK hasil revisi belumlah jelas. Karena itu, presiden harus menunggu terlebih dahulu pasal-pasal mana yang menjadi keberatan mahasiswa dan apa alasannya.

“Bukan berarti semua harus diubah. Pasal mana saja yang tidak disetujui dengan alasan yang jelas, baru bisa dilakukan perubahan

terhadap Perppu,” katanya.

“Ini penting jangan sampai Perppu yang dikeluarkan malah menimbulkan masalah baru. Misalnya saja menyangkut dewan pengawas. Dewan pengawas penting untuk menjamin terjadinya transparansi. Karena kekuasaan yang absolut akan menimbulkan korupsi yang absolut (absolute power corrupt absolutely),” imbuhnya.

Apalagi, menurut Hillary, perubahan yang dilakukan terhadap UU KPK sejatinya merupakan upaya untuk menyerasikan dengan hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan perundang-undangan yang lain. Perubahan (revisi) ini dilakukan agar perjalanan KPK ke depan lebih harmonis.

Selain itu, lanjut Hillary, Perppu yang dikeluarkan sebagai jawaban aksi demo mahasiswa bisa menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Akibatnya, akan banyak muncul aksi demo yang bermaksud melakukan tuntutan tertentu. Padahal sudah ada jalur resmi bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, tidak melulu harus menggunakan jalur demonstrasi. Apalagi jika demonstrasi itu berakhir dengan keriuhan.

“Jangan sampai, karena mau mencegah terjadinya korupsi tapi malah membuat kerugian yang lebih besar. Aspirasi harus dilakukan melalui jalur yang benar. Bukan selalu harus memakai aksi turun ke jalan. Kalau tidak, maka demo akan terus dilakukan oleh orang yang tidak ingin NKRI ini kuat,” pungkash Hillary. □

MBO



## Empat Pilar MPR Penting untuk Keutuhan Bangsa dan Negara

**P**ERUBAHAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah membawa satu perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan maupun pemerintahan, serta praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut dapat dilihat dari penegasan penyelenggaraan pemerintahan negara yang lebih demokratis, berjalannya mekanisme *checks and balances* antarlembaga negara serta penegasan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak konstitusional warga negara.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan paham konstitusionalisme yang menempatkan konstitusi dalam kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi (*supreme*) dalam negara, maka pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan norma konstitusi adalah sebuah keniscayaan yang harus disadari oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai materi UUD NRI Tahun 1945 adalah sangat penting dalam rangka pendidikan politik rakyat dan pengembangan demokrasi agar masyarakat semakin memahami hak-hak dan kewajiban konstitusionalnya, sehingga konstitusi secara nyata dapat menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR) sebagai lembaga perwakilan rakyat dan daerah sekaligus sebagai lembaga demokrasi mempunyai tanggung jawab dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat untuk membangun kehidupan yang demokratis, termasuk melaksanakan wewenang konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam membangun kehidupan yang demokratis dan konstitusional, sejalan dengan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR akan terus melakukan

tugas sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, *Bhinneka Tunggal Ika*, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Ketetapan MPR.

Sosialisasi diselenggarakan untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan tentang nilai-nilai Empat Pilar MPR. Untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, MPR menetapkan program kegiatan dan sasaran agar seluruh nilai-nilai luhur tersebut dapat diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi juga diselenggarakan untuk menjawab dan meningkatkan peran strategis MPR dalam menyikapi adanya kondisi krisis kebangsaan, yaitu semakin mudarnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai Pancasila pada khususnya dan konstitusi serta nilai-nilai kebangsaan lainnya.

Sosialisasi Empat Pilar MPR sangat penting. Sesuai dengan aspirasi yang diterima MPR, beberapa alasan pentingnya sosialisasi Empat Pilar MPR antara lain misalnya: *Pertama*, karena masih lemahnya penghayatan dan pengamalan agama serta munculnya pemahaman agama yang keliru dan sempit. "Seperti munculnya radikalisme yang melahirkan terorisme. Ini harus diantisipasi agar jangan sampai ada anggota masyarakat yang terpapar radikalisme dan terorisme". *Kedua*, masih adanya pengabaian terhadap kepentingan daerah dan timbulnya fanatisme kedaerahan. Masih terjadi disparitas pembangunan pusat dan daerah. Ini menimbulkan fanatisme kedaerahan, sehingga sempat muncul daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. *Ketiga*, kurang berkembangnya penghargaan terhadap kebhinnekaan dan kemajemukan yang melahirkan politik SARA. *Keempat*, karena kurangnya keteladanan sebagian pemimpin sebagai tokoh bangsa. Ini terkait dengan banyaknya praktik korupsi dan kurang optimalnya penegakan hukum.

Sosialisasi perlu dilakukan karena banyak di antara warga negara yang bersikap apatis dan lupa akan perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan dan mewariskan nilai-nilai luhur bangsa yang merupakan identitas negara Indonesia. Dengan sosialisasi yang menyeluruh, diharapkan akan menciptakan keharmonisan dalam

Oleh:  
**Bambang Soesatyo**  
Ketua MPR RI



kehidupan berbangsa dan bernegara. MPR mengharapkan bahwa dengan sosialisasi akan tercipta harmoni bersama seluruh warga bangsa membangun Indonesia dalam suasana negeri yang aman dan damai.

Beberapa metode yang akan dilakukan dalam rangka sosialisasi, antara lain: Sosialisasi langsung oleh Anggota MPR kepada masyarakat di daerah pemilihan, Sosialisasi kepada Tokoh Masyarakat, Sosialisasi kepada Aparatur Pemerintah Kabupaten/ Kota, Sosialisasi kepada Instansi/Ormas, Sosialisasi melalui Kemah Empat Pilar, Sosialisasi Pendidikan Kebangsaan/Bela Negara, Sosialisasi melalui media massa (cetak dan elektronik), *Outbound* Empat Pilar, seminar, *Focus Group Discussion*, *Workshop*, *Training of Trainers*, Penulisan Karya Tulis Ilmiah, *Constitutional Drafting*, Lomba Cerdas Cermat, Debat Konstitusi, dan Pagelaran Seni dan Budaya. Metode sosialisasi ditetapkan untuk memberikan kemudahan agar materi sosialisasi yang disampaikan benar-benar dipahami oleh kelompok yang menjadi sasaran kegiatan.

Salah satu rekomendasi MPR sebagaimana terdapat dalam Keputusan MPR Nomor 2/MPR/2019 tentang Rekomendasi MPR Masa Jabatan 2014-2019 adalah dalam sosialisasi Empat Pilar MPR, MPR berwenang untuk bekerja sama dengan lembaga negara dan lembaga negara lainnya, dan khusus tentang Pancasila berwenang bekerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh Presiden yang melaksanakan fungsi pembinaan ideologi Pancasila.

Oleh karenanya, perlu kita renungi kembali lagi bahwa upaya menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi dalam melaksanakan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam nilai-nilai Empat Pilar bukanlah tanggung jawab satu pihak saja, melainkan tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tugas memasyarakatkan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan bukan pula hal yang sederhana, akan tetapi membutuhkan dukungan dan keteladanan dari berbagai komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara.

Dalam laporan pelaksanaan sosialisasi, MPR berpendapat bahwa

seluruh kegiatan sosialisasi yang dilakukan sangat bermanfaat dan dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam membangun suasana kedamaian dalam interaksi, baik yang dilakukan oleh warga negara dengan warga negara, antarwarga negara dengan penyelenggara negara, maupun antarpengelola negara dengan penyelenggara negara. Salah satu praktik harmonisasi yang dapat dibangun, antara lain misalnya yang terjadi dalam pemilihan Pimpinan MPR masa jabatan 2019-2024 yang dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dengan semangat mengedepankan nilai-nilai kepentingan bersama, sebagai salah satu nilai yang terdapat dalam sila Pancasila, MPR dapat melakukannya tanpa harus memaksakan kehendak dengan menempuh upaya pemungutan suara.

Respon positif dari sosialisasi yang dilakukan MPR sangat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan tugas dan rekomendasi tentang nilai-nilai luhur bangsa ini, MPR masa jabatan 2019-2024 akan terus berupaya mensosialisasikan dan senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan institusi dan pihak manapun dalam memberikan pemahaman terhadap warisan luhur bangsa Indonesia. Selain itu, dalam merespons kemajuan teknologi informasi, MPR akan terus mencari cara-cara baru sehingga nilai-nilai konsensus kebangsaan bisa diterima, terutama oleh generasi muda. Mengembangkan metode sosialisasi yang menerapkan perpaduan antara penggunaan media seni-budaya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi akan terus dikembangkan sehingga program sosialisasi dapat dilakukan lebih efektif lagi dengan terobosan-terobosan baru yang diciptakan.

Dengan mengedepankan kepentingan bersama dan untuk menjaga keutuhan Negara, maka seluruh penyelenggara negara dan warga negara sedapat mungkin mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, mengembangkan karakter individu yang sejalan dengan Pancasila dengan melakukan didik diri melalui pembiasaan, pembelajaran dan keteladanan, serta mengembangkannya dalam tataran kelompok dan masyarakat. □

## Bamsoet Puji Buku Kiprah Perempuan dalam Parlemen

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong anggota parlemen untuk membuat buku. Dan, sebuah buku yang memaparkan kinerja anggota parlemen telah diterbitkan.

**B**AGI Dr. Marlinda Irwanti, SE., MSi., menjadi anggota DPR adalah penggalan hidup yang selalu dikenang dan tak akan dilupakan. Untuk memonumentalkan perjalanan hidupnya sebagai wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Marlinda membukukan semua aktivitasnya dengan judul *Kiprah Perempuan Parlemen*.

Buku dengan sampul dominan warna kuning itu memiliki tebal XVII + 380 halaman ditambah lampiran foto dan klip koran yang memuat kegiatan yang dilakukan. Sebagai biografi, buku itu mengisahkan sepak terjang dirinya mulai dari mengikuti pendidikan sekolah dasar hingga kuliah di Universitas Islam Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, hingga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Juga semasa aktif menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi, serta terjun di organisasi kemasyarakatan, serta saat mengemban amanat sebagai wakil rakyat.

Buku itu terbagi dalam X Bab, yakni *Kiprah Perempuan Parlemen; Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR; Sekilas Komisi X; Keterwakilan Perempuan; Komunikasi dan Sinergitas dengan Konstituen; Problematika Caleg Perempuan; Penutup; Narasi Pemikiran Marlinda; Sekilas Penulis; dan Galeri Penutup*. Sepuluh bab bisa jadi sebagai penanda dirinya pernah sebagai anggota Komisi X.

Dalam buku ini, Marlinda mengungkapkan bahwa dia berkiprah di partai berlambang pohon beringin sejak 1990. Bukan dari Slipi ia memulai karirnya, namun dari Golkar wilayah Jakarta Selatan kemudian ke Jakarta.

Dari Jakarta selanjutnya ia masuk DPP (dewan pengurus pusat) dengan memangku jabatan mulai dari bidang hingga wakil sekjen.

Dia menjadi wakil rakyat di DPR, tidak melalui proses yang normal namun melalui pergantian antarwaktu (PAW). Ia menggantikan Budi Supriyanto, Dapil X Jawa Tengah, pada PAW yang dilaksanakan 23 Agustus 2016. "Bersama saya dilantik pula Sutriyono dari PKS", ujarnya. Ketika bertugas di Senayan, Marlinda ditugaskan di Komisi X. "Sesuai dengan *concern* saya, terutama di bidang pendidikan," ungkapnya.

Sesuai dengan judul buku tentang keperempuanan, Marlinda memaparkan, kini perempuan ada hampir di semua lini kehidupan dan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ada yang menjadi dokter, pengacara, birokrat, pilot, dosen, menteri, maupun sebagai politisi yang duduk menjadi anggota DPRD, DPR, DPD, dan MPR. Soal menjadi wakil rakyat, dirinya bertanya dalam buku itu, "Apakah perempuan sudah cukup terwakili di bangku parlemen?"

Marlinda dalam buku itu mengakui, partisipasi perempuan di dunia

politik di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia merdeka, namun kesempatan dan tingkat partisipasi perempuan masih rendah. Diakui meski secara jumlah, penduduk Indonesia mayoritas adalah perempuan namun mereka tak lebih dari penduduk minoritas. Ia berharap, perlu terjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga Indonesia, tak terkecuali kelompok marjinal dan kaum minoritas.

Perempuan yang sudah menulis empat buku itu mendorong perempuan dengan menuliskan, Indonesia telah lama mengesahkan Undang-Undang No. 68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Politik Perempuan yang di dalamnya mengatur perwujudan kesamaan kedudukan (non-diskriminasi), jaminan hak persamaan dipilih dan memilih, jaminan partisipasi dalam perumusan kebijakan, kesempatan menempati posisi jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi politik.

Di buku yang berbentuk persegi panjang, perempuan lulusan SD Negeri Ungaran Yogyakarta itu mengakui keterlibatan perempuan di parlemen

mengalami peningkatan. Problem atau anggapan politik itu kotor dan politik identik dengan laki-laki dan tidak pantas untuk perempuan, menurut Marlinda, masih sangat melekat di pikiran kaum perempuan Indonesia. "Tak heran jika keterwakilan maksimal perempuan masih sebatas mimpi", keluhnya.

Buku yang pernah dibedah oleh Perpustakaan MPR itu menjadi istimewa sebab Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, memberi kata pengantar. Pria yang

akrab dipanggil Pak JK itu mengatakan, buku ini menunjukkan bahwa anggota DPR mengemban tugas mulia yang berat. Sebagian besar waktunya harus rela dipersembahkan bagi kemaslahatan masyarakat. "Ibu Marlinda merupakan salah satu akademisi yang menyumbangkan ilmunya demi kemajuan bangsa dan negara", tuturnya.

Tak hanya Pak JK yang memberi kata pengantar, Ketua DPR periode 2014-2019 dan Ketua MPR periode 2019-2024, Bambang Soesatyo juga memberi kata pengantar. Menurut pria yang akrab dipanggil Bamsoet, pembuatan buku ini merupakan contoh positif yang bisa ditiru oleh anggota dewan lainnya. Dia mengatakan, buku Ibu Marlinda memperlihatkan bahwa beliau telah melaksanakan tugas di Dapilnya dengan baik. Dengan terjun langsung, masyarakat merasa keterwakilannya dijaga betul oleh anggota dewan. "Buku yang bisa diakses masyarakat luas bisa memperlihatkan kinerja anggota parlemen", ujarnya. □

